



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163

Telepon:(0751) 72985, Fax. (0751) 778109

Laman:<http://www.fhuk.unand.ac.id>Email:sekretariat@law.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 1043 /UN16.04.D/KPT/XII/2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNIS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 -2027

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Renstra Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu menyesuaikan dengan Renstra Universitas Andalas 2022 - 2024;
 - b. bahwa untuk lebih terarahnya Upaya pencapaian Visi Fakultas Hukum Universitas Andalas, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2022 - 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2022 - 2027;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
 5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020 -2024;
 6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1370/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Periode 2022 - 2027;
 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 - 2027;
- KESATU : Menetapkan rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2022 - 2027 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 29 Mei 2023


+ FERDI
NIP.196807231993021001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS 2022-2027

PRAKATA

Alhamdulillah.. Sekalipun bekerja dalam waktu singkat, Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH UNAND) Tahun 2022-2027 akhirnya dapat menyelesaikan dokumen ini. Dokumen ini menjadi pekerjaan strategis yang dipilih untuk dikerjakan pertama kali di awal periode kepemimpinan Dekan FH UNAND Periode 2022-2027. Sebab, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan setiap program, kegiatan dan anggaran tahunan Fakultas. Pada saat yang sama juga akan menjadi acuan dalam menentukan program prioritas yang mesti dikerjakan lebih dahulu ketika harus dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) Tahun 2022-2027 ini disusun dengan mengacu pada Renstra Universitas Andalas, mempertimbangkan isu-isu terkini yang terkait dengan pendidikan tinggi hukum, dan program strategis Dekan FH UNAND periode 2022-2027. Renstra ini disusun sebagai kerangka kerja Fakultas untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Adapun visi Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah “*Menjadi Fakultas Hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di tingkat global tahun 2027*”. Dokumen ini berisi potret diri FH UNAND saat ini, modal yang dimiliki untuk melaksanakan misi yang diemban dan peta jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi FH UNAND.

Dengan selesainya dokumen ini, atas nama pimpinan FH UNAND kami menyampaikan terima kasih yang amat tinggi kepada bapak dan ibu anggota Tim Penyusun dokumen Renstra FH UNAND di bawah koordinasi Wakil Dekan II, Dr. Sofirman Syofyan dan Almaududi sebagai ketua dan sekretaris Tim. Hasil kerja ini merupakan dedikasi nyata sekaligus bentuk kecintaan bapak dan ibu pada kemajuan institusi FH UNAND. Semoga pekerjaan yang bapak/ibu lakukan ini juga bernilai ibadah dan menjadi amal jariah hendaknya. Amin...

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Dr. Ferdi, SH., MH.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra	1
1.1.2. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Fakultas Hukum	5
1.2. POTENSI PENGEMBANGAN.....	8
1.2.1. Bidang Pendidikan.....	8
1.2.2. Bidang Penelitian.....	45
1.2.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	51
1.2.4. Sumber Daya Manusia.....	53
1.2.5. Sarana dan Prasarana	61
1.2.6. Prasarana Pendukung Pendidikan	63
1.2.7. Analisis Kondisi Lingkungan	69
1.2.8. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal	76
1.3. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang Diambil ke Depan ..	83
BAB II	86
VISI, MISI, DAN TUJUAN	86
2.1. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	86
2.2. NILAI-NILAI INTI (<i>CORE VALUES</i>).....	89
2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN	92
2.4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	92
BAB III	103
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	103
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	103
3.2. KERANGKA REGULASI.....	107
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN	107
3.3.1. Struktur Organisasi.....	108
3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	116
3.3.3. Reformasi Birokrasi	124
BAB IV	126
EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN.....	126

4.1.	Kerangka Sumber Pembiayaan Rencana Strategis	126
4.2.	Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya	129
4.2.1.	Asumsi-asumsi Ekonomi Makro	129
4.2.2.	Asumsi-asumsi Mikro Fakultas Hukum Universitas Andalas	131
4.2.3.	Asumsi Tarif	132
4.2.4.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	134
BAB V		140
RENCANA STRATEGIS 2022-2027		140
5.1.	CITA-CITA FAKULTAS HUKUM	140
5.2.	SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN	142
5.3.	KEBIJAKAN	146
5.4.	STRATEGI PENGEMBANGAN	147
5.5.	TEMA STRATEGIS	148
BAB VI		157
PENUTUP		157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Karakter Andalasian.....	90
Gambar 4.2.2-1 Perkembangan Jumlah Tenaga Dosen Tahun 2017-2022	Error! Bookmark not defined. 128
Gambar 5-1 Tema Strategis Fakultas Hukum Unand Menjadi Fakultas yang Otonom	149
Gambar 5-2 Strategy Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 1.....	155
Gambar 5-3 Strategy Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 2.....	155
Gambar 5-4 Strategi Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 3 (1)	156
Gambar 5-5 Strategi Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 3 (2)	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Tujuan.....	92
Tabel 2 Program dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis 1	94
Tabel 3 Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 2	96
Tabel 4 Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 3	97
Tabel 5 Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 4	98
Tabel 6 Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 5	99
Tabel 7 Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 6	100
Tabel 8 Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 7	101
Tabel 9 Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Perdata	117
Tabel 10 Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Pidana.....	118
Tabel 11 Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Tata Negara	119
Tabel 12 Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara	120
Tabel 13 Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Internasional	121
Tabel 14 Kelompok dan Jenis pendapatan FHUA 2022-2027	127
Tabel 15 Kegiatan akademik yang potensial dimasa depan menjadi pemasukan bagi Universitas Andalas dan FHUA	128
Tabel 16 Proyeksi Indikator Makro 2024.....	129
Tabel 17 Perkiraan Jumlah Mahasiswa Sampai Akhir Tahun 2027	132
Tabel 18 Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Reguler 2022	133
Tabel 19 Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Mandiri 2022	133
Tabel 20 Perkembangan penerimaan dan pengeluaran FHUA dalam 4 tahun terakhir	135
Tabel 21 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan FHUA tahun 2018 - 2027	136
Tabel 22 Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Anggaran FHUA tahun 2020-2027	138
Tabel 23 Realisai dan Proyeksi Belanja tahun 2019 sampai 2024	139
Tabel 24 Daftar Tema Strategis dan Pemilik Tema.....	153
Tabel 25 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra

Kondisi terkini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan yang mesti dijawab agar tujuan hidup berbangsa dan bernegara tetap dapat diwujudkan. Kesiapan Indonesia menyongsong era penuh teknologi sejatinya didasari oleh idealisme bangsa sebagaimana yang dicitakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa negara Indonesia memiliki prinsip untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Gagasan ideal inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi sehingga menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025: **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**.

Visi besar itu sejatinya meniscayakan seluruh lapisan negara untuk dapat mengambil peran nyata dan bersinergi guna mencapai kemandirian sebagai bangsa yang maju dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di sinilah lembaga pendidikan tinggi harus memainkan peran strategisnya yang dapat dicapai melalui peran utamanya, yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran utama yang tersimpul dalam Dharma Pendidikan senyatanya ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul guna berperan aktif dalam gerakan pembangunan yang meliputi pembentukan sumber daya yang berkompetensi, memiliki daya saing dan berakhlak mulia. Dharma Penelitian diharapkan dapat menjadi jalan untuk pengelolaan pengetahuan bagi kepentingan bangsa. Sedangkan Dharma

Pengabdian pada masyarakat adalah saluran untuk mengaplikasikan apa yang diperoleh dari penelitian untuk mendukung pencapaian visi bangsa.

Fakultas Hukum sebagai bagian Universitas Andalas yang telah memperoleh status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 harus mengambil peran dan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian cita-cita bangsa untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing untuk kejayaan bangsa. Status PTNBH memberi keunggulan dalam fleksibilitas dan otonomi untuk digunakan sebagai *milestone* penerapan strategi loncatan besar (*great leap strategies*) menjadi salah satu perguruan tinggi yang diakui dunia (*World Class University*).

Untuk itu Renstra FH UNAND 2022-2027 digunakan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan *civitas academica* fakultas untuk bersinergi merencanakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna mempercepat pencapaian keunggulan FH UNAND di tingkat global. Di mana pedoman yang terkandung dalam Renstra ini merupakan cita yang sejalan dengan Renstra PTNBH Universitas Andalas 2020-2024. Dengan demikian, seluruh kegiatan FH UNAND secara akademik maupun non-akademik terencana dengan baik dan terukur secara cermat sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi secara efisien dan tata kelola organisasi yang akuntabel.

FH UNAND sendiri perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya fisik, manusia, finansial maupun sumber daya intelektual. Setelah peningkatan kapabilitas internal tersebut, hasilnya dipersembahkan kepada bangsa dalam bentuk lulusan yang berkualitas, hasil penelitian dan pengabdian yang berdampak luas bagi masyarakat. Upaya itu sejatinya telah diperankan oleh FH UNAND sejak saat berdiri di tahun 1951.

Meski beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan FH UNAND di tingkat nasional, misalnya akreditasi A, prestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta profil lulusan

yang menempati posisi strategis dalam pembangunan bangsa, namun raihan itu merupakan bentuk lain dari tantangan yang kian berat. Bahwa pengelolaan FH UNAND tidak dapat lagi dilakukan melalui cara-cara konvensional, dan perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi di era Revolusi Industri saat ini. Beberapa di antaranya meliputi pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), pembelajaran berbasis teknologi informasi (*blended learning*), pembelajaran terbuka (*open learning*), *issue* kualitas dan relevansi, persaingan, keberlanjutan, liberalisasi pasar yang mempengaruhi dunia pendidikan, serta aspek akuntabilitas. Semua itu merupakan konsekuensi logis sebagai bentuk respon atas dinamika pada lingkungan. Namun semua bentuk dinamika tersebut tidak boleh menghilangkan jati diri dan lupa pada ekspektasi bangsa pada lembaga ini.

Kejelasan arah program dan aktivitas harus mampu menjaga konsistensi pada tujuan jangka panjang agar FH UNAND tetap fokus dalam menjalankan perannya. Di sinilah perencanaan berperan penting dalam menjaga konsistensi tersebut, bahwa Renstra periode 2022-2027 ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang FH UNAND yang sejalan dengan tahapan pembangunan jangka panjang Universitas Andalas.

Hingga tahun 2022, FH UNAND telah mengalami empat periode akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan peringkat sebagai berikut:

1. Tahun 1998, program studi Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan Sarjana memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 01270/Ak-1.1/UADIHK/VII/1998, tanggal 11 Agustus 1998 di bawah kepemimpinan Firman Hasan, S.H., LL.M., yang berlaku selama lima tahun;
2. Tahun 2003, program studi Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan Sarjana memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 0581/AK-VII-S1-024/UADIHK/VIII/2003, tanggal 22 Agustus 2003 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. yang berlaku selama lima tahun;

-
3. Tahun 2008, program studi Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan Sarjana terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 029/BAN-PT/AK-XI/2008, tanggal 13 November 2008 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH., yang berlaku selama lima tahun;
 4. Tahun 2014, FH UNAND yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum untuk semua jenjang pendidikan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., memperoleh akreditasi sebagai berikut;
 - a. Jenjang pendidikan Sarjana, program studi Ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 27-6-2019);
 - b. Jenjang pendidikan Magister, program studi Ilmu Hukum terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 19-5-2019);
 - c. Jenjang pendidikan Magister, program studi Kenotariatan terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 27-6-2019);
 - d. Jenjang pendidikan Doktor, program studi Ilmu Hukum terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 282/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2014 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 15-8-2019).
 5. Tahun 2018, FH UNAND yang terus berupaya melanjutkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum untuk semua jenjang pendidikan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., M.H. dan Prof Busyra Azheri, SH., MH., memperoleh akreditasi sebagai berikut:
 - a. Jenjang pendidikan Sarjana, program studi Ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2026/SK/BANPT/Akred/S/VI/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 25 - Juni - 2024);
 - b. Jenjang pendidikan Magister, program studi Ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 1034/SK/BAN-

-
- PT/Akred/M/IV/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 23 - April - 2024);
 - c. Jenjang pendidikan Magister, program studi Kenotariatan terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 1850/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 28 - Mei - 2024);
 - d. Jenjang pendidikan Doktor, program studi ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 3161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 20 – Agustus - 2024).

1.1.2. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Fakultas Hukum

Cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi di Sumatera Barat telah diupayakan sejak hari-hari awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Kala itu para cendekiawan Sumatera Barat sudah menyadari betapa pentingnya sebuah institusi pendidikan untuk mengisi kemerdekaan. Kesadaran kolektif itu kemudian melatarbelakangi pemikiran akan kebutuhan generasi muda yang terdidik untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Usaha-usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di Sumatera Barat telah dimulai dengan Kursus Volks Universiteit yang dipimpin oleh [Djamaluddin Adinegoro](#) pada tahun 1946. Selanjutnya pada tahun 1948, sebuah Panitia Sekolah Tinggi dibentuk dan diketuai oleh dr. [Mohammad Djamil](#). Upaya panitia ini untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi terhenti karena pecahnya [Agresi Militer Belanda II](#). Setelah negara mulai mencapai stabilitas nasional, upaya kolektif tersebut mulai menemui titik terang ketika dr. Mohammad Djamil, [Saalah Joesoef Sutan Mangkoeto](#), Mr. [Abubakar Jaar](#), dr. [Rasjidin](#), dan [Muhammad Sjafei](#) mendirikan Yayasan Sriwidjaja pada tanggal 21 Maret 1951. Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Padang dengan Akta Notaris pendiriannya Nomor 10 tanggal 20 Maret 1951 (Notaris Hasan Qalbi). Di bawah naungan Yayasan Sriwidjaja inilah didirikan Balai

Perguruan Tinggi Hukum (BPTH) Pancasila di Padang pada tanggal 17 Agustus 1951, dengan komposisi kepengurusan dr. Mohammad Djamil bertindak selaku ketua pengurus harian, sementara Mr. Abubakar Djaar sebagai ketua panitia fakultas.

Di tahun pertamanya, BPTH Pancasila memiliki delapan orang dosen yang terdiri atas tujuh orang dosen dalam negeri dan satu orang dosen asing bernama Mr. Drs. van Oude Nieuwland yang ditugaskan oleh [Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan](#) pada awal tahun ajaran 1952-1953. Sementara tujuh orang dosen dalam negeri lainnya adalah Harun Al Rasjid, Mr. [Egon Hakim](#), Mr. [Marah Nazaroedin](#), Mr. [Mohammad Nasroen](#), Mr. [Mak Kin San](#), Prof. Mr. Dr. [Hazairin](#), dan Mr. Drs. [A. de Goede van Oude Nieuwland](#). Animo masyarakat negara muda Indonesia, khususnya Sumatera Barat, terlihat dari jumlah mahasiswa yang mencapai 140 orang di tahun pertama itu.

Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 1954, Pemerintah Indonesia mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar, Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh pada tanggal 30 November 1954. Kemudian pada tanggal 7 September 1955 didirikan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam di Bukittinggi. Kemudian Yayasan Sriwijaya menyerahkan BPTH Pancasila kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah, dan pada tanggal 23 Desember 1955 BPTH Pancasila resmi berganti nama menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80016. Lima fakultas tersebut menjadi cikal bakal universitas yang kemudian atas usul Mohammad Hatta diberi nama Universitas Andalas yang resmi berdiri pada tanggal 13 September 1956, sebuah nama yang merujuk pada nama pulau Sumatera yang juga dikenal sebagai pulau Andalas. Perkembangan dan upaya modernisasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat terus berlanjut seiring waktu hingga nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat diganti menjadi Fakultas Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0538/O/1983 pada tahun 1983.

Di usia yang menginjak 71 tahun, Fakultas Hukum tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi di jenjang sarjana, namun juga mencakup jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Doktorat. Dikelola oleh sebanyak 91 orang dosen dan 40 tenaga kependidikan, Fakultas Hukum kini menyelenggarakan pendidikan bagi 3.461 orang mahasiswa aktif, dengan rincian 2.494 orang mahasiswa di Program Sarjana, 343 orang mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum, 550 orang mahasiswa di Program Magister Kenotariatan dan 74 orang mahasiswa di jenjang Program Doktorat.

Saat ini proses belajar mengajar (PBM) lebih diarahkan pada penguasaan ilmu hukum secara teoritis dan *legal skill* berdasarkan masing-masing strata pendidikan dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai satuan pengukur beban studi mahasiswa dan beban tugas bagi dosen. Oleh karena itu para dosen dituntut untuk melakukan persiapan yang cukup guna mengoptimalkan proses pencapaian tujuan pendidikan hukum, transfer ilmu dan keterampilan. Sebaliknya mahasiswa diharapkan aktif dalam PBM, terutama untuk mengasah kemampuan untuk memberikan argumentasi saat menganalisis persoalan hukum. Dengan demikian strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa sangat diperlukan dalam PBM, seperti adanya evaluasi tengah semester dan akhir semester. Di samping itu diselenggarakan pula evaluasi kemajuan studi pada akhir semester tertentu sesuai dengan rentang masa studi dari masing-masing strata pendidikan sebagai pelaksanaan ketentuan *Drop Out* (DO), serta predikat yudisium.

Keberadaan dosen pada penyelenggaraan pendidikan Sarjana (S1) program studi ilmu hukum FH UNAND terdistribusi ke dalam lima departemen, yakni Departemen (1) Hukum Perdata; (2) Hukum Pidana; (3) Hukum Tata Negara; (4) Hukum Administrasi Negara, dan (5) Hukum Internasional. Lima departemen tersebut dipimpin oleh masing-masing seorang ketua dan sekretaris yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan dan penilaian kinerja dosen melalui penilaian SKP, verifikasi remunerasi serta mendistribusikan tugas-tugas pengajaran. Selain itu penilaian kinerja dosen juga dilakukan oleh atasan dosen yang bersangkutan sebagai verifikator Beban Kerja Dosen (BKD) dan dosen yang diangkat oleh Rektor sebagai validator remunerasi.

Masing-masing departemen mengelola sumber daya dan perkuliahan pada masing-masing departemen. Semuanya dijalankan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Meskipun demikian, substansi Peraturan Rektor tersebut tidak menutup kemungkinan bagi dosen pada suatu departemen untuk mengasuh mata kuliah yang berada pada departemen lain, karena untuk program sarjana, pada dasarnya Fakultas Hukum hanya mengelola satu program studi. Misalnya, mata kuliah Hukum Lingkungan yang pengelolaannya berada di bagian Hukum Administrasi Negara, juga diasuh oleh dosen-dosen yang berasal dari bagian lain, seperti bagian Hukum Internasional dan Hukum Perdata. Skema ini dimungkinkan sepanjang dosen yang bersangkutan memenuhi kualifikasi untuk mengajar pada mata kuliah yang telah diprogramkan.

Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan Program Magister dan Doktor, penyelenggaraan perkuliahan dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi, termasuk dalam mendistribusikan beban tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kualifikasi tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas rutin dalam penyelenggaraan pendidikan di FH UNAND dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya yang meliputi bidang tugas pengembangan dan pengawasan di bawah kewenangan dan tanggung jawab dari Wakil Dekan II Bidang Umum dan Sumber Daya. Tenaga kependidikan dimaksud terdiri atas pengadministrasi akademik, pengadministrasi kemahasiswaan, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi kepegawaian, teknisi dan pustakawan yang ditempatkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan organisasi tata kerja FH UNAND, di mana di bawah pimpinan terdapat empat manajer dan satu kepala kantor.

1.2. POTENSI PENGEMBANGAN

1.2.1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di FH UNAND terdiri dari tiga jenjang studi yang terdiri dari Strata-1 (S1), Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3). Dari ketiga jenjang studi tersebut, FH UNAND sampai saat ini mengelola empat program studi. Selain Program Studi Sarjana yang terakreditasi A, terdapat Program Studi Magister Ilmu Hukum yang terselenggara sejak tahun 1999 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 435/DIKTI/Kep/1999 tanggal 29 Oktober 1999 yang juga terakreditasi A, Program Studi Magister Kenotariatan yang terselenggara sejak tahun 2010 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67/D/0/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang memperoleh Akreditasi B, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang terselenggara sejak tahun 2009 berdasarkan SK Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 449/D/T/2009 tanggal 6 April 2009 yang telah mendapat Akreditasi A. Untuk ke depan FH UNAND menargetkan program-program studi yang ada mampu dan dapat terakreditasi pada akreditasi internasional. Salah satunya Akreditasi *The Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA).

1.2.1.1. Program Studi Sarjana

Agar proses belajar dan mengajar (PBM) berjalan secara terencana dan teratur, baik isi atau bahan kajiannya maupun cara penyampaian dan penilaian, maka perlu adanya kurikulum yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Pada level pengaturan di tingkat kementerian, pengaturan mengenai kurikulum jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan pada tingkat peraturan Rektor Universitas Andalas, pengaturan mengenai kurikulum ini terdapat dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16 R/KPT/2021 Tentang Penetapan Revisi Kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan di atas, dapat diketahui bahwa semua mata kuliah terbagi atas Mata Kuliah Kelompok Kurikulum Inti dan

Mata Kuliah Kelompok Kurikulum Institusional. Dalam masing-masing kelompok tersebut semua mata-kuliah dibagi lagi berdasarkan sub-kelompoknya, yang terdiri atas:

1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
2. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditemukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
4. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB), yakni kelompok bahan kajian yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
5. Mata kuliah berkehidupan (MBB), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

Pada mata kuliah Kelompok Kurikulum Inti, terdapat mata kuliah dalam sub-kelompok MPK, MKK dan MKB. Sedangkan dalam mata kuliah Kelompok Kurikulum Institusional terdapat selain mata kuliah dalam sub-kelompok MPK, MKK dan MKB juga sub-kelompok MPB dan MBB. Mata kuliah dalam sub-kelompok MKK, MKB, MPB dan MBB dari mata kuliah Kelompok Kurikulum Institusional ini ada yang dikelola oleh Fakultas dan ada pula yang dikelola oleh departemen dengan jumlah masing-masing SKS sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Deskripsi Struktur Kurikulum 2021

No	Kelompok Mata Kuliah	Sub Kelompok Mata Kuliah	Jumlah SKS Mata Kuliah	
1	Mata Kuliah Kelompok Kurikulum Inti	Kelompok MPK	7 SKS	
		Kelompok MKK	46 SKS	
		Kelompok MKB	19 SKS	
2	Mata Kuliah Kelompok Kurikulum Institusional	Kelompok MPK	6 SKS	
		Kelompok MKK	Dikelola Fakultas	2 SKS
			Dikelola Departemen	162 SKS
		Kelompok MKB	Dikelola Fakultas	2 SKS
			Dikelola Departemen	4 SKS
		Kelompok MPB	Dikelola Fakultas	6 SKS
			Dikelola Departemen	2 SKS
		Kelompok MBB	Dikelola Fakultas	6 SKS
			Dikelola Departemen	12 SKS

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16 R/KPT/2021, Fakultas Hukum memiliki lima departemen yang terdiri atas:

1. Departemen Hukum Perdata;
2. Departemen Hukum Administrasi Negara;
3. Departemen Hukum Internasional;
4. Departemen Hukum Pidana;
5. Departemen Hukum Tata Negara.

Selain keberadaan departemen, Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16 R/KPT/2021 telah memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengonsentrasikan keilmuannya pada salah satu dari delapan pilihan program kekhususan dengan beban studi minimal 144 SKS. Delapan program kekhususan tersebut dikelola oleh lima departemen sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Program Kekhususan dan Bagian Pengelolanya

No	Program Kekhususan	Bagian
1	Hukum Perdata	Hukum Perdata
2	Hukum Bisnis	
3	Hukum Adat dan Islam	
4	Hukum Pidana	Hukum Pidana
5	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara
6	Hukum Internasional	Hukum Internasional
7	Hukum Administrasi	Hukum Administrasi
8	Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam	

Adapun mata kuliah yang diajarkan, baik yang berdasarkan kelompok, sub-kelompok departemen atau program kekhususan, pengelolaanya diorganisasikan sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Pembagian Pengelolaan Mata Kuliah Berdasarkan Kelompok, Sub-Kelompok, Departemen atau Program Kekhususan

Smt	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Kel MK	Pengelola MK	Jlh
				Inti	Inst			SKS
I	HKF	101	Pengantar Ilmu Hukum	3	-	MKK	Fakultas	
	HKF	102	Pengantar Hukum Indonesia	3	-	MKK	Fakultas	
	HKF	103	Ilmu Negara	3	-	MKK	Fakultas	
	AND	113	Pendidikan Kewarganegaraan	2	-	MPK	Fakultas	
	AND	112	Pendidikan Agama	3	-	MPK	Fakultas	
	AND	114	Bahasa Indonesia	-	2	MPK	Fakultas	
	HKF	107	Bahasa Inggris	-	2	MPK	Fakultas	
	HKP	202/102	Hukum Islam	2	-	MPK	H.Perdata	
	HKP	203/103	Hukum Adat	2	-	MPK	H.Perdata	
				18	4			22
II	HKA	201	Hukum Administrasi Negara	3	-	MKK	HAN	
	HKN	201	Hukum Pidana	3	-	MKK	H. Pidana	
	HKN	202	Kriminologi	-	2	MBB	H. Pidana	
	HKP	201	Hukum Perdata	3	-	MKK	H. Perdata	
	HKI	301/201	Hukum Internasional	3	-	MKK	HI	
	HKP	306/206	Hukum Dagang	2	-	MKK	H. Perdata	
	HKT	201	Hukum Tata Negara	3	-	MKK	HTN	
	HKT	202	Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	2	MKK	HTN	

				17	4			21
III	HKA	302	Hukum Agraria	2	-	MKK	HAN	
	HKA	303	Hukum Ketenagakerjaan	-	2	MKK	HAN	
	HKI	402/302	Hukum Laut	-	2	MKK	HI	
	HKN	303	Hukum Acara Pidana	3	-	MKK	H. Pidana	
	HKN	304	Hukum Penitensir	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKP	304	Hukum Acara Perdata	3	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	305	Hukum Perjanjian	-	2	MKK	H. Perdata	
	HKP	510/310	Hukum Perusahaan	-	2	MKK	H. Perdata	
	HKT	403/303	Ilmu Perundang Undangan	-	2	MKK	HTN	
	HKI	404/304	Hukum Perdata Internasional	-	2	MKK	HI	
	HKP	511/311	Hukum Adat Minangkabau	-	2	MKK	H. Perdata	
				8	16			24
IV	HKA	404	Hukum Lingkungan	2	-	MKK	HAN	
	HKA	405	Hukum Pemerintahan Daerah	-	2	MKK	HAN	
	HKA	406	Hukum Acara PTUN	2	-	MKK	HAN	
	HKI	402	Hukum Pidana Khusus	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKI	403	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	-	2	MKB	HI	
	HKN	405	Delik-delik Dalam KUHP	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKP	407	Hukum Acara Peradilan Agama	2	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	408	Hukum Perancangan Kontrak	2	-	MKB	H. Perdata	
	MKP	509/409	Hukum Perbankan	-	2	MKK	H. Perdata	
	HKI	505/405	Hukum Ekonomi Internasional	-	2	MKB	HI	
	HKT	404	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	-	MKK	HTN	
				10	12			22
V	HKA	507	Praktik Peradilan TUN	2	-	MKB	HAN	
	HKA	508	Hukum Pajak	-	2	MKK	HAN	
	HKF	608/508	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	-	MKB	Fakultas	
	HKN	607/507	Praktik Peradilan Pidana	2	-	MKB	H. Pidana	
	HKT	607/507	Perancangan Perundangan-undangan	2	-	MKB	HTN	

	HKP	612/512	Praktik Peradilan Perdata	-	2	MKB	H.Perdata	
	HKT	505	Politik Hukum	-	2	MBB	HTN	
	HKT	506	Pratik Peradilan Mahkamah Konstitusi	2	-	MKB	HTN	
	HKF	511	Filsafat Hukum	-	2	MPB	Fakultas	
	AND	111	Pancasila	2	-	MPK	Fakultas	
				13	8			21
VI	HKF		Etika Profesi Hukum	-	2	MPB	Fakultas	
			Wajib PK	-	2	MPK	Fakultas	
			Wajib PK	-	2			
			Wajib PK	-	2			
			Wajib PK	-	2			
			Wajib PK	-	2			
			Wajib PK	-	2			
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
				0	20			20
VII	HKF	710	KKN	-	4	MBB	Universitas	
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
			Mata Kuliah Pilihan	-	2			
				0	10			10
VIII	HKF	813	Tugas Akhir	4	-			4
Jumlah SKS				70	75			144

Sumber: Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16 R/KPT/2021

Dengan menggunakan kurikulum yang telah diuraikan di atas, Fakultas Hukum diharapkan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang menguasai hukum nasional dan internasional serta keterampilan hukum, berintegritas dan berakhlak mulia, serta mampu

bersaing memasuki pasar kerja di era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk mencapai harapan tersebut di atas lulusan harus memenuhi capaian pembelajaran yang mencakup:

- a. sikap;
- b. penguasaan pengetahuan;
- c. keterampilan umum; dan
- d. keterampilan khusus.

Capaian pembelajaran sikap meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan meliputi:

- a. menguasai konsep dan teori tentang;
 - 1) ciri, struktur, dan teori ilmu hukum;
 - 2) sumber, asas/prinsip dan norma hukum;
 - 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.

-
- b. menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang hukum positif Indonesia, mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat dan hukum islam;
 - c. menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan keputusan/ketetapan;
 - d. menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar; dan
 - e. menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh.

Capaian pembelajaran ketarampilan umum meliputi:

- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
- b. mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
- c. mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat; dan
- d. mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.

Capaian pembelajaran keterampilan khusus meliputi :

-
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontes pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Untuk memenuhi capaian pembelajaran di atas, perlu adanya proses belajar mengajar yang baik yang meliputi:

- a. Penyiapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah
Saat ini proses belajar mengajar lebih diarahkan pada penguasaan ilmu hukum secara teoritis dan *legal skill* berdasarkan masing-masing strata pendidikan dengan sistem SKS sebagai satuan pengukur beban studi mahasiswa dan beban tugas bagi dosen. Oleh karena itu, terhadap dosen dituntut melakukan persiapan yang cukup

untuk proses transfer ilmu dan keterampilan. Persiapan yang cukup itu diwujudkan melalui penyusunan RPS yang menghendaki penguasaan materi pengajaran yang dibutuhkan *stake holder* dan pemberian materi sesuai dengan RPS tersebut.

Selain itu, dalam kerangka pengembangan dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi, mengharuskan adanya mata kuliah hukum yang melibatkan penggunaan teknologi digital, setidaknya membahas norma hukum yang berhubungan dengan teknologi digital. Misalnya, *cyber attack* dalam hukum penggunaan kekuatan bersenjata, dan akibatnya terhadap penduduk dan orang-orang yang dilindungi dalam Hukum Humaniter.

b. Pelaksanaan Perkuliahan.

Pelaksanaan ini dilakukan melalui pertemuan kuliah antara mahasiswa dan dosen. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dan sebagiannya dapat dilaksanakan secara daring. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik, jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran paling kurang 85% dari yang ditetapkan dalam RPS. Sedangkan jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran paling kurang 75% dari yang ditetapkan dalam RPS. Saat ini umumnya pelaksanaan perkuliahan sudah sesuai dengan aturan di atas. Hanya saja, dalam rangka internasionalisasi, maka sekurang-kurangnya satu mata kuliah pada satu departemen dilaksanakan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

c. Evaluasi Perkuliahan

Untuk menilai apakah pelaksanaan perkuliahan sudah berjalan baik untuk mewujudkan capaian pembelajaran, maka perlu adanya metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa, di mana capaian itu dapat terlihat melalui evaluasi. Hal itu meliputi evaluasi hasil perkuliahan mahasiswa dan evaluasi perkuliahan yang disajikan oleh dosen. Evaluasi hasil perkuliahan mahasiswa mencakup UTS, UAS dan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Komposisi nilai akhir dapat

berupa UAS 50%, UTS 30% atau dengan rentang yang hampir sama. Selain itu juga ada penilaian mengenai tugas akhir mahasiswa yang mencakup ujian seminar proposal, ujian seminar hasil dan ujian komprehensif.

Tugas akhir mahasiswa pada jenjang pendidikan sarjana di FH UNAND diwujudkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi dan tugas akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di samping itu, diselenggarakan evaluasi kemajuan studi pada akhir semester tertentu sesuai dengan rentang masa studi dari masing-masing strata pendidikan sebagai pelaksanaan ketentuan *Drop Out* (DO), serta predikat yudisium. Evaluasi perkuliahan yang disajikan dosen mencakup:

- Kesesuaian materi dengan RPS;
- Tata cara penyajian;
- Jumlah pertemuan tatap muka.

Evaluasi dilakukan dapat melalui pengecekan batas perkuliahan yang diberikan dan daftar kehadiran mahasiswa. Pengecekan batas perkuliahan ini dilakukan pada saat pengisian BKD dan penghitungan remunerasi. Selain itu juga dapat dilakukan melalui angket atau jejak pendapat yang disebarkan kepada mahasiswa untuk diisi.

1.2.1.2. Program Magister Ilmu Hukum

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini sudah dilakukan evaluasi kurikulum berbasis OBE sesuai dengan tuntutan yang ditentukan oleh Dikti bahwa kurikulum harus dievaluasi minimal sekali 4 tahun. Evaluasi kurikulum dilakukan pada tanggal 1 – 3 Oktober 2022 yang lalu dan menghasilkan struktur kurikulum dengan beberapa perubahan *nomenklatur* mata

kuliah dan penyesuaian substansi materi kuliah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan stakeholder. Lokakarya melibatkan *stakeholder*, alumni dan mahasiswa. *Stakeholder* terdiri dari berbagai instansi Pemerintahan (Kejaksaan, Kepolisian Pemerintah Daerah, Pengadilan, Dinas Kesehatan), pihak Swasta, Perbankan dan Pengacara.

Program Magister Ilmu Hukum mempunyai beberapa fokus Tesis sebagai kelompok konsentrasi/kajian yang dapat dipilih mahasiswa, fokus tesis yang ada saat ini adalah: 1. Fokus tesis Hukum Perdata dan Bisnis, 2. Fokus tesis Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, 3. Fokus Tesis Kenegaraan dan Pemerintahan, 4. Fokus Tesis Hukum Internasional dan 5. Fokus Tesis Hukum Kesehatan. Masing-masing fokus tesis tersebut mempunyai struktur mata kuliah tersendiri (dapat dilihat pada tabel 1.4)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa di Universitas Andalas sudah melakukan penerimaan mahasiswa melalui perkuliahan di kelas (*by Course*) dan jalur penelitian (*by Research*). Perkuliahan melalui jalur penelitian mempunyai kurikulum tersendiri pula. (dapat dilihat pada tabel 1.5).

Calon mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum saat ini berasal dari lulusan sarjana (S1) Hukum dan Non-Hukum. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari latar belakang non hukum diwajibkan mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan 6 mata kuliah yang diwajibkan. Daftar mata kuliah untuk matrikulasi sebagaimana terdapat pada daftar mata kuliah yang ditandai dengan 0 sks. (tabel 1.4)

Berdasarkan Peraturan Rektor tersebut, pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum harus menghasilkan lulusan yang memenuhi capaian pembelajaran yang mencakup:

- a. sikap;
- b. penguasaan pengetahuan;
- c. keterampilan umum; dan
- d. keterampilan khusus.

Capaian pembelajaran sikap meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, etika akademik; menginternalisasi semangat kejuangan dan kewirausahaan;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan meliputi:

- a. menguasai bidang ilmu hukum, teori Hukum dan filsafat hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia;
- b. menguasai bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan;
- c. memiliki kemampuan berpikir ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum dan terapan;
- d. memiliki Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter dan multidisipliner.

Capaian pembelajaran keterampilan umum meliputi:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tugas akhir, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Capaian pembelajaran keterampilan khusus meliputi:

-
- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;
 - b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif; dan
 - c. mampu menguasai ketrampilan mediasi dan negosiasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
 - d. kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem teknologi informasi yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
 - e. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisipliner atau multi disiplin, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif Indonesia.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, mahasiswa harus menyelesaikan beban studi 36 SKS sampai dengan 50 SKS untuk masa studi minimal empat semester dan maksimal delapan semester. SKS tersebut terbagi atas sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan atas:

- a. Mata kuliah wajib program studi, sejumlah 18 SKS;
- b. Mata kuliah wajib konsentrasi, sejumlah 14 SKS;
- c. Mata kuliah wajib pilihan konsentrasi, sejumlah 4 SKS.

Ada lima konsentrasi yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yakni:

- a. Konsentrasi Hukum Perdata
- b. Konsentrasi Hukum Pidana
- c. Konsentrasi Hukum Tata Negara/Administrasi Negara
- d. Konsentrasi Hukum International
- e. Konsentrasi Hukum Kesehatan

Ketiga kelompok mata kuliah di atas disajikan pada tiga semester pengajaran, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4.

Komposisi Mata Kuliah Per-Semester Kurikulum MIH

**KURIKULUM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

FOKUS TESIS HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

NO	KODE	W/P	MATA KULIAH	SKS
MATRIKULASI BAGI NON HUKUM				
1	HKF 101	W	Pengantar Ilmu Hukum	0
2	HKF 102	W	Pengantar Hukum Indonesia	0
3	HKP 101	W	Pengantar Hukum Perdata	0
4	HKN 101	W	Pengantar Hukum Pidana	0
5	HKT 101	W	Pengantar Hukum Tata Negara	0
6	HKA 101	W	Pengantar Hukum Administrasi Negara	0
7	HKI 101	W	Pengantar Hukum Internasional	0

Semester I (4 Mata Kuliah Wajib Program Studi 12 sks)				
1	HKU 8111	W	Teori Hukum	3
2	HKU 8112	W	Filsafat Hukum dan Logika	3
3	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
4	HKU 8114	W	Hukum dan Dinamika Sosial	3

Semester II (12 SKS)				
1	HKU 8211	W	Penemuan Hukum	3
2	HKU 8211	W	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	3
1	HKN 8011	W	Pembaharuan Hukum Pidana	2
2	HKN 8012	W	Hukum Pidana Korupsi	2
3	HKN 8013	W	Aspek-Aspek Hukum Pidana Bidang Ekonomi	2

Semester III (4W+2P= 12 SKS)				
1	HKN 8111	W	Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana	2
2	HKN 8112	W	Sistem Peradilan Pidana	2
3	HKN 8113	W	Kapita Selekta Hukum Pidana	2
4	HKN 8114	W	Dinamika Hukum Pidana dan HAM	2
5	HKN 8122	P	Perbandingan Hukum Pidana	2
6	HKN 8123	P	Hukum Pidana Adat dan Islam	2
7	HKN 8123	P	Politik Hukum Pidana	2

Semester IV (12 SKS)				
1	PPS 8011	W	Usulan Penelitian	1
2	PPS 8012	W	Seminar Hasil Penelitian	2
3	PPS 8013	W	Publikasi Jurnal	2
4	PPS 8014	W	Tesis	6

FOKUS TESIS HUKUM PERDATA DAN BISNIS

NO	KODE	W/P	MATA KULIAH	SKS
MATRIKULASI BAGI NON HUKUM				
1	HKF 101	W	Pengantar Ilmu Hukum	0
2	HKF 102	W	Pengantar Hukum Indonesia	0
3	HKP 101	W	Pengantar Hukum Perdata	0
4	HKN 101	W	Pengantar Hukum Pidana	0
5	HKT 101	W	Pengantar Hukum Tata Negara	0
6	HKA 101	W	Pengantar Hukum Administrasi Negara	0
7	HKI 101	W	Pengantar Hukum Internasional	0

Semester I (4 Mata Kuliah Wajib Program Studi 12 sks)				
1	HKU 8111	W	Teori Hukum	3
2	HKU 8112	W	Filsafat Hukum dan Logika	3
3	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
4	HKU 8114	W	Hukum dan Dinamika Sosial	3

Semester II (12 SKS)				
1	HKU 8211	W	Penemuan Hukum	3
2	HKU 8211	W	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	3
1	HKP 8011	W	Sistem Perkembangan Hukum Perdata	2
2	HKP 8012	W	Penyelesaian Sengketa Perdata dan Bisnis	2
3	HKP 8013	W	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2

Semester III (4W+2P= 12 SKS)				
1	HKT 8111	W	Hukum Perbankan dan Pembiayaan	2
2	HKT 8112	W	Perkembangan Peradilan dan Perdata	2
3	HKT 8113	W	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2
4	HKT 8114	W	Hukum Transaksi Elektronik	2
1	HKP8121	P	Perkembangan Hukum Keluarga dan Waris	2
2	HKP 8122	P	Perkembangan Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah	2
3	HKP 8123	P	Dinamika Hukum Adat	2

Semester IV (12 SKS)				
1	PPS 8011	W	Usulan Penelitian	1

2	PPS 8012	W	Seminar Hasil Penelitian	2
4	PPS 8013	W	Publikasi Jurnal	2
5	PPS 8014	W	Tesis	6

FOKUS TESIS HUKUM KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	W/P	MATA KULIAH	SKS
MATRIKULASI BAGI NON HUKUM				
1	HKF 101	W	Pengantar Ilmu Hukum	0
2	HKF 102	W	Pengantar Hukum Indonesia	0
3	HKP 101	W	Pengantar Hukum Perdata	0
4	HKP 101	W	Pengantar Hukum Pidana	0
5	HKT 101	W	Pengantar Hukum Tata Negara	0
6	HKA 101	W	Pengantar Hukum Administrasi Negara	0
7	HKI 101	W	Pengantar Hukum Internasional	0

Semester I (4 Mata Kuliah Wajib Program Studi 12 sks)				
1	HKU 8111	W	Teori Hukum	3
2	HKU 8112	W	Filsafat Hukum dan Logika	3
3	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
4	HKU 8114	W	Hukum dan Dinamika Sosial	3

Semester II (12 SKS)				
1	HKU 8211	W	Penemuan Hukum	3
2	HKU 8211	W	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	3
1	HKT 8011	W	Teori dan Perancangan Perundang-Undangan	2
2	HKT 8012	W	Teori dan Hukum Konstitusi	2
3	HKA 8013	W	Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	2

Semester III (4W+2P= 12 SKS)				
1	HKA 8111	W	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	2
2	HKA 8112	W	Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2
3	HKA 8113	W	Hukum Pengelolaan Aset Publik	2
4	HKT 8114	W	Negara Hukum dan Demokrasi	2
1	HKA 8121	P	Hukum Administrasi Pemerintahan Nagari	2
2	HKT 8122	P	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
3	HKA 8123	P	Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Kerja	2
4	HKA 8124	P	Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara	2
5	HKA 8125	P	Hukum Keuangan dan Kebijakan Fiskal	2
6	HKT 8126	P	Hukum Pemilihan Umum	2

Semester IV (12 SKS)				
-----------------------------	--	--	--	--

1	PPS 8011	W	Usulan Penelitian	1
2	PPS 8012	W	Seminar Hasil Penelitian	2
4	PPS 8013	W	Publikasi Jurnal	2
5	PPS 8014	W	Tesis	6

FOKUS TESIS HUKUM TRANSNASIONAL

NO	KODE	W/P	MATA KULIAH	SKS
MATRIKULASI BAGI NON HUKUM				
1	HKF 101	W	Pengantar Ilmu Hukum	0
2	HKF 102	W	Pengantar Hukum Indonesia	0
3	HKP 101	W	Pengantar Hukum Perdata	0
4	HKN 101	W	Pengantar Hukum Pidana	0
5	HKT 101	W	Pengantar Hukum Tata Negara	0
6	HKA 101	W	Pengantar Hukum Administrasi Negara	0
7	HKI 101	W	Pengantar Hukum Internasional	0

Semester I (4 Mata Kuliah Wajib Program Studi 12 sks)				
1	HKU 8111	W	Teori Hukum	3
2	HKU 8112	W	Filsafat Hukum dan Logika	3
3	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
4	HKU 8114	W	Hukum dan Dinamika Sosial	3

Semester II (12 SKS)				
1	HKU 8211	W	Penemuan Hukum	3
2	HKU 8211	W	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	3
1	HKI 8011	W	Hukum Publik Internasional	2
2	HKI 8012	W	Hukum Liberalisasi Ekonomi	2
3	HKI 8013	W	Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual	2

Semester III (4W+2P= 12 SKS)				
1	HKI 8111	W	Hukum Perjanjian Internasional	2
2	HKI 8112	W	Politik Internasional	2
3	HKI 8113	W	Hukum Konservasi Alam Internasional	2
4	HKI 8114	W	Sistem Penyelesaian Sengketa Internasional	2
1	HKI 8121	P	Hukum Bisnis Internasional	2
2	HKI 8122	P	Hukum Perusahaan Transnasional	2
3	HKI 8123	P	Hukum Pencucian Uang dan Pengembalian Aset	2
4	HKI 8124	P	Hukum Terorisme	2
5	HKI 8125	P	Hukum Kejahatan Transnasional	2
6	HKI 8126	P	Praktik dan Kasus Hukum Internasional	2

Semester IV (12 SKS)				
1	PPS 8011	W	Usulan Penelitian	1
2	PPS 8012	W	Seminar Hasil Penelitian	2
4	PPS 8013	W	Publikasi Jurnal	2
5	PPS 8014	W	Tesis	6

FOKUS TESIS HUKUM KESEHATAN

NO	KODE	W/P	MATA KULIAH	SKS
MATRIKULASI BAGI NON HUKUM				
1	HKF 101	W	Pengantar Ilmu Hukum	0
2	HKF 102	W	Pengantar Hukum Indonesia	0
3	HKP 101	W	Pengantar Hukum Perdata	0
4	HKP 101	W	Pengantar Hukum Pidana	0
5	HKT 101	W	Pengantar Hukum Tata Negara	0
6	HKA 101	W	Pengantar Hukum Administrasi Negara	0
7	HKI 101	W	Pengantar Hukum Internasional	0

Semester I (4 Mata Kuliah Wajib Program Studi 12 sks)				
1	HKU 8111	W	Teori Hukum	3
2	HKU 8112	W	Filsafat Hukum dan Logika	3
3	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
4	HKU 8114	W	Hukum dan Dinamika Sosial	3

Semester II (12 SKS)				
1	HKU 8211	W	Penemuan Hukum	3
2	HKU 8211	W	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	3
1	HKK 8011	W	Prinsip dan Etika Hukum Kesehatan	2
2	HKK 8012	W	Hukum Pidana Kesehatan	2
3	HKK 8013	W	Hukum Perdata dan Administrasi Kesehatan	2

Semester III (4W+2P= 12 SKS)				
1	HKK 8111	W	Hukum Obat dan Makanan	2
2	HKK 8112	W	Bioetik dan HAM	2
3	HKK 8113	W	Hukum Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2
4	HKK 8114	W	Hukum Penyelesaian Sengketa Kesehatan	2
1	HKK 8121	P	Hukum dan Kebijakan Kesehatan Internasional	2
2	HKK 8122	P	Hukum Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan	2
3	HKK 8123	P	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan	2
4	HKK8124	P	Kapita Selekta Hukum Kesehatan	2

5	HKK 8125	P	Aspek Hukum Digitalisasi Pelayanan Kesehatan	2
---	----------	---	--	---

Semester IV (12 SKS)				
1	PPS 8011	W	Usulan Penelitian	1
2	PPS 8012	W	Seminar Hasil Penelitian	2
4	PPS 8013	W	Publikasi Jurnal	2
5	PPS 8014	W	Tesis	6

KURIKULUM BY RESEARCH

NO	KODE		MATA KULIAH	SKS
Semester I dan II Mata kuliah wajib inti keilmuan (mata kuliah penciri)				
1	HKU 8113	W	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis	3
2	HKU 8012	W	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	4
3	PPS 8013	W	Publikasi artikel review	2
4	PPS 8011	W	Seminar proposal	2
Semester III dan IV				
1	PPS 8012	W	Seminar Hasil	3
2			Penelitian dan Penulisan Tesis*	
	PPS 8016	W	1. Laporan Penelitian 1	3
	PPS 8017	W	2. Laporan Penelitian 2	3
	PPS 8018	W	3. Tesis	6
3	PPS 8019	W	Pemakalah seminar nasional/internasional**	2
4	PPS 8020	W	Publikasi artikel ilmiah jurnal nasional terakreditasi Sinta 4	3
5	PPS 8021	W	Publikasi artikel ilmiah jurnal internasional terindeks	3
6	PPS 8022	W	Ujian akhir Tesis (Ujian Komprehensif)	2
Total				36

* Dapat dipecah menjadi Laporan Penelitian dan Tesis

Untuk memenuhi capaian pembelajaran di atas, perlu adanya proses belajar mengajar yang baik yang meliputi:

- Penyiapan RPS untuk setiap mata kuliah

Saat ini proses belajar mengajar lebih diarahkan pada penguasaan ilmu hukum secara teoritis dan *legal skill*, berdasarkan masing-masing strata pendidikan dengan sistem

SKS sebagai satuan pengukur beban studi mahasiswa dan beban tugas bagi dosen. Oleh karena itu terhadap dosen dituntut melakukan persiapan yang cukup untuk proses transfer ilmu dan keterampilan. Persiapan yang cukup itu diwujudkan melalui penyusunan RPS yang menghendaki penguasaan materi pengajaran yang dibutuhkan *stake holder* dan pemberian materi sesuai dengan RPS tersebut.

Selain itu, dalam rangka pengembangan dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada mata kuliah yang terkait dengan penggunaan teknologi digital, misalnya hukum mengenai *digital health services* pada konsentrasi hukum kesehatan, penggunaan teknologi digital dalam hukum kejahatan trans-nasional. Setidaknya terdapat pembahasan dalam RPS tentang norma hukum yang berhubungan dengan penggunaan teknologi.

b. Pelaksanaan Perkuliahan

Satu tahun akademik pada dasarnya terbagi atas semester ganjil dan semester genap. Setiap semester terdiri dari 16 minggu perkuliahan tatap muka efektif dan ditambah dengan dua kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, *Problem Based Learning* (PBL), serta dialog interaktif tentang materi kuliah sesuai dengan SAP dalam jumlah durasi waktu yang sesuai dengan jumlah SKS masing-masing mata kuliah.

Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan terlibat aktif dalam PBM, terutama dalam memberikan argumentasi saat menganalisis sebuah persoalan hukum.

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran paling kurang 85% dari yang ditetapkan dalam RPS. Sedangkan jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran paling kurang 75% dari yang ditetapkan dalam RPS. Saat ini umumnya pelaksanaan perkuliahan sudah sesuai dengan aturan di atas.

Berkaitan dengan durasi perkuliahan tatap muka pada Program Magister Ilmu Hukum ditetapkan bahwa lamanya 1 SKS adalah 50 menit, sehingga untuk satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS adalah 100 menit. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan, di mana untuk satu kali tatap muka ditetapkan untuk dua kali pertemuan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk satu kali perkuliahan adalah 200 menit.

Untuk mengukur keberhasilan dan capaian pembelajaran, diperlukan adanya evaluasi yang meliputi evaluasi kegiatan perkuliahan, penelitian dan tugas akademik lainnya. Evaluasi kegiatan perkuliahan dilakukan melalui kuis, tugas, UTS dan UAS. Evaluasi terakhir yang diberikan pada setiap mahasiswa adalah berupa kewajiban menulis tesis sebagai persyaratan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studinya. Adapun proses penulisan tesis terbagi atas lima tahapan yang meliputi:

a. Pengajuan rencana judul tesis

Rencana judul tesis diajukan kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, kemudian Ketua Program Studi menetapkan apakah judul tersebut diterima atau ditolak dengan memperhatikan isu hukum yang terkandung di dalamnya. Bagi judul yang dianggap layak, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum akan menindaklanjutinya dengan mengajukan nama Komisi Pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II kepada Dekan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan (SK).

b. Seminar proposal

Setelah penetapan judul tesis dan penerbitan SK Komisi Pembimbing, mahasiswa dapat melanjutkan pada penulisan proposal di bawah bimbingan Komisi Pembimbing secara berjenjang yang dimulai dari Pembimbing II untuk kemudian dilanjutkan kepada Pembimbing I. Apabila menurut Komisi Pembimbing proposal tersebut sudah dianggap layak, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk melaksanakan seminar proposal. Atas dasar permohonan tersebut, ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum menunjuk Tim Penguji tiga orang dosen melalui SK Dekan.

c. Penelitian tesis

Penelitian tesis dapat dilakukan setelah proposal yang telah diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran pada saat seminar proposal disahkan oleh Komisi Pembimbing. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum selanjutnya akan menerbitkan surat pengantar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

d. Seminar hasil

Sebagaimana seminar proposal, seminar hasil tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan penelitiannya dan melalui proses konsultasi dengan Komisi Pembimbing. Seminar hasil merupakan upaya untuk memberikan masukan dan saran atas draf tesis yang ditulis, dan kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penguji yang sama pada saat seminar proposal.

e. Ujian tesis

Naskah tesis yang telah diseminarkan, kemudian diperbaiki sesuai saran dan masukan Tim Penguji dan setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat dilanjutkan dengan ujian tesis sebagai tahapan akhir dari penulisan tesis. Ujian tesis merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah bagi mahasiswa, baik secara substansial maupun metodologis. Selain itu, ujian tesis juga sekaligus mengukur kompetensi mahasiswa berkaitan dengan konsep keilmuan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.2.1.3. Program Magister Kenotariatan

Kurikulum Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana saat ini dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum. Kurikulum tersebut disusun sebagai implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 di atas, Pendidikan MKn harus menghasilkan lulusan yang memenuhi capaian pembelajaran yang mencakup:

- a. sikap;
- b. penguasaan pengetahuan;
- c. keterampilan umum; dan
- d. keterampilan khusus.

Capaian pembelajaran sikap meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- h. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- j. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- k. Menghormati, menghargai serta menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan meliputi:

- c. menguasai bidang Ilmu hukum, teori Hukum dan filsafat hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia;

-
- d. menguasai bidang hukum tertentu yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, merupakan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan;
 - e. memiliki kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter dan multidisipliner;
 - f. memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam menunjang bidang hukum terapan.

Capaian pembelajaran ketarampilan umum meliputi:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tugas akhir, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

-
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Capaian pembelajaran keterampilan khusus meliputi:

- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;
- b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan;
- c. kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem teknologi informasi yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
- d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif Indonesia;
- e. menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar

Untuk mewujudkan capaian yang demikian, mahasiswa harus menyelesaikan beban studi yang terbagi atas:

- a. Mahasiswa Reguler dengan beban studi 46 SKS dalam empat semester;
- b. Mahasiswa Penyetaraan dengan beban studi 16 SKS dalam dua semester.

Jumlah SKS yang menjadi beban studi terbagi dalam sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan atas:

- a. Kelompok Kemagisteran, yang terdiri dari: 5 mata kuliah
- b. Kelompok Inti, yang terdiri dari: 14 mata kuliah
- c. Kelompok Pilihan, yang terdiri dari: 5 mata kuliah

Selain pembagian di atas, mata kuliah juga dibagi atas:

- a. Mata kuliah wajib yang terbagi pula atas;
 1. Mata kuliah wajib bagi mahasiswa reguler yang terdiri dari mata kuliah kelompok kemagisteran dan kelompok inti;
 2. Mata kuliah wajib bagi mahasiswa penyataran yang terdiri dari mata kuliah kelompok kemagisteran.
- b. mata kuliah pilihan yang mencakup mata kuliah dalam kelompok pilihan.

Baik mata kuliah wajib maupun pilihan disebar dalam 4 semester pengajaran seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.5.
Komposisi Mata Kuliah Per-Semester

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah ⁽¹⁾	Bobot SKS	SKS MK dalam Kurikulum		Kelengkapan ⁽³⁾			Unit/ Jur/ Fak/ Penyele n ggara
				Inti (2)	Insti-tusional	Deskripsi	Silabus	SAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Semester I									
1.	MKN-511	Teori Hukum	2	V	-	V	V	V	Program
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2	V	-	V	V	V	Program
3.	MKN-513	Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT	2	V	-	V	V	V	Program
4.	MKN-514	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2	V	-	V	V	V	Program
5.	MKN-515	Hukum Prikatan	2	V	-	V	V	V	Program

6.	MKN-516	Hukum Perusahaan	2	V	-	V	V	V	Program
7.	MKN-517	Hukum Agraria	2	V	-	V	V	V	Program
8.	MKN-518	Hukum Jaminan	2	V	-	V	V	V	Program
Jumlah			16						

Semester II

1.	MKN-521	Metode Penelitian Hukum	2	V	-	V	V	V	Program
2.	MKN-522	Penemuan Hukum	2	V	-	V	V	V	Program
3.	MKN-523	Hukum Waris KUH Perdata	2	V	-	V	V	V	Program
4.	MKN-524	Pengurusan Hak Atas Tanah	2	V	-	V	V	V	Program
5.	MKN-525	Hukum Perbankan	2	V	-	V	V	V	Program
6.	MKN-526	Peraturan Lelang	2	V	-	V	V	V	Program
7.	MKN-527	Hukum Investasi*	2	V	-	V	V	V	Program
8.	MKN-528	Hukum Waris Islam dan Adat*	2	V	-	V	V	V	Program
9.	MKN-529	Hukum Tanah Adat*	2	V	-	V	V	V	Program
10.	MKN-530	Kontrak Bisnis Internasional*	2	V	-	V	V	V	Program
11.	MKN-531	Hukum Pajak*	2	V	-	V	V	V	Program
Jumlah			16						

Semester III

1.	MKN-611	Teknik Pembuatan Akta (TPA) I: Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan **)	2	V	-	V	V	V	Program
2.	MKN-612	Teknik Pembuatan Akta (TPA) II: Akta Berbagai Macam Perjanjian **)	2	V	-	V	V	V	Program
3.	MKN-613	Teknik Pembuatan Akta (TPA) III: Akta Badan-Badan Usaha**)	2	V	-	V	V	V	Program
4.	MKN-614	Akta Tanah **)	2	V	-	V	V	V	Program
Jumlah			8						

Semester IV

1.	MKN-621	Tesis	6	V	-	V	V	V	Program
Total SKS			46						

Tabel 1.6.

Mata Kuliah Pilihan Program Magister Kenotariatan

Semester	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	Bobot SKS	Unit/Jur/Fak Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	MKN 527	Hukum Investasi	2	Program
2	MKN-529	Hukum Tanah Adat	2	Program
2	MKN-528	Hukum Waris Islam dan Adat	2	Program
2	MKN-530	Hukum Bisnis Internasional	2	Program
2	MKN-531	Hukum Pajak	2	Program
	Jumlah		10	

Untuk memenuhi capaian pembelajaran di atas, perlu adanya proses belajar mengajar yang baik yang meliputi:

a. Penyiapan RPS untuk setiap mata kuliah

Saat ini proses belajar mengajar lebih diarahkan pada penguasaan ilmu hukum secara teoritis dan *legal skill* berdasarkan masing-masing strata pendidikan dengan sistem SKS sebagai satuan pengukur beban studi mahasiswa dan beban tugas bagi dosen. Oleh karena itu terhadap dosen dituntut melakukan persiapan yang cukup untuk proses transfer ilmu dan keterampilan. Persiapan itu yang cukup itu diwujudkan melalui penyusunan RPS yang menghendaki penguasaan materi pengajaran yang dibutuhkan *stake holder* dan pemberian materi sesuai dengan RPS tersebut.

Selain itu dalam kerangka pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mesti ada mata kuliah yang terkait dengan hukum yang melibatkan penggunaan teknologi masa kini seperti teknologi digital, misalnya *cyber notary*, atau paling tidak dalam mata kuliah yang terkait dengan teknologi ini ada bahasan dalam RPS tentang norma hukum yang berhubungan dengan penggunaan teknologi ini.

b. Pelaksanaan Perkuliahan

Satu tahun akademik terbagi atas semester ganjil dan semester genap. Setiap semester terdiri dari 16 minggu kuliah tatap muka efektif dan ditambah dengan 2 (dua) kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, *Problem Based Learning* (PBL), serta dialog interaktif tentang materi kuliah sesuai dengan SAP dalam jumlah durasi waktu yang sesuai dengan jumlah SKS masing-masing mata kuliah.

Dalam pelaksanaan perkuliahan ini mahasiswa diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar (PBM) mereka, terutama dalam memberikan argumentasi saat menganalisis sebuah persoalan hukum.

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran paling kurang 85% dari yang ditetapkan dalam RPS. Sedangkan jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran paling kurang 75% dari yang ditetapkan dalam RPS.

Berkaitan dengan alokasi waktu dalam perkuliahan tatap muka, pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, ditetapkan bahwa lamanya 1 SKS adalah 50 menit, sehingga untuk satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS adalah 100 menit. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan, di mana untuk satu kali tatap muka ditetapkan untuk dua kali pertemuan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk satu kali perkuliahan adalah 200 menit. Untuk kelas A (reguler) perkuliahan diselenggarakan pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 09.00–12.20 WIB. Sedangkan untuk kelas B (mandiri) perkuliahan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu yang dibagi atas dua sesi, yaitu sesi pagi mulai dari pukul 09.00-12.20 WIB dan sesi siang pada pukul 14.00-17.20 WIB.

Setelah perkuliahan selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka proses pembelajaran diteruskan dengan evaluasi perkuliahan untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran sudah terpenuhi atau belum. Evaluasi perkuliahan dilakukan terhadap mahasiswa dan dosen. Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan melalui pemberian tugas, UTS dan UAS. UTS dan UAS dapat dilakukan melalui ujian tertulis,

maupun pembuatan makalah secara mandiri dan/atau kelompok untuk kemudian dipresentasikan dan diuji di dalam kelas atau di Laboratorium Akta.

Mengingat Program magister Kenotariatan merupakan pendidikan semi profesional, maka setiap mahasiswa diwajibkan menulis tesis sebagai persyaratan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studinya. Rencana tesis telah bisa diajukan oleh mahasiswa pada semester tiga dengan syarat lulus mata kuliah metode penelitian. Sedangkan tahapannya penulisan tesis ini sendiri dibagi melalui lima, yakni:

a) Pengajuan rencana judul tesis

Rencana judul tesis diajukan kepada ketua Program Studi Magister Kenotariatan, kemudian ketua Program Studi Magister Kenotariatan menetapkan apakah judul tersebut diterima atau ditolak dengan memperhatikan isu hukum yang terkandung di dalamnya. Bagi judul yang dianggap layak, maka ketua Program Studi Magister Kenotariatan akan mengajukan nama Komisi Pembimbing kepada dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK).

b) Seminar proposal

Dengan ditetapkannya judul dan Komisi Pembimbing, maka mahasiswa akan menulis proposal di bawah bimbingan Komsis Pembimbing secara berjenjang dimulai dari Pembimbing II yang dilanjutkan kepada Pembimbing I. Apabila menurut Komisi Pembimbing proposal sudah dianggap layak maka diajukanlah permohonan kepada ketua Program Studi Magister Kenotariatan untuk pelaksanaan seminar proposal. Atas dasar permohonan tersebut, ketua Program Studi Magister Kenotariatan menunjuk Tim Penguji yang terdiri dari dua orang dosen yang ditetapkan melalui SK Dekan.

c) Penelitian tesis

Penelitian tesis baru bisa dilakukan setelah proposal melalui tahap perbaikan sesuai dengan masukan dan saran pada saat seminar proposal disahkan oleh Komisi Pembimbing. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan akan membuat surat pengantar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

d) Seminar hasil

Seminar Hasil tesis dapat dilaksanakan, apabila mahasiswa telah menyelesaikan penelitiannya dan melalui proses konsultasi atau bimbingan dengan Komisi Pembimbing. Seminar hasil merupakan upaya untuk memberikan masukan dan saran atas draf tesis yang ditulis, dan kegiatan ini dihadiri oleh tim penguji yang sama pada saat seminar proposal.

e) Ujian tesis

Naskah tesis yang telah diseminarkan, kemudian diperbaiki sesuai saran dan masukan Tim Penguji dan setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, dapat dilanjutkan dengan ujian tesis sebagai tahapan akhir dari penulisan tesis. Ujian tesis ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah bagi seorang mahasiswa, baik secara substansial maupun metodologis. Selain itu, ujian tesis juga sekaligus mengukur kompetensi mahasiswa berkaitan dengan konsep keilmuan yang berkaitan dengan obyek yang ditulis.

1.2.1.4. Program Doktor Ilmu Hukum

Kurikulum yang ditawarkan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDIH) Fakultas Hukum Universitas Andalas senantiasa berupaya ke arah pencapaian visi dan misi yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional. Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan, PSDIH merujuk pada dua peraturan penting yaitu: a) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan b) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik yang terakhir sudah diganti dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kurikulum tahun 2018 disusun berdasarkan basis kompetensi (*competency-based*). Pencapaian visi diupayakan untuk menjadikan PSDIH sebagai Program Studi Doktor terbaik di Indonesia dan mampu bersaing di tingkat ASEAN. Dalam rangka meraih capaian ini, mahasiswa diwajibkan mencapai skor

TOEFL minimal 550 sebelum mengikuti ujian akhir, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Pendidikan PSDIH bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran dari segi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mahasiswa. Dari segi sikap diharapkan capaian pembelajaran di antaranya, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pelaksanaan profesi. Dari segi penguasaan pengetahuan diharapkan capaian pembelajaran di antaranya adalah menguasai penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir filosofis, sosiologis, yuridis dan logis yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan hal baru dan orisinal di bidang ilmu hukum. Dari segi keterampilan umum capaian pembelajaran yang ditargetkan antara lain kemampuan untuk menyusun argumen dan solusi keilmuan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etika akademik, serta mampu mengkomunikasikannya langsung kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran keterampilan umum yang di antaranya adalah mampu merumuskan ide secara logis, sistematis dan inovatif, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

PSDIH diselenggarakan dalam dua bentuk program, yaitu Program doktor *in class* dan program doktor *by-research*. Pendidikan ini dirancang untuk kurun waktu enam semester dengan waktu studi maksimal sepuluh semester. Bagi mahasiswa doktor melalui jalur *in class*, kurikulum yang dirancang berjumlah 42 SKS. Kurikulum memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan memahami materi hukum lebih cepat dengan memunculkan kegiatan perkuliahan *in class* pada semester 1 dan semester 2. Kurikulum tahun 2018 dirancang bukan sekadar mengharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan akademik, tetapi sekaligus mempunyai *legal skill* yang memadai untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum dengan baik.

PSDIH diselenggarakan dalam 2 bentuk program yakni:

- a. PSDIH terstruktur, yakni program yang diselenggarakan dengan mengikuti perkuliahan (*By Class*) dengan kewajiban menyelesaikan sejumlah mata kuliah;
- b. PSDIH *By research*, yakni program yang diselenggarakan secara tidak terstruktur.

Untuk mewujudkan capaian pembelajaran bagi peserta PDIH terstruktur tersebut, Sejumlah mata kuliah harus diselesaikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. 7.

Struktur Kurikulum dan Tahapan Perkuliahan PSDIH

Semester I

No	Mata Kuliah	Bobot
1.	Filsafat Ilmu	3 sks
2.	Perkembangan Teori dan Filsafat Hukum	3 sks
3.	Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi	4 sks
	Sub total	10 sks

Semester II

No	Mata Kuliah	Bobot
1.	Perbandingan Sistem Hukum	2 sks
2.	Politik Pembangunan Hukum	3 sks
3.	Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Islam	3 sks
	Sub total	8 sks

Semester III dan IV

No	Mata Kuliah	Bobot
1.	Kualifikasi	1 sks
2.	Proposal dan Seminar Proposal	1 sks
3.	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) 1	2 sks
4.	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) 2	2 sks
5.	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) 3	2 sks
	Sub total	8 sks

Semester VI- X

No	Mata Kuliah	Bobot
----	-------------	-------

1	Disertasi:	1 sks
2	Seminar Hasil Penelitian Disertasi	15 sks
	Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka	
	Sub total	16 sks
	Total	42 sks

Untuk memenuhi capaian pembelajaran di atas, perlu adanya proses belajar mengajar yang baik yang meliputi:

1. Penyiapan RPS untuk setiap mata kuliah

Agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik, sistematis dan terstruktur, perlu disusun RPS yang menghendaki penguasaan materi pengajaran yang:

- dibutuhkan *stake holder*;
- disesuaikan dengan perkembangan terkini dari ilmu hukum yang sangat terkait dengan perkembangan dibidang ilmu lainnya dan teknologi.

2. Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan melalui metode tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021, pertemuan dilakukan secara daring melalui media yang disediakan berupa *I-learn*. Seiring dengan meredanya pandemi pada tahun 2022, proses perkuliahan kembali diselenggarakan secara tatap muka.

Dalam pelaksanaan perkuliahan ini mahasiswa diharapkan terlibat aktif dalam PBM, terutama dalam memberikan argumentasi saat menganalisis sebuah persoalan hukum. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik, jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran sekurangnya 85% dari yang ditetapkan dalam RPS. Sedangkan jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran paling kurang 75% dari yang ditetapkan dalam RPS.

3. Evaluasi

Untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran telah terpenuhi, diperlukan adanya evaluasi yang meliputi evaluasi kegiatan perkuliahan, penelitian dan tugas akademik lainnya. Evaluasi kegiatan perkuliahan dilakukan melalui ujian yang berupa: kuis, tugas, UTS, UAS dan kualifikasi.

Evaluasi terakhir yang diberikan pada setiap mahasiswa adalah berupa kewajiban menulis disertasi sebagai persyaratan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studinya. Proses penyelesaian tugas akhir dimulai dari seminar proposal hingga lanjut ke seminar hasil penelitian, ujian tertutup dan ujian terbuka.

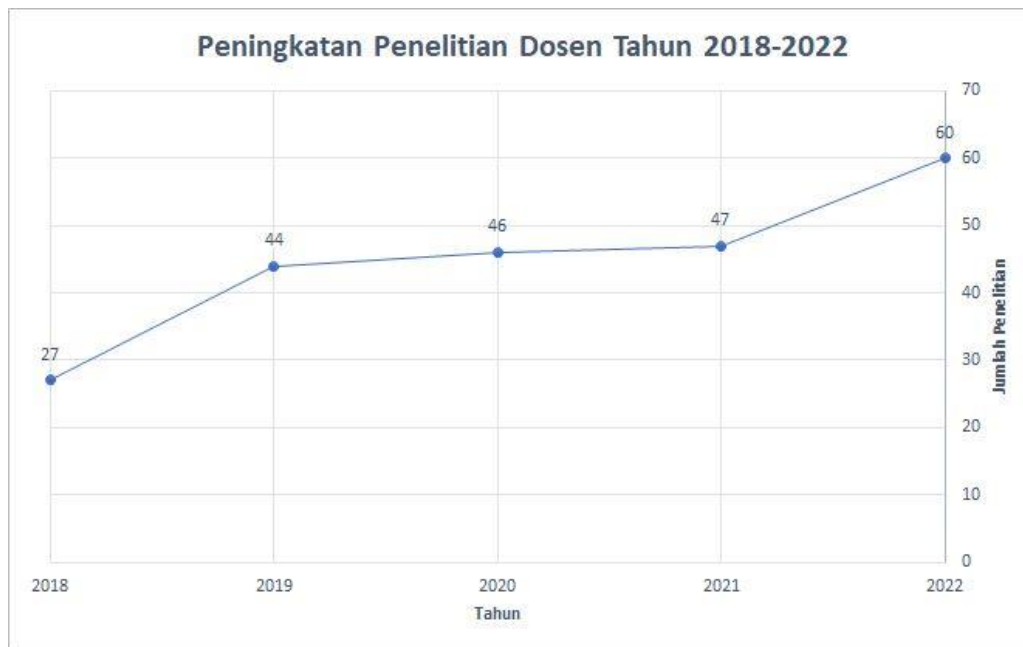
Untuk Pendidikan PSDIH melalui jalur *by research*, hal ini dilaksanakan bagi mahasiswa yang sudah memiliki kualifikasi mampu dan siap untuk melakukan penelitian disertasi secara mandiri. Hal ini dinilai dari kemampuan Bahasa Inggris yang baik dan publikasi ilmiah yang sudah pernah dihasilkan di tingkat internasional dan nasional. Sehingga untuk mahasiswa PSDIH jalur *by research*, tahapan perkuliahan yang dilalui adalah: a) Ujian Proposal Disertasi, b) MKPD 1, 2 dan 3, c) Seminar Hasil Penelitian Disertasi, 4) Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.

1.2.2. Bidang Penelitian

Kebijakan dan program penelitian FH UNAND mengacu pada Peta Jalan Penelitian Universitas Andalas tahun 2021-2024 di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Ada tiga tema utama dalam peta jalan penelitian dimaksud, yaitu: a) ketahanan pangan, obat dan kesehatan; b) inovasi sains, teknologi dan industri, dan c) pengembangan sumber daya manusia dan karakter bangsa. Penelitian hukum termasuk dalam sub tema dari tema ketiga. Adapun penelitian dosen FH UNAND dilakukan dalam sejumlah skema. Di antaranya Penelitian Pemenang Hibah Dosen Skim Riset Guru Besar (SRGB), Skim Riset Percepatan Guru Besar (SRPGB), Skim Riset Dosen (SRD).

Berdasarkan data 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penelitian dosen FH UNAND. Pada tahun 2018, terdapat 27 penelitian yang terdiri dari 26 penelitian hibah dengan dana Rp. 30.000.000,00 per penelitian dan 1 penelitian *cluster* dengan dana Rp. 20.000.000,00. Lonjakan terjadi pada tahun 2019 yang berjumlah 44 penelitian, terdiri dari 33 penelitian Program Studi dengan biaya Rp. 13.500.000,00 per penelitian dan 11 penelitian Pusat Studi yang masing-masing memperoleh biaya sebesar Rp. 25.000.000,00. Jumlah itu kembali meningkat pada tahun 2020 dengan 46 penelitian yang terdiri dari 45 penelitian hibah dosen di mana masing-masing memperoleh biaya sebesar Rp. 17.500.000,00, dan 1 penelitian AKB Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 200.000.000,00. Pada tahun 2021, terdapat 47 penelitian yang meliputi SRGB sebanyak 6 penelitian dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 55.000.000,00, SRPGB sebanyak 17 penelitian yang masing-masing mendapat biaya sebesar Rp. 35.000.000,00, dan SRD sebanyak 24 penelitian dengan masing-masing judul memperoleh biaya penelitian sebesar Rp. 20.000.000,00. Lonjakan kembali terjadi pada tahun 2022 yang berjumlah 60 penelitian, terdiri dari 2 penelitian Panel Kerjasama yang masing-masing memperoleh biaya sebesar Rp. 100.000.000,00, SRGB dengan 7 penelitian di mana masing-masingnya berbiaya Rp. 55.000.000,00, kemudian SRPGB sejumlah 21 penelitian dengan masing-masing dibiayai sebesar Rp. 35.000.000,00, dan SRD sebanyak 30 penelitian di mana masing-masingnya memperoleh Rp. 20.000.000,00 per penelitian.

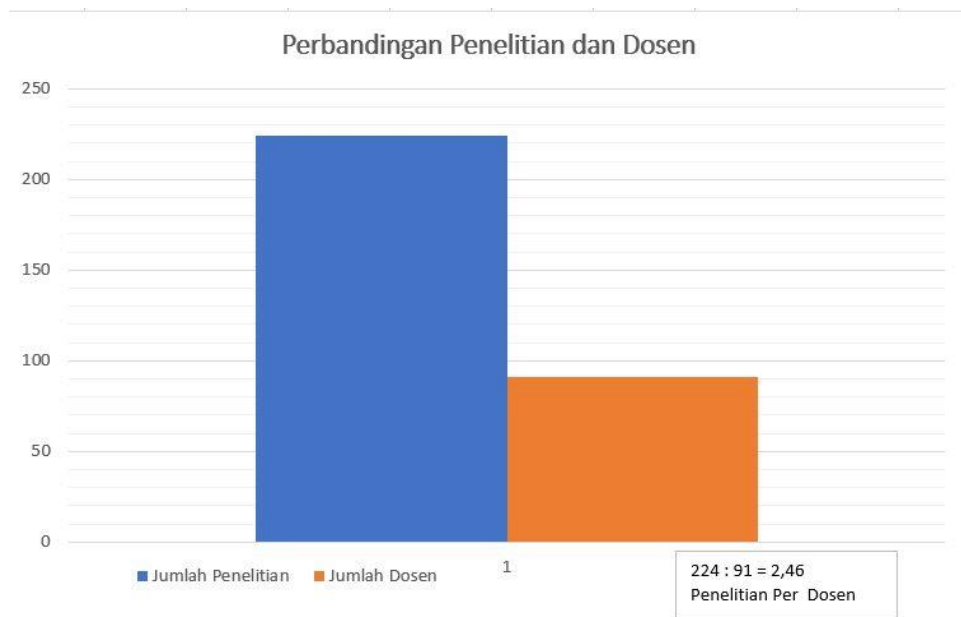
Grafik 1.1
Peningkatan Jumlah Penelitian Dosen Fakultas Hukum Dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022



Sehingga berdasarkan data 5 tahun terakhir, FH UNAND telah menyelenggarakan 224 penelitian. Bila jumlah ini dibagi dengan total dosen ($224:91$), maka setiap dosen telah terlibat dalam 2,46 penelitian.

Diagram 1.1

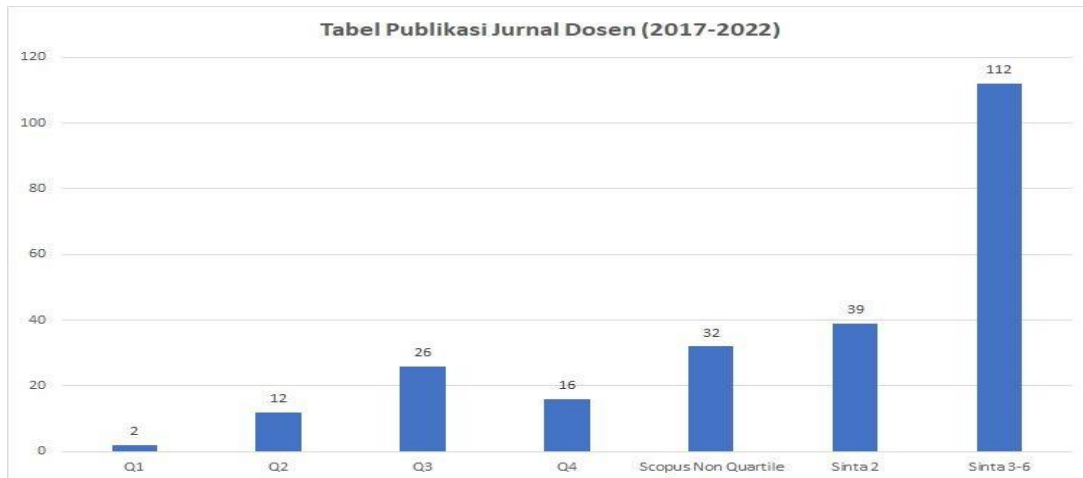
Perbandingan Jumlah Penelitian dengan Jumlah Dosen Fakultas Hukum



Seleksi dan kepastian pendanaan penelitian di FH UNAND umumnya dilakukan pada pertengahan tahun dengan tenggat waktu laporan hasil penelitian pada akhir November. Hasil penelitian tersebut ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi.

Adapun tingkat publikasi berupa jurnal ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks Scopus Q1, Scopus Q2, Scopus Q3, Scopus Q4, Scopus non Quartile, SINTA 2 dan SINTA 3-SINTA 6 dalam kurun 2017 hingga 2022 berjumlah 239 publikasi. Khusus publikasi pada jurnal terindeks scopus sebanyak 46 dalam rentang waktu 2017-2022.

Diagram 1.2.
Kinerja Publikasi Dosen Fakultas Hukum 2017-2022



Jumlah publikasi tersebut bila dibandingkan dengan jumlah dosen sebanyak 91 orang, maka rata-rata setiap dosen menghasilkan 2,63 publikasi jurnal dalam kurun 2017 sampai 2022. Sedangkan bila jumlah publikasi jurnal yang sebanyak 239 dibagi rentang tahun 2017 hingga 2022, maka rata-rata per tahun dosen Fakultas Hukum menghasilkan publikasi sebanyak 39,84 artikel.

Diagram 1.3.

Kinerja Publikasi Dosen Fakultas Hukum 2017-2022



Selanjutnya, kinerja penelitian juga terkait dengan keberadaan pusat studi yang ada. Sampai tahun 2022, Fakultas Hukum memiliki 11 pusat studi/kajian yang turut melakukan penelitian, di antaranya:

1. Pusat Kajian Masalah Hukum Internasional;
2. Pusat Studi Hukum Ekonomi;
3. Pusat Studi Hukum Otonomi Daerah;
4. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO);
5. Pusat Studi Perundang-Undangan;
6. Pusat Studi Agraria (PAGA);
7. Pusat Studi Sistem Peradilan Pidana;
8. Pusat Studi Hukum Kebijakan Energi (PSHKE);
9. Pusat Studi Samudera Hindia;
10. Pusat Studi Hukum Adat Minangkabau; dan
11. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Hingga saat ini pusat studi/kajian tersebut telah berkontribusi dalam melakukan kajian/studi dan melaksanakan sejumlah kerja sama dengan mitra FH UNAND. Dari aspek kontribusi penambahan pendapatan, belum semua pusat studi/kajian mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan FH UNAND. Dalam era PTNBH ini, secara ideal pusat studi/kajian yang berada di bawah naungan Fakultas mesti bisa memberikan tambahan pemasukan tambahan bagi FH UNAND dari kinerja penelitian dan pengabdian yang dilakukan.

Selain pusat studi, dalam rangka ketersediaan wadah yang mampu menampung sebagian artikel hasil penelitian atau tulisan dosen maupun mahasiswa, FH UNAND telah memiliki lima jurnal, yaitu:

1. Nagari Law Review;
2. Lareh Law Review;
3. Notary Law Journal;
4. Delicti;

5. Andalas Law Journal.

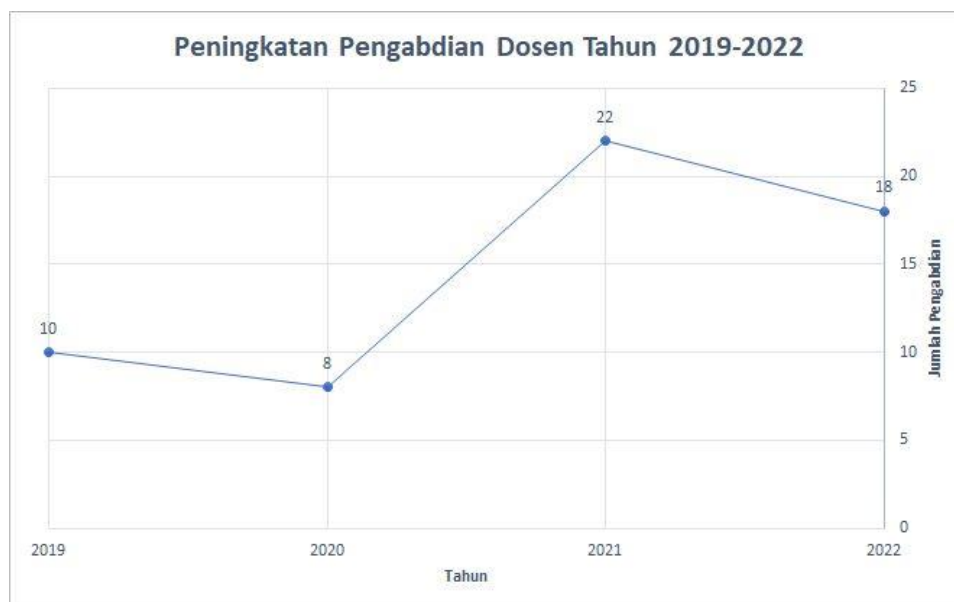
Dari lima jurnal di atas, Nagari Law Review telah meraih akreditasi Sinta 3 dari volume 1 nomor 1 Tahun 2017 sampai Volume 5 nomor 1 Tahun 2022. Karena hanya baru satu jurnal yang terakreditasi Sinta 3, tentu capaian ini masih jauh dari harapan, sehingga FH UNAND mesti bergerak ke arah pengembangan seluruh jurnal sehingga terakreditasi di tingkat nasional dan internasional. Nagari Law Review diharapkan dapat menjadi motivasi bagi jurnal-jurnal lainnya di FH UNAND untuk mendapatkan akreditasi minimal Sinta 2 dalam beberapa tahun ke depan.

1.2.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen FH UNAND dalam berbagai bentuk. Dalam kurun 4 tahun terakhir, jumlah pengabdian mengalami fluktuasi pada 2 tahun awal dikarenakan pandemi, namun jumlah pengabdian tersebut perlahan kembali mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya keadaan dan perubahan status pandemi menjadi endemi. Pada tahun 2019, dosen FH UNAND menyelenggarakan 10 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, jumlah itu mencakup 9 pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen pada Program Sarjana yang memperoleh biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 per judul pengabdian, dan 1 judul pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Program Pascasarjana yang memperoleh biaya sebesar Rp. 25.000.000,00. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 mengakibatkan penurunan jumlah pengabdian menjadi 8 judul pada tahun tersebut, di mana per judul pengabdian memperoleh biaya sebesar Rp. 15.000.000,00. Keadaan yang kian membaik di tahun 2021 juga mempengaruhi jumlah pengabdian yang meningkat tajam menjadi 22 judul dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 per judul. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 18 judul pengabdian yang masing-masingnya mendapat biaya sebesar Rp. 15.000.000,00.

Grafik 1.4.

Peningkatan Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022



Dalam pelaksanaannya, materi hukum kegiatan pengabdian ditentukan oleh masing-masing departemen di lingkungan FH UNAND. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya sinergi terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen di bagiannya masing-masing, termasuk dimaksudkan untuk aplikasi manfaat hukum bagi masyarakat.

Selain kegiatan pengabdian masyarakat melalui terstruktur berdasarkan rancangan kegiatan pengabdian pada masyarakat, juga telah berlangsung kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan bersifat *ad hoc* dari *user*, seperti tenaga ahli dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, tenaga ahli di biro Hukum dan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bahkan untuk kegiatan *ad hoc* tertentu di tingkat nasional, beberapa dosen telah diminta sebagai Panitia Seleksi Kelembagaan Negara. Pengabdian masyarakat juga terkait dengan pemenuhan BKD, karena itu FH UNAND idealnya juga menyiapkan dana untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat minimal 2 x setahun. Materi pengabdian sebaiknya merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan memberikan luaran yang jelas.

1.2.4. Sumber Daya Manusia

1.2.4.1. Profil Dosen

Per tahun 2022, FH UNAND memiliki 91 orang dosen tetap. Dari jumlah tersebut sebanyak 39 orang memiliki kualifikasi S3 dan sebanyak 52 orang berkualifikasi S2. Sementara dari segi jumlah total mahasiswa, S1 memiliki 2.495 orang. Dengan demikian perbandingan antara dosen S1 dan mahasiswa berada pada rasio 1: 32,36. Hal ini berarti belum mencapai rasio menurut standar nasional yang berada di angka 1:27,30.

Diagram 1.2

Perbandingan Antara Jumlah Dosen dan Mahasiswa Saat Ini

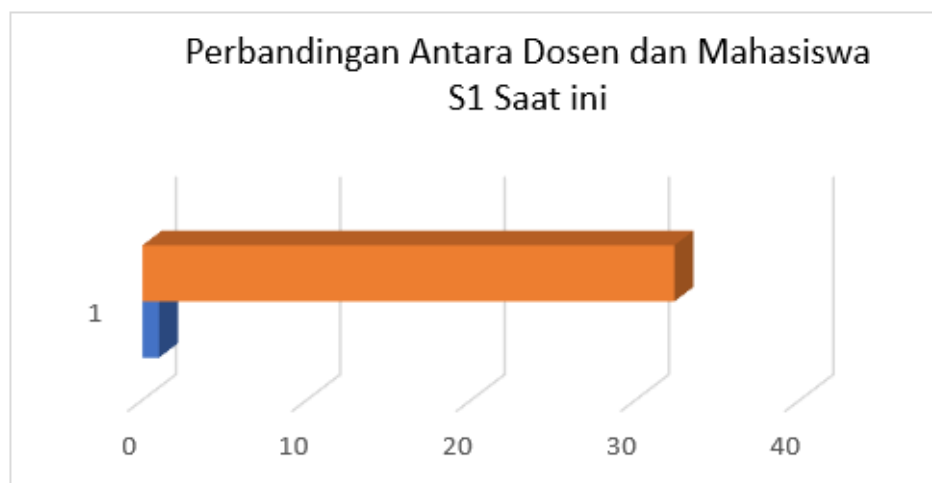


Diagram 1.3

Perbandingan Antara Jumlah Dosen dan Mahasiswa Seharusnya

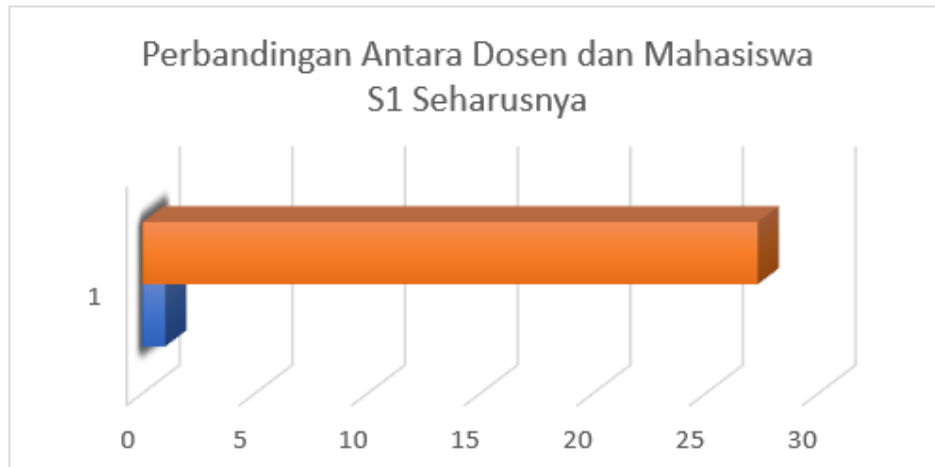


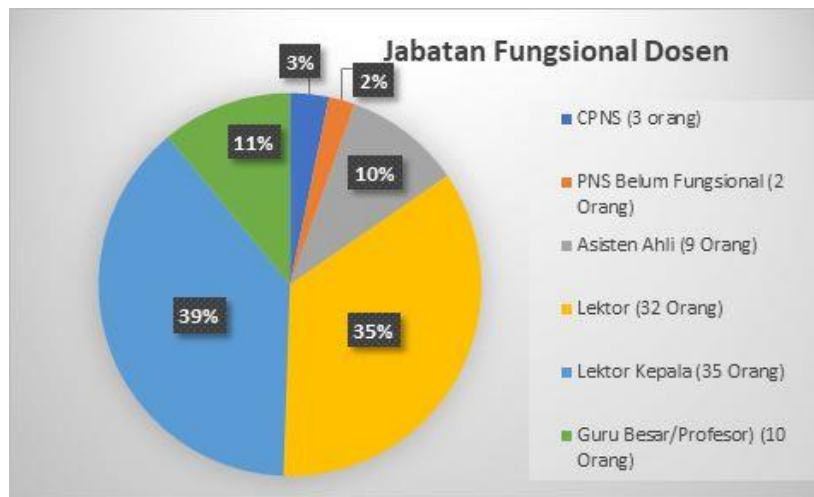
Diagram 1.4

Perbandingan Kualifikasi Pendidikan Dosen Fakultas Hukum



Mengenai komposisi kualifikasi akademik berdasarkan jabatan fungsional dosen, hingga 2022 FH UNAND memiliki dengan komposisi dosen tetap berstatus CPNS sebanyak 3 orang dan PNS belum fungsional sebanyak 2 orang (5,4%), Asisten Ahli 9 orang (9,8 %), Lektor 32 orang (35,16 %), Lektor Kepala 35 orang (38,46 %) dan 10 orang (10,98%) dengan gelar akademik Guru Besar (profesor).

Diagram 1.5
Persentase Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional



Menurut golongan dan kepangkatan, jumlah dosen FH UNAND Golongan III adalah sebanyak 46 orang dan Golongan IV adalah sebanyak 45 orang, artinya jumlah dosen dengan golongan III dan IV hampir berimbang dari keseluruhan dosen yang ada. Perbandingan dosen berdasarkan jenis kelamin, yakni sebanyak 47 orang dosen berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 45 orang dosen berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian dosen FH UNAND memiliki komposisi gender yang juga hampir berimbang.

Salah satu program pengembangan staf FH UNAND adalah memberikan kesempatan untuk studi lanjut, terutama mendorong dosen untuk memiliki kualifikasi S-3 sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta S-1 dan S-2 untuk tenaga kependidikan. Hal ini sesuai dengan Renstra Bisnis Universitas Andalas dengan target capaian 50%. Pada tahun 2021 dan 2022 FH UNAND telah mengirim 3 orang dosen mengikuti studi lanjut di Perguruan Tinggi dalam negeri untuk program S-3. Pada saat ini FH UNAND tidak ada dosen yang sedang menempuh studi lanjutan ke luar negeri, namun untuk membuka jaringan internasional yang lebih luas, dosen-dosen yang akan studi lanjut direkomendasi untuk menempuh studi lanjut di luar negeri.

Untuk itu perlu adanya pelatihan persiapan bagi mereka terutama dari segi penguasaan bahasa asing agar memenuhi syarat untuk memasuki perguruan tinggi di luar negeri yang dituju. Selain itu, para dosen FH UNAND yang akan melanjutkan studi S3 didorong untuk mendalami ilmu-ilmu hukum yang terkait dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkini atau bidang ilmu hukum lainnya yang belum ada ahlinya dalam kerangka pembukaan Program Studi S2 yang baru di FH UNAND. Untuk itu peta keahlian dosen-dosen yang sudah S3 untuk mengetahui pembedaan keahlian hukum yang belum dimiliki FH UNAND perlu dikelola.

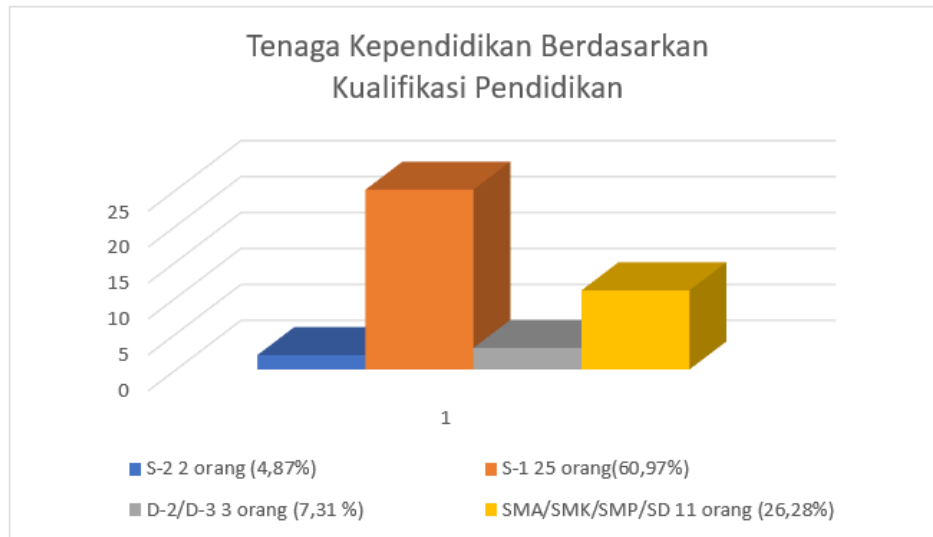
Selanjutnya, dosen FH UNAND didorong pula untuk mengikuti program tanpa gelar seperti PAR (*program of academic recharging*), *non-degree training*, pelatihan, *postdoc*, *sandwich program*, *visiting researcher* dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di dalam pengajaran dan penelitian sesuai perkembangan ilmu hukum mutakhir.

1.2.4.2. Profil Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan FH UNAND dari 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Total tenaga kependidikan di tahun 2021 adalah 41 orang, menurun dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 43 orang. Hal ini dikarenakan kebijakan formasi jumlah tenaga kependidikan di Universitas Andalas dan adanya tenaga kependidikan yang pensiun. Sementara pada tahun 2022 jumlahnya tetap sebanyak 41 orang karena selain ada yang pensiun juga ada tenaga kependidikan baru.

Dari jumlah tersebut, persentase tenaga kependidikan berkualifikasi S-2 adalah 2 orang (4,87%), S-1 sebanyak 25 orang (60,97%), D2/D-3 sebanyak 3 orang (7,31%), dan SMA/SMK/SMP/SD adalah 11 orang (26,82%). Data tersebut menunjukkan adanya tenaga kependidikan berkualifikasi S-2 yang berpotensi menjadi pimpinan seperti direktur, manajer kepala seksi dan sebagainya.

Diagram 1.6
Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan



Berdasarkan data 2021, dari 41 orang tenaga kependidikan hanya 3 orang yang merupakan tenaga fungsional, masing-masing sebagai Widya Prada Ahli Madya, Analis Kepegawaian Ahli Muda dan Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda. Sedangkan 39 orang lainnya belum mendapatkan jabatan fungsional. Jika dibandingkan dengan jumlah dosen 91 orang dan jumlah mahasiswa 2.495 orang, maka rasio terhadap dosen adalah 1: 30,33, angka ini belum mencapai standar Dikti yang ditetapkan berdasarkan Program Hibah Kompetisi-Institusi (PHK-I), yaitu 1:3 untuk jumlah tenaga kependidikan terhadap dosen. Sedangkan untuk rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa adalah 1:831, nilainya jauh di bawah standar Dikti yang menetapkan perbandingan 1:30. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kependidikan non-fungsional yakni 1:60,85, juga masih berada di bawah standar Dikti. Karena itu, para tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS perlu didorong untuk segera menjadi PNS atau pegawai PTNBH, sementara tenaga kependidikan yang telah PNS namun belum mendapatkan jabatan fungsional perlu didorong untuk segera mendapatkan jabatan fungsionalnya.

Selain itu peningkatan kapasitas pelayanan juga perlu dilakukan, sehingga kualitas pelayanan FH UNAND terus meningkat. Dengan begitu, diharapkan manajemen administrasi, pelayanan dan pengelolaan FH UNAND semakin berkualitas.

1.2.4.3. Mahasiswa

Berdasarkan perkembangan dan aturan yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mulai tahun 2017 FH UNAND sebagai bagian dari Universitas Andalas menyelenggarakan tiga jalur penerimaan bagi mahasiswa baru di jenjang S-1, meliputi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Ujian Mandiri Bersama Perguruan Tinggi (SMMPTN). Nomenklatur proses seleksi tersebut bisa saja berubah sesuai perkembangan. Kuota untuk masing-masing jalur penerimaan terhadap daya tampung masing-masing program studi adalah;

1. SNMPTN sebanyak 20%;
2. SBMPTN sebanyak 40%;
3. SMMPTN (Jalur Mandiri) sebanyak 40%.

Adapun sistem penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.

Perekrutan dengan berbagai sistem di atas bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, untuk memperoleh pendidikan di FH UNAND. Mekanisme penerimaan melalui SNMPTN merupakan sistem penjangkaran yang dilakukan dengan menjaring siswa unggulan di sekolah-sekolah menengah atas yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Sumatera Barat dengan mengikuti batasan seleksi berupa peringkat di SMA masing-masing calon. Seleksi SNMPTN didasarkan pada nilai rapor siswa dan kriteria-kriteria lainnya yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Universitas. Selanjutnya terkait jumlah mahasiswa,

saat ini jumlah aktif mahasiswa S1 FH UNAND adalah:

Tabel 1.10.

Realisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

No.	Program	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	S1	1845	1939	2048	2143	2300	2494
2	S2	205	234	240	267	307	343
3	S3	37	43	48	61	66	74
4	MKn	285	362	403	434	471	550

Dalam proses penerimaan mahasiswa program sarjana, FH UNAND memiliki rasio keketatan masuk yang tinggi, seperti berikut:

1. Keketatan masuk Fakultas Hukum melalui SNMPTN tahun 2021 adalah 2117:241 (ranking 2 Universitas Andalas);
2. Keketatan masuk Fakultas Hukum melalui SBMPTN tahun 2021 adalah 1336:119 (ranking 2 Universitas Andalas);
3. *Passing Grade* untuk masuk Fakultas Hukum 2022-2023 adalah 52,1 %.

Selanjutnya jumlah mahasiswa program pascasarjana aktif per tahun 2022 adalah:

1. MIH adalah: 247 orang
2. MKn adalah: 289 orang
3. PSDIH adalah: 67 orang

Berdasarkan data tahun 2017 hingga tahun 2021, FH UNAND memiliki mahasiswa yang berasal dari belasan provinsi di seluruh Indonesia. Dari jumlah keseluruhan, mahasiswa asal Sumatera Barat selalu menempati posisi mayoritas di atas 70%. Pada angkatan 2017, mahasiswa berjumlah 419 orang yang berasal dari 15 provinsi.

Tabel 1.11

Sebaran Daerah Asal Mahasiswa Angkatan 2017-2021

No	Provinsi	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sumatera Barat	327	407	368	362	483	1947
2	Riau	38	25	39	34	34	170
3	Sumatera Utara	11	19	23	19	35	107
4	Jambi	11	16	22	19	21	89
5	Kepulauan Riau	6	5	6	6	17	40
6	Kepulauan Bangka Belitung	2	1	-	2	2	7
7	Lampung	1	-	1	-	-	2
8	Bengkulu	1	5	7	5	4	22
9	Sumatera Selatan	1	-	3	3	4	11
10	Aceh	1	1	3	3	5	13
11	DKI Jakarta	7	9	12	11	14	53
12	Jawa Barat	7	7	8	14	19	55
13	Banten	4	5	12	5	4	37
14	Bali	1	-	-	-	-	1
15	Papua	1	1	-	-	-	2
16	Jawa Timur	-	1	-	-	1	2
17	Maluku Utara	-	1	-	1	-	3
18	Jawa Tengah	-	1	-	-	1	2
19	Sulawesi Selatan	-	-	-	1	1	2
20	Gorontalo	-	-	-	-	1	1
21	Yogyakarta	-	-	-	-	1	1
22	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	1

Dalam penerimaan mahasiswa, FH UNAND juga melaksanakan program khusus pemerintah untuk penerimaan mahasiswa Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dari Papua yaitu tahun 2017 sebanyak 1 (satu) orang dan telah menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selain itu, juga terdapat mahasiswa luar negeri untuk program Doktor dan

sudah menyelesaikan proses perkualihannya.

Berdasarkan latar belakang sosial, budaya dan ras, populasi mahasiswa FH UNAND sangat beragam. Meskipun jumlah mahasiswa yang dominan beragama Islam dan berasal dari suku Minangkabau, namun banyak mahasiswa dengan agama dan dari suku lainnya seperti Aceh, Batak, Jawa, Melayu, dan Sunda. Kemajemukan latar belakang sosial, budaya dan ras dapat hidup berdampingan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Adapun masa studi mahasiswa FH UNAND untuk program studi S1, S2 dan S3 tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 12.

Masa Studi Wisudawan Tahun 2017-2021

No	Program Pendidikan	Rata- Rata Masa Studi Lulusan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Doktor (S-3)	5 th 7 bln	5 th 0 bln	4 th 5 bln	5 th 2 bln	4 th 10 bln
2	Magister (S-2)	3 th 3 bln	3 th 0 bln	2 th 7 bln	2 th 7 bln	2 th 8 bln
3	Sarjana (S-1)	4 th 6 bln	4 th 5 bln	4 th 6 bln	4 th 6 bln	4 th 7 bln

Sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum, profil umum lulusan yang diharapkan dari semua program studi adalah seorang ilmuwan sekaligus praktisi hukum yang mendedikasikan ilmunya secara profesional dan menjunjung tinggi standar etika ilmuwan dan/atau praktisi hukum.

1.2.5. Sarana dan Prasarana

FH UNAND memiliki lahan yang diperuntukkan bagi sarana pendidikan, pembelajaran praktik dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan total luas 20.750 meter persegi. Selain itu, FH UNAND juga memiliki gedung di Jalan Pancasila yang diperuntukkan bagi Program Pascasarjana di jenjang Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Lahan tersebut berstatus hak milik yang menjadi modal bagi FH UNAND untuk melakukan pengembangan di masa yang

akan datang. Di lahan tersebut telah dibangun gedung-gedung untuk pelaksanaan semua kegiatan kampus, di antaranya:

a. Di kampus Limau Manis, terdapat beberapa bangunan, yakni:

1. Gedung Dekanat;
2. Ruang Dosen;
3. Ruang Guru Besar;
4. Ruang Departemen;
5. Ruang Sidang Ujian;
6. Ruang Sidang Peradilan Semu;
7. Ruang Perpustakaan;
8. Ruang Kantor Pusat Studi dan LKBH;
9. Ruang Perkuliahan Cadangan;
10. Ruang Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
11. Mushalla; dan
12. Gedung Laboratorium Hukum.

Selain ruangan yang tersedia, perlu dibangun beberapa ruang lainnya karena setelah Universitas Andalas berstatus PTNBH, FH UNAND memiliki beberapa jabatan baru, di antaranya Manager Akademik, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Manager Kemahasiswaan, Publikasi & Pengelolaan Jurnal, Manager SDM dan Teknologi Informasi dan Manajer Perencanaan, Kerja Sama & Hubungan Alumni. Ruang-ruangan baru itu diperlukan untuk keempat manajer agar tugas masing-masing dapat dilaksanakan secara baik. Selanjutnya karena FH UNAND telah memiliki empat jurnal, maka juga perlu dibangun ruang kantor untuk mendukung aktivitas jurnal tersebut. Untuk ruang perkuliahan mahasiswa, terdapat gedung bersama dengan fakultas lain. Karena bertambahnya jumlah mahasiswa maka diperlukan pembangunan ruang kuliah baru.

b. Di kampus Jalan Pancasila, terdapat juga beberapa ruangan, yakni:

1. Ruang Sekretariat Pascasarjana;
2. Ruang perkuliahan Pascasarjana;

-
3. Ruang Sidang Ujian Pascasarjana;
 4. Perpustakaan;
 5. Labor Akta;
 6. Mushalla;
 7. Ruang Pimpinan (Dekan, dan para Kepala Program Studi);
 8. Ruang Guru Besar;
 9. Ruang Dosen yang terbatas untuk beberapa orang, sehingga perlu dibangun lagi ruang dosen untuk menampung semua dosen pengajar pascasarjana.

1.2.6. Prasarana Pendukung Pendidikan

1.2.6.1. Layanan Sistem Informasi

Guna mendukung layanan dan penyelenggaraan kegiatan, FH UNAND telah memiliki berbagai fasilitas sistem informasi dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, *e-learning* dan *e-library* yang meliputi:

1. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet;
2. Perangkat lunak berlisensi dengan jumlah yang memadai;
3. Fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik;
4. Akses daring ke koleksi perpustakaan.

Masing-masing fasilitas ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet

Sampai saat ini, Universitas Andalas telah memiliki sistem informasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT), di mana sejak tahun 2012 telah dikelola oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) (saat ini bernama Direktorat Teknologi dan Informasi). Pada awal pembentukan sistem ini, sudah dilakukan pembangunan infrastruktur *backbone* jaringan komputer Universitas Andalas yang dimulai sejak tahun 1999 dengan menggunakan kabel serat optik (*Fibre Optic, FO*) sebagai media transmisi utama. Dengan demikian seluruh komputer di gedung-gedung di lingkungan Universitas Andalas dapat terhubung dengan

internet. Sampai akhir tahun 2021, Universitas Andalas memiliki *bandwidth* untuk jaringan internet sebesar 3,5 GBPS dari Provider Telkom dan 400 MBPS dari Provider Indosat.

Fakultas Hukum merupakan bagian dari jaringan internet ini, namun jaringan itu masih memiliki keterbatasan di mana hanya Dekanat yang memiliki koneksi internet stabil, sementara jaringan internet di Departemen kerap kali mengalami gangguan. Karena itu perlu adanya perbaikan pada sistem jaringan FH UNAND.

2. Perangkat Lunak berlisensi dengan jumlah yang memadai.

Universitas Andalas bekerja sama dengan institusi lain dalam upaya membangun sistem informasi yang tidak hanya untuk keperluan peningkatan kapasitas manajemen dan proses pendidikan berbasis teknologi informasi (TI), namun juga untuk merespon perkembangan IPTEK dan globalisasi. Kerja sama yang telah dilakukan adalah dengan Microsoft Indonesia (penggunaan lisensi perangkat lunak Microsoft), Macromedia (lisensi produk Macromedia Breeze), Turnitin (*Similarity Checking*), dan *Grammarly*.

Gambar 1.3
Tampilan Paket Program I-learn Universitas Andalas

Curriculum Summary				Completion Requirements			
Curriculum Name:	Sistem Informasi Manajemen S1			1. Pengenalan Sistem Informasi Berbasis Komputer - Required			
Summary:	Sistem Informasi Manajemen Strata 1 (Satu)			10. Management Information System - Required			
Open Date:	02/01/2007 1:00 PM			11. Decision Support Systems - Required			
Close Date:	-			12. Virtual Office - Required			
Status:	Incomplete			13. Enterprise Information Systems - Required			
Cumulative Score:	0 / 0			14. Executive Information Systems - Required			
Certificate #:				15. Marketing Information Systems - Required			
				16. Information Resources IS - Required			
				2. TI utk Keunggulan Kompetitif - Required			
				3. TI dalam Electronic Commerce - Required			
				4. Komputer di Pasar Internasional - Required			
				5. Konsep Sistem - Required			
				6. Metodologi Daur Hidup Sistem - Required			
				7. Database Management System - Required			
				8. Komunikasi Data - Required			
				9. Accounting Information System - Required			

Curriculum Contents				hide details	show details
Name	Status	Score	Date Completed		
 1. Pengenalan Sistem Informasi Berbasis Komputer Summary 1. Pengenalan Sistem Informasi Berbasis Komputer Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Incomplete	0	11/07/2007 9:09 AM	Enter	
 2. TI utk Keunggulan Kompetitif Summary Penggunaan Teknologi Informasi untuk Keunggulan Kompetitif Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Incomplete	0	09/20/2007 9:10 PM	Enter	
 3. TI dalam Electronic Commerce Summary Penggunaan Teknologi Informasi dalam Electronic Commerce Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Incomplete	0	09/20/2007 9:14 PM	Enter	
 4. Komputer di Pasar Internasional Summary 4. Penggunaan Komputer di Pasar Internasional Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Not Taken	-	-	Enter	
 5. Konsep Sistem Summary 5. Konsep Sistem Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Not Taken	-	-	Enter	
 6. Metodologi Daur Hidup Sistem Summary 6. Metodologi Daur Hidup Sistem Prerequisites: (none) Test-Outs: (none)	Incomplete	0	06/02/2007 7:44 PM	Enter	

Berbagai perangkat lunak yang telah diupayakan Universitas Andalas tersebut didistribusikan ke tiap fakultas melalui dekan. Berbagai perangkat lunak berlisensi, seperti dari Microsoft, Inc. telah dimanfaatkan secara luas oleh sivitas akademika FH UNAND.

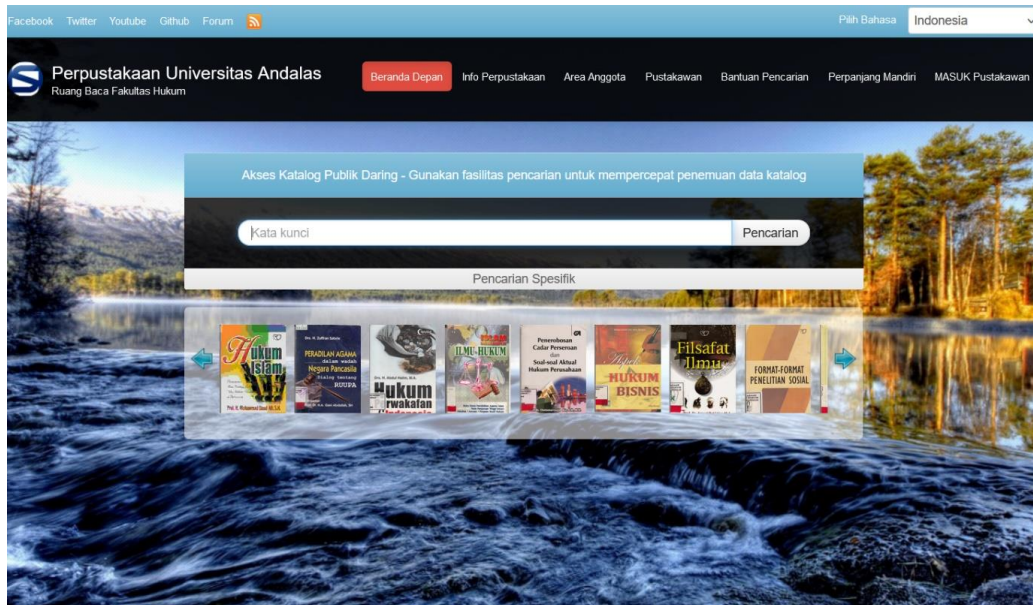
3. Fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik

Penyediaan *website* materi perkuliahan atau materi ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen melalui Internet sudah berlangsung sejak Februari 2007. Sistem ini dapat diakses pada alamat <http://ilearn.unand.ac.id>. Pada sisi lainnya, Universitas Andalas juga mengembangkan sistem *E-Learning* melalui kerjasama pengembangan dengan PT. Telkom. Sistem ini berbeda dengan Macromedia Breeze. Pada Sistem *E-Learning*, tidak ada fasilitas untuk kolaborasi secara daring tetapi lebih mengutamakan kepada manajemen perkuliahan dan materi yang disediakan secara daring dan dapat diakses mahasiswa dan dosen. Fasilitas komunitas yang disediakan sistem ini lebih mengarah kepada forum diskusi dan perpesanan (*chatting*). Bagi FH UNAND, khusus untuk kuliah daring, fasilitas yang tersedia adalah fhuk.ilearn, selain itu bagi mata kuliah MKWU dapat digunakan MKDU.ilearn.

4. Akses daring ke koleksi perpustakaan

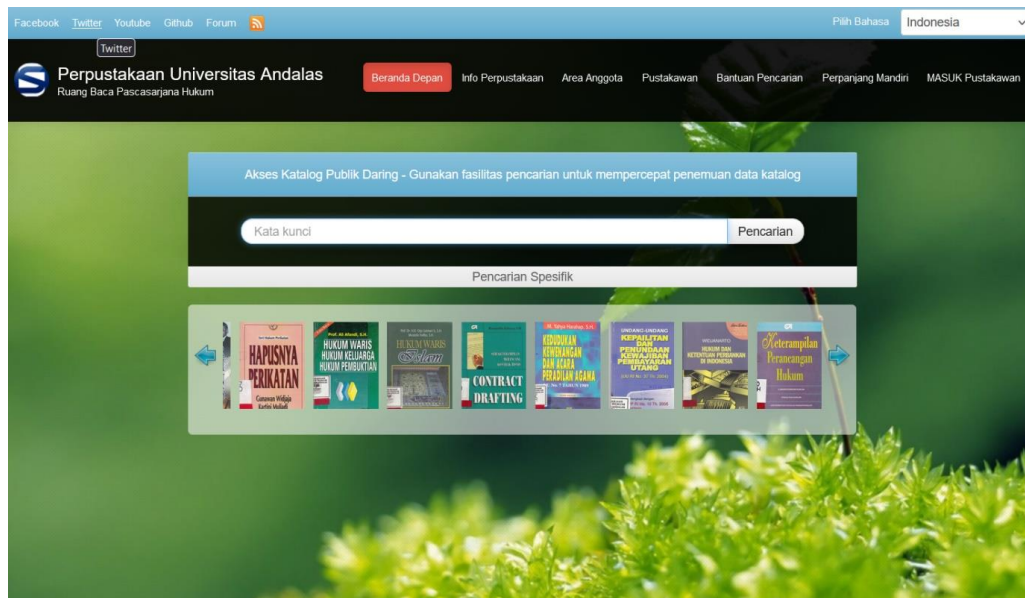
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta pihak luar secara terbuka dapat mengakses Perpustakaan FH UNAND melalui alamat <http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/> (Gambar 1.22). Penelusuran katalog di Perpustakaan Fakultas Hukum dapat dilakukan secara *offline* dan juga daring melalui *website* tersebut.

Gambar 1.2
Tampilan Website Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas



Aksesibilitas tinggi juga dapat dijangkau pada Perpustakaan Program Pascasarjana yang dapat dikunjungi melalui laman <http://pustaka.pasca.fhuk.unand.ac.id/> (Gambar 1.23). Penelusuran katalog di Perpustakaan Fakultas Hukum dapat dilakukan secara *offline* dan juga daring melalui *website* tersebut.

Gambar 1.4
Tampilan Website Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas



1.2.6.2. Layanan Perpustakaan

FH UNAND memiliki dua perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan fakultas yang berlokasi di lingkungan Kampus Fakultas Hukum Limau Manis dan perpustakaan pascasarjana yang berlokasi di Jl. Pancasila. Berbagai koleksi buku, jurnal, tesis, skripsi, hasil penelitian tersedia di Perpustakaan tersebut. Seluruh warga kampus diperkenankan memanfaatkan sarana ruang baca tersebut, walaupun dengan aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan warga sendiri. Di setiap pustaka tersebut terdapat ruang baca yang dikelola oleh tenaga kependidikan perpustakaan FH UNAND tersendiri.

1. Waktu Pelayanan

Pelayanan Perpustakaan FH UNAND berlangsung di gedung Fakultas dan secara daring, dengan waktu pelayanan:

- Layanan di dalam gedung perpustakaan dan ruang baca Fakultas Hukum dilaksanakan pada hari kerja, Senin-Jumat, jam 8.00-17.00.
- Layanan *online* berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui *website* <http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/> untuk penelusuran katalog pustaka.

Sedangkan pelayanan Perpustakaan Program Pascasarjana berlangsung di gedung Jl. Pancasila dan secara daring, dengan waktu pelayanan:

- Layanan di dalam gedung perpustakaan dan ruang baca Fakultas Hukum dilaksanakan pada hari kerja, Senin-Jumat, jam 8.00-17.00.
- Layanan *online* berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui *website* <http://pustaka.pasca.fhuk.unand.ac.id/> untuk penelusuran katalog pustaka.

2. Mutu Pelayanan

Kemudahan mencari bahan kepustakaan, keleluasaan peminjaman koleksi buku, bantuan pencarian bahan kepustakaan merupakan nilai dasar pelayanan. Mutu pelayanan Perpustakaan FH UNAND dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat kemudahan mencari bahan pustaka di Perpustakaan FH UNAND tergolong cukup karena ditunjang layanan komputer terkoneksi ke *website* perpustakaan Universitas selama 24 jam baik dari dalam maupun luar kampus.
- Keleluasaan meminjam bagi pengunjung cukup tinggi selama persyaratan sebagai anggota perpustakaan dipenuhi.
- Bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain sedang dibuatkan program dan kerja samanya.

3. Ketersediaan Layanan *E-library*

Informasi berikut menunjukkan ketersediaan layanan *e-library* yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi sekitar 30% mahasiswa anggota perpustakaan. Penelusuran katalog di FH UNAND dapat dilakukan secara *offline* dan juga daring.

Koleksi Perpustakaan FH UNAND terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan prosiding. Selain itu juga tersedia buku referensi dan tugas akhir dari mahasiswa, baik S-1, S-2, dan S-3. Koleksi tersebut terdiri dari bentuk cetak maupun *compact disk* (CD).

1.2.7. Analisis Kondisi Lingkungan

1.2.7.1. Kondisi Fakultas Hukum Saat Ini

Keberadaan FH UNAND tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang sedang terjadi di lingkungan, baik lokal, nasional maupun internasional. Saat ini dunia sedang berada dalam era industri dan ke depannya akan terus berubah. Perkembangan teknologi industri telah mengubah dan berdampak bagaimana manusia hidup. Informasi ada di mana-mana, proses akuisisi dan analisis *big data* menghasilkan jenis informasi baru. Cara orang berbisnis juga

berubah, ini adalah sebagai akibat dari terjadinya *shifting* ekonomy global menjadi *digital economy*.

McKinsey Global Institute mengeluarkan laporan pada tahun 2017 *Harnessing Automation for a future that works*, yang mengukur profil otomatisasi di 54 negara, yang sudah mewakili 78% pasar tenaga kerja global. Hal itu merupakan dampak dari revolusi industri. Beberapa kesimpulan penting adalah sebagai berikut;

- 50% dari pekerjaan lapangan kerja dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan yang saat ini menyerap 328.9 juta tenaga kerja berpotensi dapat diautomatisasi.
- 64% pekerjaan di lapangan manufaktur yang saat ini menyerap 237.4 juta tenaga kerja dapat diotomatisasi.
- 54% pekerjaan di industri retail, dengan serapan saat ini 187.4 juta tenaga kerja dapat diautomatisasi.

Bukan itu saja, perubahan tidak saja akan terjadi pada pekerjaan non skill, namun ini juga akan melanda berbagai lapangan kerja yang berbasiskan proses dan aktifitas rutin. Bahkan pengacara, *radiologist*, arsitek, dan akuntan akan melihat terjadinya perubahan cara kerja mereka, dan pada beberapa bidang akan terjadi pengurangan permintaan tenaga kerja. Ini menjadi konsekuensi dari berkembangnya konsep *machine learning*, yang memungkinkan jenis kompleksitas baru ditambahkan tanpa penambahan sumber daya, biaya atau waktu. Di sisi lain, akan banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang akan muncul di masa yang akan datang. Kita pun belum dapat membayangkan bentuknya seperti apa. Namun satu hal, pekerjaan yang akan dihargai dengan nilai tinggi, dengan gaji tinggi, antara lain adalah pekerjaan yang membutuhkan kreatifitas, data analitik, *cyber security*.

FH UNAND sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki amanah menghasilkan lulusan yang mampu bersaing, mesti ikut menjawab berbagai persoalan bangsa dengan menempatkan diri secara baik dalam kepentingan tersebut. Perubahan yang terjadi di lingkungan harus dapat direspon secara tepat. Keberhasilan bentuk respon yang efektif itu

sangat tergantung pada pemahaman FH UNAND terhadap kondisi internal dan eksternal. Kondisi FH UNAND saat renstra ini disusun dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Status FH UNAND sebagai perpanjangan tangan Universitas Andalas yang telah memperoleh status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021.
- b. Seluruh dosen dan sebagian besar tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1.2.7.2. Identifikasi Isu-isu Penting

Untuk berjalannya peran strategis FH UNAND di masa yang akan datang, bentuk konkret program dan kegiatan haruslah mampu merespon isu-isu penting yang terjadi. Isu-isu tersebut harus dapat dijawab dengan baik dan terangkai secara logis agar mampu menghasilkan solusi yang berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dapat berupa ditemukannya kekurangan dalam berbagai aspek internal, kekuatan yang berpotensi didayagunakan, peluang yang dapat ditangkap serta ancaman dari lingkungan eksternal (*SWOT analisis*).

1.2.7.3. Isu Eksternal

a. Perkembangan Revolusi Industri

Pengaruh revolusi industri berimbas pada perubahan dalam tuntutan pemangku kepentingan FH UNAND, khususnya terkait dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan serta bentuk-bentuk tata kelola dan layanan yang diharapkan dari suatu Perguruan Tinggi.

b. Berkembangnya Sistem Perbankan dan Ekonomi Islam

Tren kesadaran atas produk halal berjalan seiring dengan potensi perkembangan sistem perbankan dan *financing* sesuai prinsip syariah. Lapangan ini akan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum ekonomi dan perbankan syariah.

c. Kebijakan Riset Strategis Nasional

Pemerintah menyadari pentingnya peran riset dan pengembangan pada bidang-bidang strategis. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki sumber daya peneliti yang berkualitas diharapkan akan mengambil peran utama dalam riset strategis tersebut. Program BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), telah menghendaki perlunya kerja sama institusi pemerintah dan fakultas, untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi.

d. Terbatasnya Alokasi Dana dari Pemerintah

Alokasi dana pemerintah secara agregat cukup besar, namun biaya itu meliputi pembiayaan seluruh jenis pendidikan, pelatihan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sekolah kedinasan serta diklat-diklat yang ada di kementerian dan lembaga. Dampaknya, alokasi dana untuk perguruan tinggi, terutama fakultas, menjadi sulit untuk ditingkatkan. Hal ini berpotensi menjadi masalah dalam pelaksanaan program akselerasi pengembangan di perguruan tinggi.

e. Daya Serap Lulusan

Hal ini menjadi isu hangat, di mana banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran atau pengangguran yang tidak kentara. Di lain pihak pertumbuhan lapangan kerja untuk lulusan perguruan tinggi sangat rendah. Lembaga pendidikan tinggi harus menyikapi ini untuk secara dinamis berusaha menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi dan karakter yang relevan.

1.2.7.4. Isu Internal

a. Kurikulum

Kurikulum program studi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian untuk terselenggaranya proses belajar mengajar di program studi, dan merupakan isu terpenting yang perlu disiapkan dengan baik agar tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan. Bahan ajar harus mampu mengantarkan program studi yang dikelola FH UNAND menghasilkan

profil lulusan yang diharapkan dan mereka memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan pengembangan ilmu hukum. Berubahnya lingkungan eksternal, kurikulum turut berubah sesuai dinamika kebutuhan pekerjaan. Penyesuaian kurikulum tiap prodi hukum dengan kebutuhan dunia kerja harus selalu dilakukan secara berkala, dan disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.

b. Pembelajaran

Proses pembelajaran yang tradisional bertumpu pada Dosen (*Teacher-Center Learning*) sudah bergeser menjadi *Student Center Learning*, dengan berbagai varian metoda pembelajaran (*Problem Based Learning, Cooperative learning*). Metode dan proses pembelajaran menentukan keberhasilan tercapainya proses transfer pengetahuan dan keterampilan (*softskill*). Dewasa ini, dengan teknologi industri, telah memudahkan mahasiswa untuk mengakses informasi, data yang memberikan dampak pada proses pembelajaran, termasuk metode pembelajaran. Kondisi ini menuntut Dosen harus menyiapkan bahan ajar, sistim/ cara pembelajaran serta evaluasi yang harus sesuai dengan ketersediaan dan dukungan teknologi. Sarana dan prasarana untuk implementasi proses pembelajaran perlu dipenuhi dengan baik.

c. Optimalisasi Asset

FH UNAND memiliki aset yang sangat baik dengan mendapatkan bagian dari lahan seluas 20.750 meter persegi, pemanfaatannya selain untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, ada peluang untuk berkreasi dan berinovasi dalam pemanfaatannya. Kegiatan akademik dan non-akademik yang memberikan nilai tambah dan atau hilirisasi hasil penelitian bersama stakeholder, masyarakat industri dan pemerintah, akan memberikan peluang untuk optimalisasi pemanfaatannya, sehingga terbuka peluang RGA.

d. Budaya Penelitian di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Selama ini budaya penelitian di FH UNAND terfokus pada karya individu, dan belum terkonsolidasi secara optimal. Dampaknya target untuk menjadi institusi yang

terkemuka dalam penelitian masih belum tercapai. Ke depannya isu ini perlu ditindak lanjuti agar budaya penelitian yang progresif dapat tercapai.

e. Model Pembelajaran

Isu ini sejalan dengan isu kompetensi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan berdaya saing, maka model pembelajaran yang selama ini diterapkan di FH UNAND perlu disesuaikan dengan target kompetensi yang lebih luas.

f. Pengelolaan Laboratorium

Laboratorium hukum hingga saat ini belum terkelola dan terbangun sesuai harapan. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, laboratorium hukum perlu dibangun secara dengan mengelola mata kuliah praktik dan penanganan kasus.

g. Fasilitas Pendukung

Sekalipun fasilitas pendukung FH UNAND saat ini sudah cukup memadai, namun dengan perkembangan yang ada, fasilitas pendukung masih perlu dikembangkan agar agenda-agenda FH UNAND dapat dijalankan lebih optimal.

h. Kurangnya Koleksi Ruang Baca dan Literatur

Untuk menjadi fakultas yang terkemuka, kecukupan dan kelengkapan ruang baca dengan segala koleksinya sangat menentukan. Hanya saja koleksi yang dimiliki ruang baca di perpustakaan FH UNAND dan perpustakaan Program Pascasarjana masih sangat minim untuk mendukung berbagai proses pembelajaran dan penelitian. Hal ini perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang;

i. Komposisi Mahasiswa Didominasi S1

Upaya pengembangan penelitian dan produk keilmuan lainnya sangat dipengaruhi oleh kuatnya program pascasarjana, karena penelitian unggulan dosen dapat dilakukan dengan efektif melalui pelibatan mahasiswa pascasarjana. Saat ini, jumlah

mahasiswa pascasarjana masih sedikit dibandingkan mahasiswa sarjana, dan bahkan tidak sampai setengah dari jumlah mahasiswa program sarjana.

1.2.7.5. Asumsi-asumsi

Renstra FH UNAND 2022-2027 ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pencapaian target lulusan yang berdaya saing global dapat dicapai dengan asumsi:
 - a. Jelas dan terukurnya indikator kinerja akademik, yang dapat dipantau dan ditingkatkan;
 - b. Terlaksananya pembelajaran aktif dan interaktif serta sesuai dengan target kompetensi yang didukung oleh kecukupan fasilitas yang berkualitas;
 - c. Tercapainya dan terlampauinya standar-standar nasional pendidikan.
2. Kinerja penelitian dan pengabdian dapat ditingkatkan jika:
 - a. Kuatnya kelembagaan dan budaya riset;
 - b. Jelasnya arah kebijakan bidang unggulan riset yang didukung oleh *roadmap* penelitian yang jelas serta terjadinya sinergi yang positif antar peneliti dan antar fokus bidang ilmu hukum;
 - c. Kuatnya program pascasarjana, di mana penelitian tugas akhir mahasiswa terintegrasi dalam peta penelitian dosen;
 - d. Tercukupinya fasilitas ruang baca dan akses pada literatur terbaru;
 - e. Terjadinya percepatan *delivery* hasil riset, terutama untuk pengabdian kepada masyarakat dan program-program pembangunan hukum pemerintah.
3. FH UNAND dapat meningkatkan pemerataan akses dengan asumsi:
 - a. Meningkatnya jumlah dana yang dihasilkan dari kerja sama sehingga dapat meningkatkan proporsi bantuan dan dukungan untuk kesejahteraan mahasiswa;
 - b. Kuatnya kerja sama yang produktif antara FH UNAND dengan fakultas hukum di perguruan tinggi lainnya, baik nasional maupun internasional;
 - c. Terjadi perubahan pandangan masyarakat bahwa pendidikan tinggi bukan merupakan pengeluaran (*cost*), tetapi merupakan investasi jangka panjang yang mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi di masa mendatang.

1.2.7.6. Faktor Penentu Keberhasilan

Adapun yang dijadikan sebagai faktor penentu keberhasilan pada Renstra FH UNAND 2022-2027 ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dosen yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan. Persentase Dosen dengan kualifikasi S-2 dan S-3 harus mencukupi, sehingga tri dharma perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik;
- b. Tersedianya kebijakan arah riset FH UNAND dan sinergi antar bidang ilmu dan antar peneliti, sehingga dihasilkan publikasi yang berkualitas serta temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa;
- c. Kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi, misi dan strategi dan memimpin implementasinya dalam aktivitas dan program kerja tahunan;
- d. Tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan;
- e. Tersedianya dukungan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan dan pendukung pengambilan keputusan;
- f. Sistem perencanaan dan monitoring kinerja yang konsisten yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi;
- g. *Road map* untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter berdaya saing yang jelas terukur dan sistematis;
- h. Luasnya jaringan kerja sama yang produktif;
- i. Sinergi antar semua unsur FH UNAND.

1.2.8. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

1.2.8.1. Kekuatan

1. Kurikulum Terintegrasi dan Sesuai Tuntutan Lapangan Kerja

FH UNAND telah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Filosofi KKNI yaitu perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional. Melalui penerapan kurikulum berbasis KKNI, lulusan FH UNAND diharapkan memiliki kompetensi yang sama dengan program studi sejenis di tempat lain, baik di

tingkat nasional maupun internasional. Dalam menyusun kurikulum berbasis KKNI, FH UNAND telah memiliki buku Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan di FH UNAND antara lain adalah (1) Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) pada semua program studi di lingkungan FH UNAND; (2) Penyediaan prasarana dan sarana pendukung penerapan kurikulum; (3) Penyediaan anggaran; (4) Kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran yang mengacu kepada SN-DIKTI. Penyusunan kurikulum berbasis KKNI di FH UNAND dimaksudkan agar lulusan semua program studi di FH UNAND memiliki capaian pembelajaran yang sama dengan prodi sejenis baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Kualitas Pembelajaran hingga Evaluasi Hasil Pembelajaran

Langkah yang dilakukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran di FH UNAND adalah melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di kelas. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui berbagai teknik. Diantaranya dengan menggunakan kuisioner. Sebelum mengisi KRS, mahasiswa menjawab sejumlah pertanyaan untuk setiap mata kuliah yang diambil di portal akademik mereka masing-masing. Pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu unsur kualitas perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran selama perkuliahan.

3. Akses Mendapatkan Referensi dan Database Publikasi untuk Pembelajaran dan Penelitian

FH UNAND memiliki ruang baca yang terigterasi dengan Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan Universitas yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *civitas academika* FH UNAND. Ruang baca Fakultas menyediakan fasilitas koleksi buku dan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.

FH UNAND memiliki layanan *e-library* yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *civitas academica* untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan referensi penelitian.

FH UNAND memfasilitasi para *civitas academica* dengan menyediakan literatur yang terbaru untuk referensi penelitian berupa akses jurnal nasional dan internasional dengan cara 1) berlangganan jurnal ilmiah internasional secara *online* melalui *www.proquest.com* dan *www.sciencedirect.com*; 2) akses ke fasilitas INHERENT Perpustakaan Nasional RI; dan 3) akses kepada konten *e-learning*, *blog* dan *repository* untuk bahan pembelajaran dan publikasi hasil penelitian.

4. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Pengendalian mutu pembelajaran di FH UNAND dilakukan melalui audit mutu internal (AMI). AMI dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai atau belum dengan standar mutu pembelajaran yang ditetapkan. AMI dilakukan di bawah koordinasi LPM. Pada tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat program studi.

5. Kualifikasi Akademis Dosen

Ditenagai oleh 91 orang dosen yang terdiri atas terdiri atas 10 orang Guru Besar, 39 orang Doktor dan 52 orang Magister, serta dan 40 tenaga kependidikan, FH UNAND memiliki potensi SDM yang cukup memadai. Sementara dari segi jumlah total mahasiswa, S1 sebanyak 2.495 orang. Dengan demikian perbandingan antara dosen S1 dan mahasiswa berada pada rasio 1: 32,36. Meski belum mencapai rasio menurut standar nasional yang berada di angka 1:30, jumlah itu berpotensi bertambah untuk memenuhi rasio standar.

6. Akreditasi Institusi Fakultas Hukum

Jenjang pendidikan Sarjana, program studi Ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2026/SK/BANPT/Akred/S/VI/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 25 - Juni - 2024). Jenjang pendidikan Magister, program studi Magister Ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 1034/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 23 - April - 2024). Jenjang pendidikan Magister, program studi

Kenotariatan terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 1850/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019, berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 28 - Mei - 2024). Jenjang pendidikan Doktor, program studi Doktor ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 3161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 berlaku selama lima tahun (berlaku s/d 20 – Agustus - 2024). FH UNAND sudah harus masuk ke Akreditasi *The Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA), khususnya untuk program studi yang sudah memungkinkan untuk itu seperti Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister Ilmu Hukum di tahun 2023. Sedangkan Program Studi Magister Kenotariatan diharapkan dapat meningkatkan Akreditasinya menjadi A dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum mampu mempertahankan Akreditasi A yang telah diperoleh sejak tahun 2019. Selanjutnya paling lambat pada tahun 2027 diharapkan seluruh program studi sudah memiliki akreditasi internasional.

7. Ketersediaan Dana untuk Penelitian

Alokasi dana penelitian untuk penelitian mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Anggaran penelitian tersedia pada LPPM maupun di tingkat Fakultas. Anggaran penelitian pada anggaran Fakultas setiap tahun dalam 3 tahun terakhir mencapai 17 persen dari total anggaran FH UNAND.

1.2.8.2. Kelemahan

1. Kemampuan Tenaga Kependidikan Memberikan Pelayanan dan Penggunaan TIK

Masih lemahnya manajemen sumber daya manusia tenaga kependidikan yang mengakibatkan banyaknya penempatan tenaga kependidikan yang tidak didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki. Di samping itu FH UNAND belum memiliki sistem *upgrading* kompetensi tenaga kependidikan yang terstruktur.

2. Kemampuan Fakultas dalam Mengoptimalkan Aset untuk Menghasilkan PNB

FH UNAND memiliki sejumlah aset yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan PNB. Hingga saat ini aset tersebut belum dikelola secara maksimal karena belum adanya mekanisme dan aturan pengelolaan aset untuk menghasilkan PNB.

3. Strategi Marketing dalam Perencanaan Promosi untuk Pengenalan FH UNAND Guna Menjaring Mahasiswa Asing

Saat ini Universitas Andalas secara umum, khususnya Fakultas Hukum, belum memiliki *marketing strategy* yang terstruktur untuk menjaring mahasiswa asing karena hal tersebut belum menjadi prioritas Universitas Andalas. Ini menjadi kelemahan yang perlu dicarikan jalan keluar untuk program internasionalisasi FH UNAND.

4. Kelas Berbahasa Inggris dan *Credit Earning* dengan Institusi Pendidikan Lain

Masih sedikit sekali kelas berbahasa Inggris dan program *credit earning* yang bisa ditawarkan ke mahasiswa dan asing untuk menunjang FH UNAND dapat bersaing di kancah internasional.

1.2.8.3. Peluang

1. Tingginya Tingkat Pemanfaatan TI dan Komunikasi dalam Masyarakat

Milenial merupakan generasi pertama yang menyandang status sebagai *digital native*. Satu dari tiga penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Salah satu ciri generasi milenial adalah kecanduan internet. Delapan dari sepuluh generasi milenial terkoneksi dengan internet. Konsumsi internet generasi milenial rata-rata diatas 7 jam sehari dan lebih dari 40% generasi milenial memiliki akun media sosial. Penggunaan internet akan mengubah pola hubungan manusia sehingga juga akan berdampak pada hubungan hukum antar masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi FH UNAND untuk mengembangkan studi yang ada untuk menjawab perkembangan pemanfaatan teknologi.

2. Adanya Arah Kebijakan Pemerintah untuk Membuka Peluang Perkuliahan Jarak Jauh

Pemerintah telah membuka peluang untuk penyelenggaraan kuliah daring melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi dan Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian FH UNAND memiliki peluang untuk menyelenggarakan program pendidikan daring yang mengakomodasi kebutuhan peminat untuk kuliah di FH UNAND namun tidak memungkinkan untuk tinggal di kota Padang. Hanya saja, kelemahan kuliah secara daring juga perlu diatasi secara baik.

3. Adanya Kebijakan Pemerintah Untuk Mendorong Perguruan Tinggi Melakukan Penelitian Di Bidang Strategis

Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa fokus bidang penelitian nasional adalah (1) pangan, (2) energi, (3) kesehatan, (4) transportasi, (5) produk rekayasa keteknikan, (6) pertahanan dan keamanan, (7) kemaritiman, dan (8) sosial humaniora. Perguruan tinggi merupakan salah satu dari sembilan lembaga yang menjadi aktor utama dalam melakukan kegiatan penguatan penelitian bidang strategis tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki FH UNAND dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi maka FH UNAND dapat berperan aktif dalam menyelesaikan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, khususnya di bidang pembangunan hukum.

4. Adanya Kebijakan Pemerintah untuk Memberi Peluang Didatangkannya Dosen Asing ke PTN di Indonesia

Pemerintah membuat skema mendatangkan dosen asing ke Indonesia melalui program *World Class Professor* (WCP) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Skema ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Upaya mengundang dosen asing sudah terwujud sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B

memberikan proposal untuk diseleksi dan profesor yang diundang harus dari 100 besar perguruan terbaik dunia. Untuk itu, FH UNAND juga berpeluang untuk berkolaborasi dengan para dosen yang didatangkan dari luar negeri yang berperan sebagai katalisator untuk mempercepat akselerasi pembangunan ilmu pengetahuan hukum Indonesia.

1.2.8.4. Ancaman

1. Daya Serap Lulusan di Lapangan Kerja

Menurut laporan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018 tercatat sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Hal ini meningkat sebesar 2,5% dibanding tingkat pengangguran di tahun 2017. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat persaingan¹ untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat dengan datangnya Revolusi Industri. Apabila FH UNAND tidak membenahi proses belajar mengajarnya untuk meningkatkan kompetensi lulusan maka besar kemungkinan lulusan FH UNAND tidak terserap di dunia kerja. Hal ini berakibat hilangnya minat calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa FH UNAND.

2. Berlakunya Kawasan Bebas ASEAN yang Membuka Peluang Kerja bagi SDM Antarnegara ASEAN Berkompetisi di Kawasan ASEAN

Ancaman terbesar bagi Indonesia paska pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 31 Desember 2015 adalah rendahnya daya saing tenaga kerja asal Indonesia. Berdasarkan laporan pengamat ekonomi Universitas Indonesia, angkatan kerja Indonesia baru 5 persen yang sudah tersertifikasi. Kondisi ini cukup berbahaya karena bisa membuat banyak pekerja asing membanjiri lapangan pekerjaan di Indonesia dibanding pekerja Indonesia yang mampu bersaing dan bekerja di negara tetangga. Dengan demikian FH UNAND hendaknya juga membekali mahasiswa dengan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan akibat diberlakukannya MEA. Jika tidak, lulusan FH UNAND tidak akan mampu bersaing sehingga kehilangan peluang kerja di negerinya sendiri.

1

3. Banyaknya PTN dan PTS Berkualitas yang Agresif dalam Merekrut Calon Mahasiswa Potensial

Pemberlakuan sistem penjaminan mutu di Perguruan Tinggi menjadikan PTN dan PTS berlomba meningkatkan peringkat akreditasinya, baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini berdampak calon mahasiswa tidak hanya tertarik pada PTN yang selama ini sudah mapan. Untuk menjawab ancaman ini maka FH UNAND seharusnya memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam merekrut bakat-bakat terbaik yang ada di Indonesia dan mancanegara untuk kuliah di FH UNAND.

4. Adanya Kebijakan Pemerintah Memberi Izin Operasional Perguruan Tinggi Asing di Indonesia

Setelah Indonesia ratifikasi WTO, otomatis juga mengesahkan liberalisasi pendidikan tinggi. Hal itu terlihat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Contohnya UU Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, dan UU Nomor 12 Tahun 2012. Regulasi tersebut juga mencakup pengaturan pendirian pendidikan tinggi oleh asing. Menurut pemerintah, salah satu tujuannya adalah, dunia pendidikan Indonesia memiliki pembanding dalam hal kualitas. Hal ini dapat menjadi ancaman jika Fakultas Hukum tidak mampu bersaing atau menawarkan kualitas pendidikan yang lebih baik dari perguruan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia.

1.3. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang Diambil ke Depan

Tahun ke-1 (2023)

Pada periode ini, FH UNAND akan memperkuat fondasi untuk masuk dalam percaturan persaingan perguruan tinggi secara nasional dan internasional (*internationally recognised*). Ini ditunjukkan dengan:

- FH UNAND memperkuat kerja sama regional, nasional dan merintis kerja sama dengan perguruan tinggi dunia, khususnya di kawasan ASEAN.

-
- Bidang riset unggulan FH UNAND sudah terkonsolidasi dengan atmosfer riset yang baik. Kegiatan penelitian telah fokus dan tersinergi dalam *road map* penelitian unggulan UNAND yang ditujukan untuk menghasilkan output yang memberikan dampak dari delivery hasilnya untuk masyarakat.
 - Penguatan infrastruktur yang mampu mendukung penguatan atmosfer akademik.
 - Persentase kelas bahasa Inggris meningkat dan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing juga semakin baik.
 - Program Studi Hukum dan magister hukum didorong mendapatkan akreditasi internasional.
 - Penguatan dan pemantapan sistem tatakelola Fakultas.

Tahun ke-2 dan ke-3 (2024-2025)

Pada tahun ketiga periode ini FH UNAND makin dikenal luas di tingkat internasional (*highly internationally recognised*), khususnya kawasan ASEAN. Pada periode ini diharapkan:

- FH UNAND telah mempunyai reputasi internasional dan jumlah mahasiswa asing lebih dari 0,5%.
- Pelaksanaan kelas berbahasa Inggris mencapai 30%.
- Program pertukaran mahasiswa dan dosen serta *credit transfer system* dan *dual degree* berjalan dengan efektif.
- Hasil riset FH UNAND sudah dipublikasi dan diakui secara luas sejalan dengan serapan inovasinya untuk kepentingan masyarakat. Capaian ini menunjukkan orientasi riset unggulan FH UNAND yang diarahkan untuk mendukung kemandirian bangsa di samping dalam rangka pengembangan keilmuan.
- FH UNAND ditargetkan telah masuk dalam top 1.000 dunia berdasarkan sistem pemeringkatan *QS WUR*.
- 1 Jurnal terakreditasi pada Sinta 2 dan 4 jurnal terakreditasi di Sinta 3-5;
- Program Studi yang ada terkreditasi unggul dan sebagian reakreditasi A.

Tahun ke-4 dan ke-5(2026-2027)

Pada tahap ini, FH UNAND sudah dikenal luas di kalangan internasional ditandai dengan:

- Jumlah mahasiswa asing telah mencapai proporsi 1% dari total populasi mahasiswa.
- Hasil riset dan inovasi sudah mulai menampakkan hasil. Hasil inovasi tersebut telah terserap oleh masyarakat dan pemerintah yang menunjukkan kejelasan arah riset Fakultas Hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan riil dalam masyarakat serta untuk menuju kemandirian bangsa.
- *Student mobility* dan *faculty mobility* berjalan intensif. Jumlah mahasiswa asing sudah mencapai 1% populasi mahasiswa.
- FH UNAND semakin dikenal luas di dunia internasional, dibuktikan dengan capaian posisi FH UNAND yang telah masuk posisi 900 besar dunia.
- Hasil penelitian dan inovasi FH UNAND semakin berperan baik dalam mendukung daya saing bangsa.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Sebagai institusi pendidikan tinggi hukum, pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Andalas didasarkan atas visi, misi dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

2.1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah ***“Menjadi Fakultas Hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di Tingkat global Tahun 2027”***

Misi yang dijalankan Fakultas Hukum untuk mencapai visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
2. Melaksanakan penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional ;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan solutif sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Mengembangkan organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi yang ada, maka **tujuan strategis** (*strategic goals*) FH UNAND dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menguasai hukum nasional dan internasional dan memiliki keterampilan hukum, berintegritas atau berakhlak mulia,

serta mampu bersaing memasuki pasar kerja di era globalisasi dan perdagangan bebas;

- (2) Memiliki dosen yang mempunyai kemampuan akademik dan keahlian praktis yang ditandai dengan kuantitas dan kualitas hasil karya di bidang penelitian hukum maupun pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Mewujudkan lingkungan dan iklim akademik yang kondusif yang dapat mendukung proses belajar dan mengajar guna menghasilkan lulusan yang berkualitas;
- (4) Memiliki sistem pengelolaan informasi atau data yang menyeluruh, akuntabel, dan akurat serta sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional;
- (5) Tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkelanjutan; dan
- (6) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pendidikan, lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan visi misi Fakultas, disusun visi dan misi Program Studi S1 Sarjana Hukum, Program Studi S2 Magister Hukum, Program Studi S2 Magister Kenotariatan dan Program Doktor Hukum, yakni :

A. VISI MISI PROGRAM STUDI S1

Visi : Menjadi program pendidikan sarjana hukum terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan global.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana hukum yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa;
- c. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola program sarjana yang baik, *menuju tata kelola yang unggul, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis*;
- d. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga penyelenggara pendidikan sarjana hukum,

pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

B. VISI MISI PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM

Visi : Menjadi program studi Magister Ilmu Hukum yang bermartabat dan berkarakter nasional dan internasional.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik program Magister Ilmu Hukum yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa;
- c. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik pada Program Magister Ilmu Hukum, *menuju tata kelola yang unggul, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis*;
- d. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga penyelenggara pendidikan program Magister ilmu hukum, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

C. VISI MISI PROGRAM STUDI S2 MAGISTER KENOTARIATAN

Visi : Menjadi program studi Magister Kenotariatan yang bermartabat dan berkarakter nasional dan internasional

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi notaris yang berkualitas dan berkarakter nasional maupun internasional serta berkesinambungan.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dan bereputasi nasional dan internasional untuk menyokong pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan lembaga kenotariatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, solutif, sesuai dengan perkembangan ilmu hukum terkait dengan lembaga kenotariatan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

-
4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola program Magister Kenotariatan yang berbasis pada teknologi informasi.
 5. Menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan program Magister Kenotariatan, pemerintah, organisasi profesi dan pengguna lulusan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

D. VISI PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU HUKUM

VISI : Menjadi program studi Doktor Ilmu Hukum yang bermartabat dan berkarakter nasional dan internasional.

MISI ;

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik program doktor Ilmu hukum yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa;
- c. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik pada program doktor Ilmu Hukum, *menuju tata kelola yang unggul, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis*
- d. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga penyelenggara pendidikan program doktor Ilmu Hukum, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

2.2. NILAI-NILAI INTI (*CORE VALUES*)

Nilai-nilai inti yang melandasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum pada FH UNAND bersumber pada nilai-nilai inti Universitas Andalas sebagai berikut:

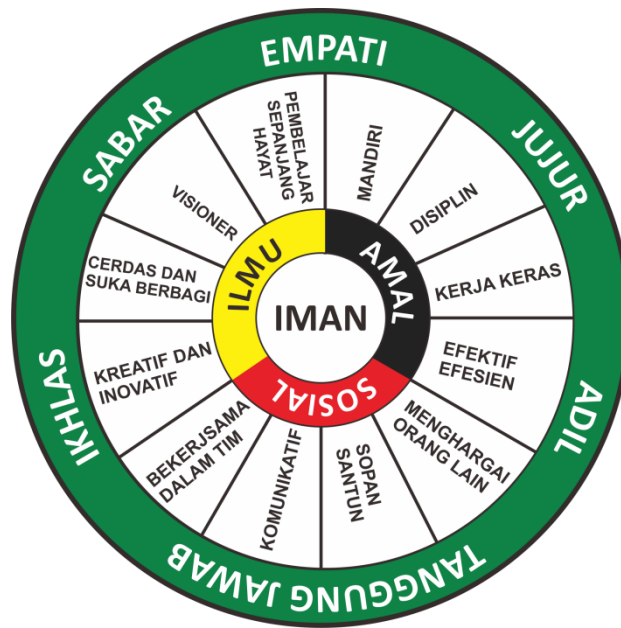
- a) **Independensi.** Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah institusi pendidikan tinggi hukum yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan (keterbukaan intelektual), menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan bebas dari kepentingan serta pengaruh pihak mana pun;
- b) **Integritas.** Fakultas Hukum Universitas Andalas menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya

berlandaskan pada sikap moral dan perilaku yang sesuai kode etik dan standar perilaku yang berlaku di Universitas Andalas;

- c) **Inovatif.** Fakultas Hukum Universitas Andalas berupaya mengembangkan budaya inovatif, kreatif, dinamis, efisien, dan tidak mengabaikan mutu dalam rangka membangun atmosfir akademik yang kondusif. Peningkatan suasana akademis yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d) **Akuntabilitas.** Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi dan mengutamakan kepentingan institusi dengan penuh tanggung jawab dalam rangka menjaga kredibilitas dan reputasi fakultas.

Prinsip dasar dan nilai-nilai inti yang membangun filosofi organisasi ini menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan strategis yang diimplementasikan dalam perencanaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nilai-nilai inti tersebut menjadi kerangka acuan dalam berbuat atau bertindak. Filosofi organisasi merupakan *code of conduct* yang diturunkan dari nilai-nilai inti organisasi, dan menjadi pedoman dalam kehidupan di lingkungan organisasi yang selanjutnya dijabarkan dalam karakter yang disebut Karakter Andalasian sebagaimana terlihat pada berikut.

Gambar 2.1
Karakter Andalasian



Karakter Andalasian merupakan acuan bagi semua masyarakat kampus di lingkungan UNAND termasuk pada Fakultas Hukum. Karakter Andalasian dibentuk dari empat elemen, yakni: Spiritual, Ilmu, Amal, dan Sosial. Di dalam skema model karakter, elemen pertama, yakni Spiritual merupakan sumber inspirasi sekaligus menjadi tujuan. Unsur spiritual ini dinyatakan dalam ungkapan religius, yang ditempatkan di bagian tengah, sebagai inti karakter Andalasian, dan mewarnai keseluruhan karakter lain.

FH UNAND menyadari bahwa karakter sesungguhnya berada dalam ranah afektif, yakni, sikap dan perilaku. Karakter yang diinginkan baru akan bertahan kuat seandainya dijiwai oleh kepercayaan luhur yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas dasar ini, maka inti dari karakter Andalasian ini adalah berupa pancaran sinar spiritual. Tiga elemen lain, yakni Ilmu, Amal dan Sosial. Ketiga elemen tersebut dikelilingi oleh masing-masing empat karakter. Sementara pada cincin terluar terdapat enam karakter yang meliputi: Sabar, Empati, Jujur, Adil, Tanggung Jawab, dan Ikhlas.

2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis FH UNAND, maka ditetapkan Indikator Tujuan yang dideskripsikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator
1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menguasai hukum nasional dan internasional dan memiliki keterampilan hukum, berintegritas atau berakhlak mulia, serta mampu bersaing memasuki pasar kerja di era globalisasi dan perdagangan bebas.	IKU 1, IKU 2, IKU 6, IKU 7, IKU 8, IKSS 1, IKSS 5
2	Memiliki dosen yang mempunyai kemampuan akademik dan keahlian praktis yang ditandai dengan kuantitas dan kualitas hasil karya di bidang penelitian hukum maupun pengabdian kepada masyarakat.	IKU 3, IKU 4, IKU 5
3	Mewujudkan lingkungan dan iklim akademik yang kondusif yang dapat mendukung proses belajar dan mengajar guna menghasilkan lulusan yang berkualitas.	IKU 1, IKU 7
4	Memiliki sistem pengelolaan informasi atau data yang menyeluruh, akurat, dan tepat serta sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional.	IKSS 8
5	Tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkelanjutan.	IKSS 4, IKSS 5, IKSS 6, IKSS 8
6	Memperluas dan meningkatkan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri	IKU 6

2.4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Misi FH UNAND diturunkan ke dalam bentuk sasaran strategis. Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam rangka mewujudkan dan mencapai misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara misi dan setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Setiap Misi

Misi dan Sasaran Strategis		
M1	Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan.	
	SS1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
M2	Melaksanakan penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional.	
	SS2	Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional.
	SS3	Menguatnya kapasitas inovasi hasil penelitian hukum dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan.
M3	Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan solutif sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	
	SS4	Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat inovatif dan solutif guna tercapainya pembangunan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
M4	Mengembangkan organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.	
	SS5	Terwujudnya tata kelola Fakultas yang baik sehingga mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan.
	SS6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Fakultas dalam memberikan layanan dan pengelolaan organisasi.
	SS7	Meningkatnya kualitas lembaga di lingkungan Fakultas dengan sistem terintegrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pencapaian setiap sasaran strategis ditentukan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan antara sasaran strategis, program dan kegiatan pada setiap misi diuraikan pada bagian di bawah ini :

Misi 1 : Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan

Terdapat sasaran strategis (SS 1) dan beberapa program serta kegiatan untuk mewujudkan misi 1. Uraian program dan kegiatan pada sasaran strategis 1 (satu) dapat dilihat pada Tabel 2.3.

SS1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis 1

P1	Peningkatan kualitas Pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar	
	K1	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi hukum.
	K2	Pengembangan kurikulum berstandar nasional/ internasional.
	K3	Monitoring dan evaluasi substansi dan pelaksanaan kurikulum.
	K4	Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional.
	K5	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
P2	Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran Kampus Merdeka.	
	K6	Mengembangkan model pembelajaran interaktif atau SCL dan pengembangan serta optimalisasi penggunaan platform digital dalam pembelajaran.
	K7	Pelaksanaan kegiatan /aktivitas merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) bagi civitas akademika.
	K8	Pelaksanaan magang mahasiswa bersertifikat di lembaga pemerintah/industri/lembaga profesi/lembaga lainnya.
	K9	Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dan kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial.
P3	Peningkatan optimalisasi pelayanan Perpustakaan Fakultas dan laboratorium hukum.	
	K10	Pengelolaan kegiatan/operasional Perpustakaan Fakultas.
	K11	Pengelolaan kegiatan/operasional Laboratorium Hukum.
P4	Internasionalisasi melalui peningkatan akreditasi menuju akreditasi internasional	
	K12	Pembukaan kelas Mata Kuliah Berbahasa Inggris.
	K13	Kurikulum internasional.
	K14	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional.
	K15	Penerimaan mahasiswa asing.
	K16	Menyusun rencana akreditasi internasional (FIBAA) program studi.
	K17	Mempersiapkan dan menyusun dokumen akreditasi internasional (FIBAA) program studi.

	K18	Persiapan dan fasilitasi visitasi akreditasi internasional (FIBAA) program studi.
P5	Penguatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum.	
	K19	Promosi dan roadshow program Pascasarjana (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum).
	K20	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru Program Pascasarjana (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum).
	K21	Pelaksanaan pembelajaran pascasarjana.
	K22	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana.
	K23	Pelaksanaan kelas kerja sama dengan lembaga pemerintah.
	K24	Perencanaan pembukaan program studi baru.
P6	Peningkatan kualitas input mahasiswa.	
	K25	Promosi dan roadshow Fakultas Hukum.
	K26	Penyusunan dan penyempurnaan pedoman penerimaan mahasiswa baru.
	K27	Seleksi penerimaan mahasiswa baru.
P7	Peningkatan afirmasi dan beasiswa mahasiswa.	
	K28	Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa.
	K29	Peningkatan akses beasiswa untuk mahasiswa.
	K30	Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima beasiswa.
P8	Pembinaan <i>softskill</i> , karakter, dan prestasi mahasiswa.	
	K31	Pengelolaan/pembinaan aktivitas unit-unit kegiatan mahasiswa dan lembaga organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas.
	K32	Pelaksanaan kegiatan/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa serta pembiayaan keikutsertaan mahasiswa FH UNAND di tingkat nasional/internasional.
	K33	Pelaksanaan kegiatan/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa serta pembiayaan keikutsertaan mahasiswa FH UNAND di tingkat nasional/internasional.
	K34	Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa.
	K35	Pelaksanaan <i>credit earning/transfer</i> mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri.
P9	Penguatan kompetensi mahasiswa dan lulusan.	
	K36	Pelaksanaan pelatihan bagi mahasiswa melalui kerja sama pembinaan karir lulusan dengan lembaga tersertifikasi nasional/internasional.
	K37	Peningkatan <i>soft skill</i> untuk berkarir di dalam negeri dan di luar negeri.
	K38	Pembentukan jurnal ilmiah mahasiswa.

	K39	Pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa.
	K40	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan.
	K41	Pelaksanaan <i>tracer study</i> dan pengembangan pusat karir.
	K42	Pengelolaan kegiatan pembelajaran/kelas berbahasa Inggris sesuai standar internasional.
	K43	Pelaksanaan <i>student exchange/mobility</i> .

Misi 2: Melaksanakan penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional

Untuk mencapai misi 2, telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis (SS2 dan SS3). Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Uraian program dan kegiatan pada setiap sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

SS2. Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 2

P10	Peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ internasional.	
	K44	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah.
	K45	Pembiayaan publikasi internasional dan penulisan artikel ilmiah hukum berstandar internasional.
	K46	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah.
	K47	Pembiayaan publikasi nasional dan penulisan artikel ilmiah berstandar nasional.

	K48	Lokakarya/evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks nasional.
	K49	Lokakarya/evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks internasional.
P11	Peningkatan Produktivitas dan pengelolaan Jurnal di Lingkungan Fakultas.	
	K50	Penguatan struktur dan manajemen pengelolaan Jurnal di Lingkungan Fakultas.
	K51	Pembiayaan pelatihan pengelola jurnal di lingkungan Fakultas.
	K52	Pembiayaan pengelolaan dan produksi Jurnal di Lingkungan Fakultas.
	K53	Peningkatan akreditasi Jurnal di Lingkungan Fakultas menuju akreditasi nasional/internasional.
P12	Penguatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan kualitas penelitian dosen.	
	K54	Penyusunan pedoman penelitian yang berkualitas dan sesuai skim penelitian.
	K55	Sosialisasi penyusunan, seleksi, dan penilaian proposal penelitian dosen.
	K56	Pembiayaan penelitian dan implementasi penelitian.
	K57	Peningkatan produksi buku karya dosen dan tulisan ilmiah lainnya.
	K58	Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.

SS3. Menguatnya kapasitas inovasi hasil penelitian dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 3

P13	Penguatan kelembagaan riset melalui optimalisasi pusat studi.	
	K59	Pengembangan dan pengelolaan pusat studi/kajian di lingkungan fakultas.
	K60	Pengembangan dan pengelolaan kerjasama penelitian.
P14	Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), inovasi, dan hilirisasinya untuk masyarakat.	
	K61	Workshop drafting dan pembiayaan pengusulan paten/HKI dari hasil penelitian.
	K62	Pelaksanaan sosialisasi dan promosi hasil penelitian dosen kepada masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga/organisasi swasta nasional maupun internasional.
P15	Peningkatan dan Penguatan riset unggulan/riset kerja sama.	
	K63	Pengelolaan riset unggulan dan riset kerja sama melalui pusat-pusat studi/kajian.

	K64	Implementasi hasil riset untuk advokasi sistem, kebijakan publik, dan pembaharuan hukum.
	K65	Implementasi kerja sama pusat studi dengan lembaga riset dan penguatan kerja sama hasil riset untuk pengabdian.

Misi 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan solutif sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai Misi 3, telah ditetapkan sasaran strategis 4 (SS4). Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Uraian program dan kegiatan pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.6.

SS4. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat inovatif dan solutif guna tercapainya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis 4

P16	Peningkatan kemampuan dosen dalam pengajuan usulan pengabdian masyarakat.	
	K66	Penyusunan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
	K67	Sosialisasi, seleksi, dan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat.
	K68	Pelaksanaan/pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
	K69	Seminar dan publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat.
	K70	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pemberian penghargaan bagi pelaku pengabdian.
P17	Peningkatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat.	
	K71	Penyusunan rencana kerja sama pengabdian masyarakat dengan pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi hukum, dan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional.

	K72	Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan sistem kemitraan dengan pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi hukum, dan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional.
	K73	Monotoring dan evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sistem kemitraan.
P18		Optimalisasi penyampaian gagasan keilmuan hukum atau keterangan berdasarkan keahlian hukum yang dimiliki dosen.
	K74	Fasilitasi dan optimalisasi penugasan dosen sebagai saksi ahli dalam proses peradilan.
	K75	Fasilitasi dan optimalisasi penugasan dosen dalam penyampaian pendapat hukum pada lembaga swasta maupun masyarakat.
P19		Peningkatan peran fakultas pengabdian kepada masyarakat
	K76	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
	K77	Pengelolaan kerjasama dibidang pengabdian masyarakat khususnya bantuan hukum bagi masyarakat.
	K78	Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan kerja sama pengabdian masyarakat dalam pemberian bantuan hukum.

Misi 4 : Mengembangkan organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan

Kualitas pengelolaan fakultas ini sangat mempengaruhi posisi fakultas dan institusi dalam bersaing dengan perguruan tinggi hukum lainnya. Untuk mencapai misi 4 ini terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan. Di bawah ini diuraikan 3 (tiga) sasaran strategis beserta program dan kegiatan untuk mencapai setiap sasaran strategis tersebut.

SS5. Terwujudnya tata kelola yang baik sehingga mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan

Tabel 2.7

Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 5

P20	Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT
-----	--

	K79	Implementasi sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan <i>resource sharing (SmartCampus)</i>
	K80	Pelaksanaan Audit dan Evaluasi program studi serta monitoring pasca audit berbasis teknologi informasi
	K81	Penyusunan dan implementasi Renstra Bisnis fakultas dan rencana aksi pencapaian target renstra fakultas
	K82	Pelaksanaan akreditasi program studi pada fakultas dan pemeringkatan berbasis ICT
P21	Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu akademik	
	K83	Pelaksanaan audit dan tindak lanjut pasca audit sistem manajemen mutu program studi
	K84	Evaluasi sistem penjaminan mutu akademik dan kajian pengembangan program studi pada Fakultas

SS6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan dan pengelolaan organisasi

Sasaran ini akan dicapai dengan program dan kegiatan sebagai berikut ini.

Tabel 2.8

Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 6

P22	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	
	K85	Fasilitasi dosen dan Praktisi Mengajar dari luar kampus
	K86	Pembiayaan dosen asing dan visiting/scholar professor
	K87	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen
	K88	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi
	K89	Pelaksanaan review/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen
	K90	Pembiayaan dosen mengikuti pelatihan, magang, dll
	K91	Fasilitasi dosen mengikuti World Class Program
	K92	Fasilitasi dosen berkegiatan akademik dan praktisi diluar kampus
P23	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan	
	K93	Pembiayaan tendik mengikuti pelatihan keterampilan manajemen dan kepemimpinan
	K94	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi
	K95	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bersertifikat bagi tenaga kependidikan
	K96	Pelaksanaan review/evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga kependidikan

SS7. Meningkatnya kualitas lembaga di lingkungan fakultas dengan sistem terintegrasi yang berbasis teknologi informasi

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana dimuat pada Tabel 2.9

*Tabel 2.9
Program dan Kegiatan untuk Sasaran Strategis 7*

P24	Peningkatan kemampuan SDM dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi.	
	K97	Optimalisasi SOTK fakultas berdasarkan penyesuaian dengan SOTK PTNBH.
	K98	Implementasi e-office dan unit layanan terpadu.
	K99	Implementasi kearsipan berbasis teknologi informasi.
	K100	Pelaksanaan survei kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penyelenggaraan pelayanan.
	K101	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> untuk perbaikan berkelanjutan tata kelola layanan pendidikan.
	K102	Penyusunan dan rekonsiliasi serta review laporan keuangan dan aset.
	K103	Pelaksanaan review dan audit internal secara rutin.
P25	Peningkatan kualitas lingkungan belajar.	
	K104	Pengelolaan dan penataan lingkungan belajar sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
	K105	Penambahan/pemeliharaan kelengkapan ruangan dan peralatan inventaris gedung kuliah.
P26	Peningkatan kualitas lingkungan kerja.	
	K106	Penerapan sistem keamanan, kenyamanan, dan kebersihan serta kesehatan lingkungan kerja.
	K107	Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas.
	K108	Pengelolaan/penataan lingkungan kerja sesuai standar <i>green campus/</i> kampus sehat.
	K109	Pengelolaan/operasional sarana dan fasilitas olahraga.
	K110	Penanganan dan kesiagaan darurat kesehatan/pandemi dan tanggap bencana.
	K111	Penambahan/renovasi sarana dan prasarana fisik lingkungan Fakultas.

	K112	Penambahan kelengkapan kerja dan peralatan inventaris penunjang perkantoran.
P27	Pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen lingkungan terpadu	
	K113	Pelaksanaan Dies Fakultas.
	K114	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni sarjana dan pascasarjana.
	K115	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ fakultas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas.
	K116	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa.
	K117	Pengelolaan dan penatausahaan aset/inventaris.
	K118	Pemeliharaan sarana/fasilitas fisik perkantoran dan peralatan inventaris kantor.
	K119	Pengelolaan operasional jaringan komunikasi, internet, dan kelistrikan Fakultas.
	K120	Pengembangan layanan terintegrasi berbasis <i>office automation</i> .
	K121	Implementasi digitalisasi data fakultas (departemen dan prodi).
	K122	Implementasi dan pengembangan sistem informasi penunjang kegiatan akademik dan non-akademik.
P28	Penguatan sistem manajemen kinerja Fakultas.	
	K123	Penyusunan, revisi/evaluasi, dan Implementasi Renstra FH UNAND dan rencana aksi pencapaian target renstra
	K124	<i>Upgrading</i> /penyusunan dan revisi peraturan dan SOP di lingkungan fakultas
	K125	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran.
	K126	Perencanaan berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen risiko.
	K127	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan.
	K128	Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen kinerja.
	K129	Pelaksanaan evaluasi dan pengukuran/pelaporan kinerja serta pemberian penghargaan pencapaian kinerja.
P29	Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi.	
	K	Implementasi Sistem Pengawasan dan Manajemen Risiko.
	K	Pelaksanaan audit khusus menindaklanjuti temuan BPK dan temuan lainnya.
	K	Implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM) dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan FH UNAND diselaraskan dengan arah kebijakan Universitas Andalas. Keberadaan FH UNAND sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri dan pendahulu adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum untuk kemajuan bangsa Indonesia, sesuai dengan semboyan UNAND yakni **“Untuk Kedjajaan Bangsa”**. Keinginan luhur itu kemudian diungkapkan dalam visi FH UNAND ***“Menjadi Fakultas Hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di tingkat global pada tahun 2027”***.

Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Andalas pada tanggal 31 Agustus 2021, maka status UNAND berubah menjadi PTN-BH. Dengan status sebagai PTN-BH diharapkan kinerja FH UNAND akan terus mengalami peningkatan dengan tamatan yang mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dengan fleksibilitas sebagai PTNBH, arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan FH UNAND mengacu pada tonggak-tonggak capaian (*milestones*) Universitas Andalas sebagai berikut.



Berpijak pada tonggak capaian UNAND tersebut, maka tonggak capaian FH UNAND juga mesti sejalan dengan itu. Sebab, capaian UNAND hanya akan tercapai jika FH UNAND sebagai satu satu unit kerja juga bekerja dalam irama dan kerangka yang sama dengan upaya perwujudan capaian UNAND tersebut.

Untuk itu, ditentukan arah kebijakan umum FH UNAND untuk mencapai target dimaksud sebagai berikut:

1. Jumlah total mahasiswa FH UNAND yang terdaftar pada semua program studi diupayakan tetap stabil, namun untuk menjawab kebutuhan lingkungan dan menjaga mutu, proporsionalitas jumlah mahasiswa masing-masing program studi perlu dilakukan.
2. Proses pembelajaran diarahkan untuk memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan tantangan global yang terus berkembang.
3. Departemen dan Program studi didorong untuk memperkuat kuantitas, kualitas dan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan dinamika kehidupan global dan revolusi industri yang terjadi.
4. Riset-riset FH UNAND didorong untuk dilakukan secara sinergis dalam bentuk kelompok-kelompok riset (*research group*) yang fokus pada riset unggulan FH UNAND, Unggulan Nasional dan Internasional untuk dapat berkontribusi menuju kemandirian bangsa dimasa mendatang.

-
5. Program studi didorong untuk mendapatkan akreditasi internasional dan memposisikan diri sebagai tujuan bagi calon mahasiswa berkualitas dari dalam dan luar negeri melalui perbaikan kurikulum, pembelajaran serta standar pendidikan sesuai standar internasional yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
 6. Pengembangan *softskill*, prestasi dan karakter mahasiswa dilakukan melalui aktivitas intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis serta berkesinambungan.
 7. FH UNAND berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk merintis kegiatan pemberian jasa hukum.
 8. Penerapan budaya kerja profesional dan terstandar untuk mewujudkan ekosistem yang menunjang peningkatan kinerja tri dharma perguruan tinggi dan layanan prima untuk penguatan reputasi FH UNAND yang bermartabat dengan melakukan penguatan *good university governance* dengan prinsip transparan, akuntabel, tanggung-jawab, independen, adil, efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan umum maka disusun strategi pengembangan FH UNAND yang didasarkan pada kondisi yang tengah berkembang serta menganalisis kondisi eksternal, kondisi internal serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja dan keberadaan FH UNAND di masa yang akan datang.

Adapun strategi pelaksanaan kebijakan umum di atas adalah dengan langkah berikut:

1. Internasionalisasi Pendidikan Hukum

Mengingat dinamika globalisasi dan derasnya arus informasi digital, FH UNAND mesti melakukan penyesuaian visi dan misinya dengan perkembangan pendidikan tinggi secara global. Sejalan dengan itu, FH UNAND menetapkan target terakreditasi internasional, salah satunya *Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)*,

bagi program studi yang ada. Selain itu, internasionalisasi akan ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa asing yang kuliah di FH UNAND, telah berlangsungnya kuliah kelas berbahasa inggris, meningkatnya jumlah pertukaran mahasiswa internasional, terlaksananya program *visiting lecture* serta *dual degree* atau *double degree* dengan perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri.

2. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Dosen

Salah satu tugas akademik dosen yang mesti mendapatkan perhatian serius adalah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas penelitian dosen diukur dari sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu melalui publikasi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kualitas SDM merupakan penentu keberhasilan pencapaian tujuan FH UNAND. Oleh karena itu, aspek ini akan menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi FH UNAND.

4. Peningkatan Prestasi dan *Soft skill* Mahasiswa

Kualitas pendidikan juga dibuktikan dengan prestasi dan skill yang dimiliki lulusan. Oleh karena itu, program-program yang bertujuan meningkatkan prestasi mahasiswa perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Penguatan dukungan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana yang mendukung proses pembelajaran sangat diperlukan dan dijaga serta ditingkatkan kualitasnya, terutama ruang baca, buku, dan jurnal-jurnal berkuatas yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.

6. Perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi

Tata kelola organisasi menjadi salah satu aspek penting yang akan mendukung berjalannya organisasi Fakultas dalam mengelola program tri

dharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan tata kelola organisasi secara berkelanjutan mesti dilakukan.

Dengan strategi pencapaian tersebut di atas, diharapkan FH UNAND dapat mencapai reputasi internasional pada tahun 2027.

3.2. KERANGKA REGULASI

Penyusunan Rencana Strategis FH UNAND 2022-2027 secara yuridis formal berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Universitas Andalas Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- 4) Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas; dan
- 5) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada tanggal 31 Agustus 2021, UNAND berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Ketentuan ini mengatur bahwa UNAND adalah perguruan tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki hak otonom untuk mengelola bidang akademik dan non akademik. Sehubungan dengan itu, UNAND juga mengelola tata organisasinya secara mandiri. Hal itu diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2021 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas. Dalam Peraturan Rektor tersebut juga diatur tentang organisasi lembaga Fakultas. Lebih jauh hal itu akan diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Struktur Organisasi

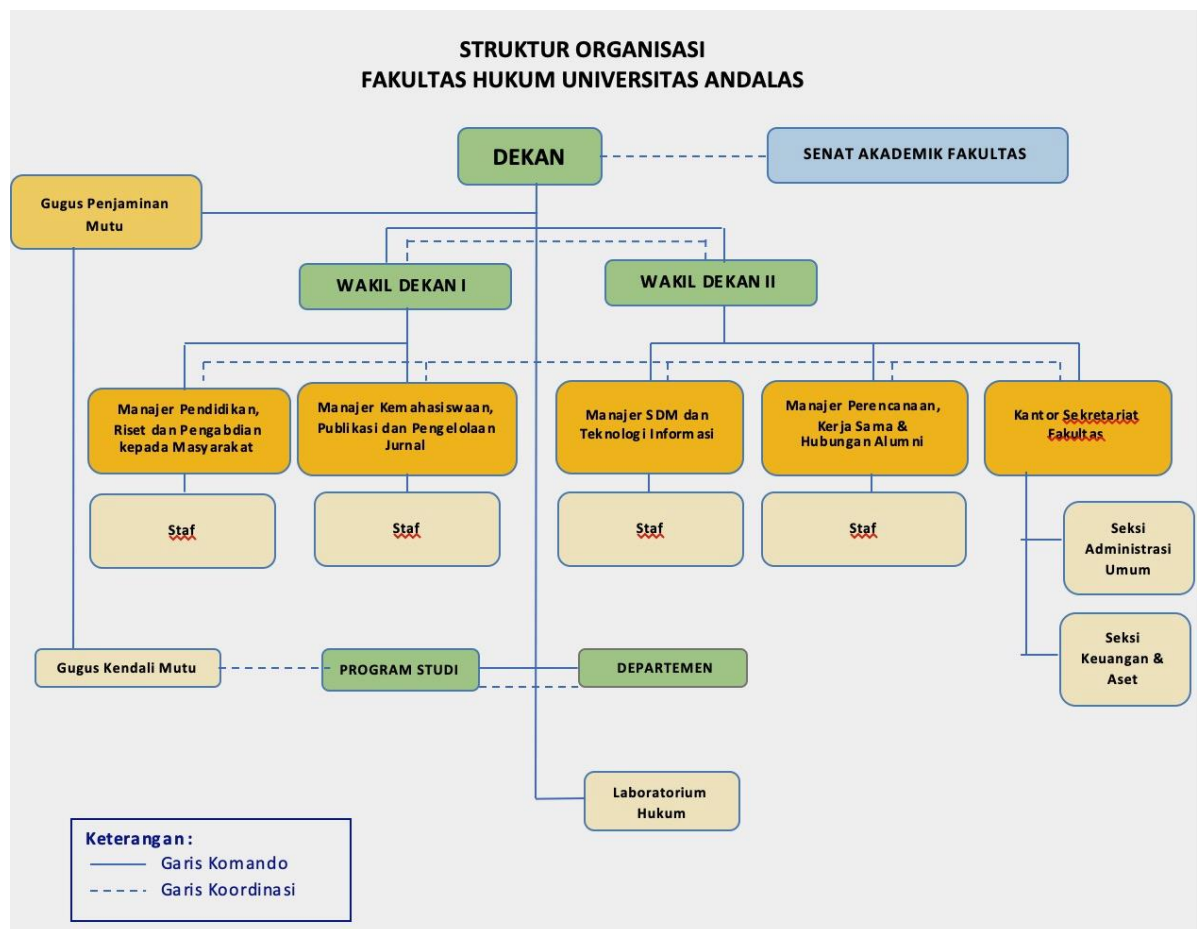
Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas menyatakan bahwa Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND. Sesuai ketentuan tersebut, Dekan ditempatkan sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya memimpin Fakultas, Dekan dibantu oleh organ pengelola FH UNAND yang akan dijelaskan sebagai berikut ini.

Susunan organisasi yang menjalankan fungsi pengelolaan FH UNAND terdiri:

- a. Dekan, berkedudukan sebagai pimpinan Fakultas yang melaksanakan fungsi pengelolaan Fakultas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- b. Senat Akademik Fakultas (SAF), merupakan organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- c. Wakil Dekan, berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang membantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan Fakultas sesuai bidang tugasnya, yang terdiri dari:
 - 1) Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 2) Wakil Dekan II Bidang Umum dan Sumber Daya.
- d. Manager, merupakan organ fakultas yang membantu Wakil Dekan, dan berasal dari Tenaga Kependidikan atau Dosen, serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan, yang terdiri atas:
 - 1) Manajer Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Manajer Kemahasiswaan, Publikasi dan Pengelolaan Jurnal;
 - 3) Manajer Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi; dan

- 4) Manajer Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Alumni.
- e. Departemen; merupakan unsur Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, yang terdiri dari:
 - 1) Departemen Hukum Pidana;
 - 2) Departemen Hukum Internasional;
 - 3) Departemen Hukum Perdata;
 - 4) Departemen Hukum Administrasi Negara; dan
 - 5) Departemen Hukum Tata Negara.
- f. Program Studi, yang terdiri atas Program Studi Sarjana, Magister, Magister Kenotariatan dan Doktor.
- g. Laboratorium Hukum.
- h. Unit lain di Fakultas yang diperlukan.

Adapun bagan struktur Organisasi Fakultas sesuai Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Dekan sebagai pimpinan yang melaksanakan fungsi pengelolaan Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan dan pengembangan riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas;
- b. memimpin penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, membina Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. memimpin pengelolaan anggaran dan teknologi informasi di tingkat Fakultas;
- d. memimpin pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan aset di tingkat Fakultas;
- e. memimpin penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi umum Fakultas;
- f. mengusulkan pembukaan atau perubahan Program Studi berdasarkan pertimbangan SAF;
- g. melaksanakan penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
- h. menyusun rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Fakultas sesuai dengan rencana strategis UNAND;
- i. melaksanakan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
- j. memberikan penghargaan kepada Civitas Akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
- k. membina dan mengembangkan potensi mahasiswa;
- l. memberikan sanksi sesuai wewenang terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di tingkat Fakultas;
- m. membina kerja sama dengan berbagai pihak, hubungan dengan alumni, dan masyarakat;
- n. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wakil Dekan, ketua dan sekretaris Departemen, ketua Program Studi, kepala laboratorium/studio/bengkel dan pimpinan unsur lainnya di tingkat Fakultas kepada Rektor; dan

-
- o. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan pelaksanaan tugas Dekan kepada Rektor.

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dalam membantu Dekan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis di bidang akademik bersama Wakil Dekan II;
- b. merumuskan program dan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang ditetapkan pada bidang akademik dan kemahasiswaan;
- c. mengoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik dalam rangka memenuhi indikator kinerja di bidang akademik;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akademik di tingkat Fakultas;
- e. mengendalikan pelaksanaan standar mutu bidang akademik di tingkat Fakultas;
- f. menyusun laporan tahunan kegiatan akademik di tingkat Fakultas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Wakil Dekan II Bidang Umum dan Sumber Daya. dalam membantu Dekan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis di bidang nonakademik bersama Wakil Dekan I;
- b. merumuskan program dan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya dan kerja sama sesuai dengan rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang ditetapkan pada bidang perencanaan, keuangan, sumber daya dan kerja sama;
- c. mengoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang nonakademik;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang nonakademik di tingkat Fakultas;
- e. mengendalikan pelaksanaan standar mutu bidang nonakademik di tingkat Fakultas;
- f. menyusun laporan tahunan kegiatan non akademik di tingkat Fakultas; dan

-
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Senat Akademik Fakultas (SAF) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan akademik di tingkat Fakultas;
- b. pemberian pertimbangan dan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Dosen di tingkat Fakultas;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas; dan
- d. pemberian rekomendasi terhadap pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi terhadap Sivitas Akademika di tingkat Fakultas.

Adapun tugas dan wewenang SAF terdiri dari:

- a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
- b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Fakultas;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- e. memberikan pertimbangan untuk pembukaan atau perubahan Program Studi kepada Dekan;
- f. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Dosen kepada Dekan;
- g. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
- h. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;

-
- i. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas; dan
 - j. memilih anggota SAU wakil Fakultas.

Manager bertugas membantu Dekan dan Wakil Dekan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi, penyelenggaraan perencanaan, kerja sama, dan hubungan alumni.

Departemen, berkedudukan sebagai unsur Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Departemen melaksanakan fungsi penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dalam jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Departemen terdiri atas Ketua dan Sekretaris Departemen.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Departemen mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mendukung terwujudnya visi dan misi Fakultas sesuai dengan visi dan misi UNAND;
- b. membantu Fakultas dalam mewujudkan rencana strategis Fakultas sesuai rencana strategis UNAND;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan ketatausahaan Departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Ketua Departemen mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan anggaran tahunan Departemen bersama-sama dengan ketua Program Studi;

-
- b. mengelola sumber daya manusia dan sumber daya pendukung akademik Departemen dalam rangka pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi;
 - c. mendukung Program Studi dalam hal ketersediaan sumberdaya untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum;
 - d. menyusun rencana pembelajaran dan alokasi tenaga pengajar untuk keperluan Program Studi bersama-sama dengan ketua Program Studi;
 - e. menyelenggarakan pemilihan calon ketua dan sekretaris Departemen serta merekomendasikan calon ketua Program Studi dan laboratorium/bengkel/studio yang berada di bawah Departemen untuk diajukan kepada Dekan;
 - f. menetapkan persyaratan dan jumlah mahasiswa yang akan diterima bersama-sama dengan ketua Program Studi;
 - g. mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Departemen kepada Dekan.

Sekretaris Departemen dalam membantu Ketua Departemen mempunyai bertugas:

- a. membantu ketua Departemen dalam menjalankan tugas dan wewenang Departemen dan/atau tugas dan wewenang ketua Departemen;
- b. membantu pelaksanaan fungsi dan tugas administrasi Departemen; dan
- c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua Departemen.

Program Studi, dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Dalam melaksanakan fungsinya, program studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran dan penjaminan mutu di Program Studi;
- b. menyelenggarakan program pendidikan sarjana, profesi, magister, dan doktor monodisiplin;
- c. menyiapkan rencana dan/atau jadwal perkuliahan;

-
- d. mengajukan permintaan tenaga pengajar/Dosen kepada ketua Departemen dan/atau Dekan;
 - e. mengatur beban kinerja Dosen untuk proses pembelajaran secara merata menurut kelompok bidang keahlian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. mengusulkan daya tampung Program Studi kepada ketua Departemen;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- d. menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Departemen;
- e. membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- f. membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, dan/atau bakat dan minat;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat Program Studi;
- h. melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan melalui Ketua departemen;
- i. menyusun dokumen laporan kinerja Program Studi dan laporan evaluasi diri di bawah koordinasi Dekan;
- j. mengoordinasi pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasehat Akademik;
- k. memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- l. melakukan studi pelacakan alumni (tracer study) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;
- m. menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun bersama ketua Departemen; dan
- n. mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- o. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Program Studi setelah berkoordinasi dengan ketua Departemen kepada Dekan.

3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi. Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi unsur paling penting dalam pengembangan sebuah lembaga. Citra akademis suatu lembaga perguruan tinggi akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, beserta karya-karya keilmuan yang dihasilkan sebagai sumbangan untuk masyarakat maupun pengembangan bidang ilmu hukum itu sendiri.

Pengembangan sumber daya manusia, khususnya karir dan prestasi, perlu direncanakan secara sistematis, selaras dengan perjalanan institusi yang sesuai dengan prestasi dan minat individual, serta memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam lingkungan dan bidang ilmu masing-masing.

Perguruan tinggi memiliki misi ganda yaitu peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya menghasilkan manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang besar. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Perguruan tinggi juga mengembangkan fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Sedemikian pentingnya peran peningkatan kualitas SDM sehingga dalam pembangunan sumber daya manusia, pengembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Pengelolaan SDM pada dasarnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan

mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan bermartabat.

FHUA memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Tenaga Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (tendik/pegawai) dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Kontrak (Non-PNS). Proses rekrutmen untuk dosen dan pegawai (tendik) UNAND yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun kualifikasi calon Dosen adalah minimal berkualifikasi pendidikan magister (S-2), sementara untuk tenaga kependidikan adalah minimal D-3 dan telah memiliki keterampilan untuk teknisi, operator, programmer seperti ahli komputer dan sistem informasi. Sementara proses rekrutmen untuk dosen dan tendik yang berstatus kontrak dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas.

a. Dosen

Saat ini dosen tetap FHUA berjumlah lebih kurang 90 orang, berkurang dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 sebanyak 102 orang, yang tersebar dalam 5 (lima) departemen. Lebih lanjut dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Perdata

No.	Nama	N I P	Gol
1	Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati.SH.Cn. MH	'195808011984032002	IV/e
2	Prof. Dr. H. Yaswirman. MA	'195708011986031001	IV/d
3	Prof. Dr. H. Busyra Azheri. SH. MH	'196911181999031002	IV/c
4	Prof. Dr. Zefrizal Nurdin. SH. MH	'195709171984031002	IV/b
5	Hj. Ulfanora. SH. MH	'196111161986032001	IV/b
6	Linda Elmis. SH. MH	'195804031985032001	IV/b
7	Hj. Zahara. SH. MH	'195910251985032001	IV/b
8	H. Nanda Utama. SH. MH	'196105311986031003	IV/b

No.	Nama	NIP	Gol
9	Dr. Dahlil Marjon. SH. MH	'195904201986031002	IV/a
10	Drs. Najmuddin, M.Pd. P.hD	'196004071989031001	IV/a
11	Dr. H. Rembrandt. SH. M.Pd	'196402221990021001	IV/b
12	Hj. Dian Amelia. SH. MH	'195904241986032003	IV/a
13	Misnar Syam, SH. MH	'197009021998032003	IV/a
14	Neneng Oktarina. SH. MH	'196910071998022001	IV/a
15	Tasman. SH. MH	'196311051989011001	IV/a
16	Shafira Hijriya, SH, MH	'198908162015042003	III/b
17	Dr. Wetria Fauzi. SH. MH	'197807302000122001	IV/a
18	Daswirman, N, SH. MH	'196701211995121001	III/d
19	Yasniwati. SH. MH	'197211132005012001	IV/a
20	Zulkifli. SH. MH	'196607191994021001	III/d
21	Muhammad Hasbi. SH. MH	'196311121990031003	III/d
22	Andalusia, SH, MH	'196301021988092001	III/d
23	Dr. Devianty Fitri. SH. MH	'197310221998022001	III/c
24	Dr. Hj. Yulfasni, SH, MH	'195811071986032003	III/c
25	Dr. Yussy Adelina Mannas. SH. MH	198402182008012002	III/c
26	Upita Anggunsuri. SH. MH	'198707232014042001	III/c
27	Almaududi, SH., MH	'199111112019031009	III/b
28	Rahmi Murniwati, SH., MH	'199607012022032014	III/b

Tabel 3.2

Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Pidana

No.	Nama	NIP	Gol
1	Prof. Dr. H. Elwi Danil. SH. MH	'196006251986031003	IV/d
2	Prof. Dr. Ismansyah. SH. MH	'195910101987021002	IV/d
3	Dr. Hj. Aria Zurnetti. SH. M.Hum	'196212051987022001	IV/c
4	Yoserwan. SH. MH. LLM	'196212311989011002	IV/c
5	Dr. H. A. Irzal Rias, SH. MH	'196308181989011001	IV/b

6	Dr. Fadillah Sabri. SH. MH	'195901111986031002	IV/b
7	Hj. Tenofrimer. SH. M.Si	'196011101987022001	IV/a
8	Hj. Efren Nova. SH. MH	'196110111987022001	IV/a
9	Nilma Suryani, SH, MH	'197407241999032004	IV/a
10	Hj, Yandriz, SH, MH	'196112311986032004	III/d
11	Nelwitis. A. SH. MH	'195906111986032001	III/d
12	Hj. Diana Arma. SH. MH	'196304111990012001	III/d
13	Yusrida, SH, MH	'195910071986031002	III/c
14	Lucky Raspati. SH. MH	'197905182005011003	III/c
15	Iwan Kurniawan. SH, MH	'197801212005011001	III/c
16	Dr. Siska Elvandari. SH, MH	'198009112006042001	III/c
17	Riki Afrizal. SH. MH	'198509162014041001	III/c
18	Dr. Nani Mulyati. SH. MCL	'198208092005012002	III/c
19	Dr. Edita Elda. SH. MH	'198601252009122004	III/b

Tabel 3.3.

Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Tata Negara

No.	Nama	NIP	Gol
1	Prof. Dr. H. Yuliandri. SH. MH	'196207181988111001	IV/e
2	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA	196808201995121001	IV/e
3	Hj. Yunita Syofyan, SH. MH	'196105251986032002	IV/b
4	Delfina Gusman. SH. MH	'198205092005012002	IV/b
5	Didi Nazmi. SH. MH	'196012121987051001	IV/a
6	Dr. Charles Simabura. SH. MH	'197904052005011005	IV/a
7	Arfiani. SH. MH	'196307231990032001	III/d
8	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	'198111302010121005	III/c
9	Dr. Dian Bakti Setiawan. SH. MH	'197205162000031002	III/c
10	Henny Andriani. SH. MH	'197606211999032003	III/c

No.	Nama	N I P	Gol
11	Alsyaam. SH. MH	'196211251990031003	III/c
12	Feri Amsari. SH. MH. LLM	'198010022009121002	III/b
13	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LLM	'198303312015041001	III/b
14	Ilhamdi Putra, SH., MH	199409162022031008	III/b
15	Sucy Delyarahmi, SH., MH	199211262022032001	III/b

Tabel 3.4
Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara

No.	Nama	N I P	Gol
1	Prof. Dr. H. Kurnia Warman. SH. M.Hum	'197106301998021002	IV/d
2	H. Frenadin Adegustara. SH. MS	'196408231988111001	IV/c
3	Hj, Sri Arnetti. SH. MH	'195811051984032001	IV/b
4	Dr. Khairani. SH. MH	'196212111989012001	IV/b
5	Dr. Syofiarti. SH. MH	'197405181999032001	IV/a
6	Hj. Hendria Fithrina. SH. MH	'196812281999032001	III/d
7	Dr. Azmi Fendri. SH. M.Kn	'197505102005011003	III/d
8	Dr. Hengki Andora. SH. LLM	'198006162005011003	III/d
9	Darnis. SH. MH	'196202151989012001	III/c
10	Hj. Titin Fatimah. SH. MH	'197406162002122001	III/c
11	Lerri Patra. SH. MH	'198301062008011003	III/c
12	Romi. SH. MH	'198101272003121001	III/c
13	Dr. Anton Rosari, SH. MH	'197502042006041001	III/c
14	Gusminarti. SH. MH	'196208081988112001	III/c

Tabel 3.5

Daftar Nama Dosen Departemen Hukum Internasional

No.	Nama	NIP	Gol
1	Prof. Dr. Zainul Daulay. SH. MH	'195911221986031002	IV/d
2	Dr. Mardenis. SH. M.Si	'196111121989031003	IV/c
3	Dr. H. Ferdi. SH. MH	'196807231993021001	IV/b
4	Dr. Delfiyanti, SH. MH	'197502162001122001	IV/b
5	Dr. Jean Elvardi. SH. MH	'196111191989011001	IV/a
6	Dr. H. Najmi. SH. MH	'195904081986031003	IV/a
7	Hj, Magdariza. SH. MH	'196210241989012002	IV/a
8	Dr. Syofirman Syofyan. SH. MH	'196402211990031001	III/c
9	Zimtya Zora. Z. SH. MH	'197908172006042001	III/c
10	Dayu Medina. SH. MH	'198412112009122004	III/b
11	Dewi Enggriyeni. SH. MH	'198212262010122004	III/b
12	Sri Asih Roza Nova, SH, MH	'197211272001122001	III/d
13	Sri Oktavia. SH. M.Sc. P.hD	'197210012001122002	III/a
14	Surya Oktaviandra, SH., LLM	198510272011011007	

Berdasarkan data tabel di atas, saat ini FH UNAND harus fokus pada peningkatan kapasitas dosen dengan memotivasi mereka untuk melanjutkan strata pendidikan dari S2 ke S3 (doktoral) dan kenaikan pangkat/jabatan dari Asisten Ahli menjadi Lektor (L), dari Lektor (L) menjadi Lektor Kepala (LK), serta Lektor Kepala (LK) menjadi Guru Besar (GB). Sejak tahun 2006, penerimaan dosen FH UNAND mensyaratkan calon dengan pendidikan strata dua (S2). Hal ini sejalan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Terkait kualifikasi akademik, jabatan dan pengalaman dosen FH UNAND yang ada saat ini sudah sangat memadai. Dari 90 orang dosen terdapat 10 (sepuluh) orang atau 9,2 % telah mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar (profesor). Kemudian, lebih dari separuh yaitu 53 orang dosen (53% lebih) telah menduduki jabatan lektor kepala, 28 orang (28%) dengan jabatan lektor, dan hanya 12 orang (12%) saja yang masih asisten ahli. Dengan demikian sebagian besar dosen FH

UNAND merupakan dosen-dosen senior yang telah berpengalaman di bidangnya. Kualifikasi akademik yang demikian juga menggambarkan bahwa komposisi dosen FH UNAND juga sudah tinggi. Sebanyak 43 orang (hampir 45%) dosen sudah mempunyai pendidikan doktor (S3), angka ini sudah memenuhi target sesuai dengan Renstra Dikti. Sisanya telah memenuhi standar Dikti dan UNAND.

Walaupun demikian, FH UNAND tetap berupaya meningkatkan kualitas dosen dengan mendorong para doktor untuk segera mengajukan pengusulan pengangkatan guru besar. Selain itu, juga didorong agar dosen yang berpendidikan magister (S2) untuk melanjutkan studi doktoral (S3) dengan memfasilitasi untuk mendapatkan berbagai insentif seperti bantuan biaya pendidikan, biaya penelitian, dan lain sebagainya. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan pengembangan SDM Dosen UNAND untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 1) Rekrutmen untuk dosen diprioritaskan bagi yang berpendidikan Doktor (S3);
- 2) Peningkatan kuantitas jenjang pendidikan, kepangkatan terutama Guru Besar dan Lektor Kepala;
- 3) Persentase dosen berpendidikan pada Doktor (S3) pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 65%;
- 4) Memberikan insentif khusus bagi dosen yang memiliki prestasi luar biasa di bidang tridarma perguruan tinggi atau yang memiliki potensi besar untuk melanjutkan studi ke Luar Negeri (LN) pada Universitas Bereputasi (dalam rangka mendorong internasionalisasi dan *network*;
- 5) Mengimplementasikan kelas berbahasa Inggris dan mendorong terjadinya "*lecturers mobility*";
- 6) Mendorong dosen muda untuk memperoleh gelar S3 dengan memfasilitasi *accessibility* pada Universitas bereputasi (DN dan LN) melalui program kerja sama, memberikan pelatihan persiapan untuk studi lanjut (Bahasa Inggris), dan mendukung proses untuk mendapatkan beasiswa;
- 7) Menyediakan hibah riset khusus bagi dosen dan mahasiswa dalam penelitian bersama, serta percepatan menuju guru besar. Hibah penelitian diberikan dalam beberapa skema yang dirancang untuk meningkat publikasi dosen pada jurnal nasional dan internasional bereputasi.

b. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan yang mendukung pengelolaan layanan FH UNAND saat ini berjumlah sebanyak 42 orang untuk semua unit kerja yang ada di Fakultas. Jumlah tersebut terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) 18 orang 42,85% dan Pegawai Honorer sebanyak 24 orang 57,14%. Kualifikasi dan keterampilan tenaga kependidikan sangat menentukan dalam memberikan layanan bagi civitas akademika. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan juga sangat diperlukan.

Adapun arah kebijakan pengembangan SDM untuk tenaga kependidikan periode 2022-2027 adalah:

- 1) rekrutmen tenaga kependidikan didasarkan pada kualifikasi pendidikan tertentu yang dibutuhkan dalam memberikan berbagai layanan Fakultas;
- 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan berkualitas, baik aspek pengetahuan, kemampuan, ketrampilan maupun karakter;
- 3) Mendorong dan memberikan kesempatan pada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan atau kursus atau studi lanjut guna meningkatkan kualitas dan kompetensinya dengan menetapkan aturan dan memperhatikan kinerja;
- 4) Memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai bentuk reward, serta memberikan sanksi bagi yang melakukan terhadap peraturan dan kode etika yang berlaku di UNAND.

3.3.3. Reformasi Birokrasi

Merujuk peta jalan reformasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, di mana visi reformasi birokrasi Kemendikbudristek adalah “Terwujudnya

Pemerintahan Kelas Dunia”, maka reformasi birokrasi FH UNAND juga sejalan dengan visi tersebut. Upaya pencapaian pembangunan pemerintahan kelas dunia Kemendikbudristek tersebut diarahkan kepada “pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025”.

Untuk itu, reformasi birokrasi internal UNAND, khususnya FH UNAND juga mengacu pada reformasi internal Kemendikbudristek. Hal mana, langkah tersebut merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan FH UNAND. Secara umum, reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, kurang profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

FH UNAND telah mencanangkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sejalan dengan program yang telah dimulai di tingkat universitas. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, proses ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan pengembangan Fakultas. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, FH UNAND juga sejalan dengan semangat Universitas dalam berkomitmen untuk melakukan reformasi yang meliputi tujuh area perubahan, yakni:

- 1) Manajemen perubahan;
- 2) Penguatan pengawasan;
- 3) Penguatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Penguatan kelembagaan;
- 5) Penguatan tata laksana;
- 6) Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;

7) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan melaksanakan tujuh aspek reformasi, *good university governance* merupakan capaian ideal yang ditargetkan dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola sumber daya Fakultas secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi. FH UNAND berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan birokrasi perguruan tinggi berkelas dunia yang ditunjukkan dengan tata kelola yang efektif dan efisien, cepat dan mudah, bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas, dalam mewujudkan visi misi dan tujuan fakultas.

BAB IV

EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN

4.1. Kerangka Sumber Pembiayaan Rencana Strategis

Rencana penerimaan dan pengeluaran ini dibuat berdasarkan program kerja yang telah disusun. Program-program tersebut disusun berdasarkan hasil analisis kondisi eksternal dan internal yang bertujuan untuk mencapai visi, misi dan tujuan FH UNAND. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditentukan oleh proses pengelolaan yang tepat. Proses pengelolaan tersebut membutuhkan ketersediaan biaya yang memadai.

Memperhatikan pengalaman terdahulu, sumber pembiayaan yang dimiliki FH UNAND didominasi sumber penerimaan berupa iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau dana pengembangan institusi. Seiring berjalan waktu, untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya, FH UNAND harus berupaya menggali potensi sumber pembiayaan yang berasal bukan penerimaan biasa sebagaimana telah diperoleh selama ini.

Sumber penerimaan FH UNAND selama ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber pendapatan. Jenis penerimaan masing-masing kelompok yang direalisasi saat ini dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis pendapatan. Kelompok dan jenis pendapatan yang diterima saat ini dan yang potensial untuk diterima pada saat telah berstatus sebagai PTNBH diperlihatkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kelompok dan Jenis pendapatan FHUA 2022-2027

1. Jasa Pelayanan Pendidikan a. SPP b. UKT c. Bidik Misi d. Biaya pendidikan non gelar e. Sumbangan Pengembangan Institusi f. Sumbangan Lainnya 1) Wisuda 2) Semester Pendek 3) Legalisir 2. Pendapatan Pendidikan Lainnya a. Kerja sama pendidikan dalam dan luar negeri b. Sumbangan Alumni 3. Hibah Bantuan Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota 4. Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lain

- a. Denda Pustaka
- 5. Hibah Terikat Dalam Negeri
- 6. Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri
- 7. Sewa Tanah dan Gedung
 - a. Gedung Serba Guna (GSG)
 - b. Lapangan dan sarana olah raga
 - c. Sewa kantin/Lapak
 - d. Labor Komputer (Multimedia)
 - e. Sewa bangunan lainnya
- 8. Penerimaan dari pengelolaan program dan kegiatan Pusat Studi atau Lembaga yang ada di lingkungan FH UNAND
 - a. Pusat Studi Hukum dan Otonomi Daerah.
 - b. Pusat Studi Konstitusi.
 - c. Pusat Studi Agraria dan Adat
 - d. Pusat Studi Hukum Ekonomi.
 - e. Pusat Studi Samudera Hindia.
 - f. Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - g. Pusat Kajian Masalah Hukum Internasional.
 - h. Pusat Studi Perundang-Undangan.
 - i. Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
 - j. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi
 - k. Pusat Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
 - l. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan PTNBH yang memberikan otonomi lebih luas kepada Universitas, ke depannya FH UNAND dituntut untuk mengembangkan alternatif pendapatan sejalan dengan kebijakan Universitas.

Pendayagunaan Dosen yang potensial meraup penambangan pendapatan bagi FH UNAND perlu dikembangkan. Lebih jauh, kegiatan yang berbentuk pemberian jasa hukum berbasis *knowledge* dan kepakaran Dosen juga perlu dikelola dan dioptimalnya. Kegiatan pada tabel 4.2 memperlihatkan kegiatan akademik yang potensial pada masa yang akan datang sebagai peluang untuk menambah pemasukan bagi FH UNAND.

Tabel 4.2
Kegiatan akademik yang potensial cara menambah pemasukan bagi FH UNAND

No	Kegiatan	Jenis Pendapatan	Pelaksana
1.	Program pendidikan non gelar, kursus, dan penyegaran	Biaya kursus	Fakultas/Departemen/ Prodi/Lembaga
2.	Kegiatan yang dikelola Pusat Studi	Fee universitas / FHUA	Pusat Studi
3.	Pemberian Saksi Ahli	Fee Universitas / FHUA	Dosen
4.	Penyusunan Naskah Akademik	Fee Universitas / FHUA	Fakultas/ Pusat Studi / Dosen

4.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya

4.2.1. Asumsi-asumsi Ekonomi Makro

Dalam rangka penyusunan rencana strategis ini digunakan indikator ekonomi makro yang digunakan ditingkat Universitas berupa: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan pertumbuhan penduduk seperti terlihat pada Tabel 4.3.

*Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro 2024*

Uraian	Realisasi					Proyeksi		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,17	5,02	2,07	3,69	5,26	5,28	5,35
Laju Inflasi (%)	3,61	3,13	3,50	1,68	1,87	4,68	5,50	4,90
Jumlah Penduduk (jt)	261,36	264,16	266,91	269,60	272,68	275,69	278,65	281,64

Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 dapat direalisasikan 5,07% dan meningkat menjadi 5,17% pada tahun 2018. Namun pada tahun berikutnya dan juga selama pandemi Covid-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sehingga pada tahun 2021 menjadi 3,69%. Lembaga independen riset dan media online memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit di atas 5,00% sampai tahun 2024 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas. Di lain pihak, Bappenas membuat 3 skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 2024; rendah, sedang, dan tinggi. Skenario pertama pertumbuhan ekonomi terendah memiliki rentang 5,3% hingga 5,5%, dimana pada tahun 2022 sebesar 5,4%, tahun 2023 sebesar 5,5%, dan tahun 2024

sebesar 5,5%. Sedangkan skenario kedua dengan pertumbuhan ekonomi memiliki rentang 5,4% hingga 6,1%, dimana pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,7%, tahun 2023 sebesar 5,9%, dan tahun 2024 sebesar 6,4%. Sedangkan skenario ketiga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,5% hingga 6,5%, dimana pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,9%, tahun 2023 sebesar 6,2%, dan tahun 2024 sebesar 6,5%.

Perkembangan inflasi Indonesia juga menunjukkan kondisi lebih baik. Jika pada tahun 2017 inflasi Indonesia adalah 3,61% dan pada tahun-tahun berikut turun sehingga tahun 2021 menjadi 1,87%. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengawasi pembatasan import dan meningkatkan ekspor, diharapkan tingkat inflasi di Indonesia bisa diturunkan. Namun Lembaga independen riset dan media online memperkirakan Inflasi di Indonesia tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,68% tahun 2022, meningkat menjadi 5,50% tahun 2023 dan turun menjadi 4,90% tahun 2024.

Sementara itu jumlah penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik diperkirakan mencapai 275,69 juta jiwa pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 281,64 juta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan suatu jumlah yang cukup besar dan potensial jika dikelola dengan baik. Jumlah penduduk yang sangat besar jika dikelola dengan baik, akan menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Di samping perlunya sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya. Untuk itulah, peranan perguruan tinggi sangat diharapkan. FH UNAND dalam hal ini hendaknya dapat meningkatkan kualitas alumninya sebagai aset bangsa sehingga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, rencana strategis diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan program studi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan hukum. Di samping itu, menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan metode pengajaran

dosen serta meningkatkan kualitas kurikulum melalui penciptaan sistem standar mutu yang memadai. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi praktisi dalam proses pembelajaran juga sangat penting dalam peningkatan kualitas alumni sebagai tenaga siap pakai sebagai sumber daya manusia hukum di Indonesia.

4.2.2. Asumsi-asumsi Mikro Fakultas Hukum Universitas Andalas

Asumsi mikro FH UNAND berkaitan dengan variabel-variabel utama yang akan menentukan perkembangan FH UNAND di masa mendatang. Variabel tersebut terdiri dari jumlah program studi, jumlah mahasiswa, tarif UKT, SPP dan tarif pendapatan pendidikan lainnya. Oleh sebab itu perlu penjelasan lebih lanjut tentang variabel-variabel ini.

a. Program Studi

Jumlah program studi FH UNAND pada tahun 2021 yang ada adalah sebagai berikut:

- (1) Jenjang pendidikan Sarjana, program studi ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2026/SK/BANPT/Akred/S/VI/ 2019, berlaku untuk selama lima tahun (berlaku s/d 25 - Juni - 2024);
- (2) Jenjang pendidikan Magister, program studi ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1034/SK/BANPT/Akred/M/IV/2019, berlaku untuk selama lima tahun (berlaku s/d 23 - April - 2024);
- (3) Jenjang pendidikan Magister, program studi Kenotariatan terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No.1850/SK/BANPT/Akred/M/V/ 2019, berlaku untuk selama lima tahun (berlaku s/d 28 - Mei - 2024);
- (4) Jenjang pendidikan Doktor, program studi ilmu Hukum terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN PT No 3161/SK/BANPT/Akred/D/VIII/2019 berlaku untuk selama lima tahun (berlaku s/d 20 – Agustus - 2024).

Selain itu, FH UNAND juga perlu melakukan penjajakan dan menyusun rencana pengembangan dengan membuka program studi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan atau pun masyarakat.

b. Mahasiswa

Proyeksi jumlah mahasiswa ditentukan oleh banyak faktor. Prinsip yang digunakan dalam penetapan jumlah daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dengan tetap mengutamakan mutu. Aspek sumber daya yang sangat terasa adalah terutama terkait dengan ketersediaan lahan untuk memfasilitasi aktivitas akademik dan aktivitas penunjang. Adapun perkiraan penambahan jumlah mahasiswa FH UNAND sampai akhir tahun 2027 dapat dilihat di tabel 4.4.

Tabel 4.4
Perkiraan Jumlah Mahasiswa Sampai Akhir Tahun 2027

No.	Program	Realisasi						Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	S1	1845	1939	2048	2143	2300	2494	2600	2500	2450	2400	2300
2	S2	205	234	240	267	307	343	420	440	460	480	500
3	S3	37	43	48	61	66	74	90	110	130	150	170
4	MKn	285	362	403	434	471	550	560	570	580	590	600

Selama periode 2022 sampai dengan 2027 direncanakan penerimaan mahasiswa untuk S1 adalah diturunkan hingga menjadi 400 orang/tahun. Adapun mahasiswa S2 sebanyak 200 orang/tahun, MKn sebanyak 100 orang/tahun, dan S3 sebanyak 30 orang /tahun.

4.2.3. Asumsi Tarif

Mulai tahun 2013, Universitas Andalas telah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek. Dengan sistem ini, mahasiswa tidak lagi dibebani kewajiban membayar dana selain UKT kecuali untuk kelas Mandiri. Besaran biaya UKT reguler

telah diubah menjadi 7 tingkatan (level) pada tahun 2017 berdasarkan Kepmen No.216/KPT/2017 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenristek Dikti tahun 2017. Besaran uang kuliah sesuai dengan besaran biaya UKT ini dapat dilihat pada tabel 4.5. Sedangkan besaran uang kuliah bagi mahasiswa Mandiri tertuang dalam peraturan Rektor No.2114/UN16.R/XIV/KPT/2019. Besaran uang kuliah ini dapat terlihat pada tabel 4.6. Level UKT dimaksud perlu dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan institusi.

Besaran UKT dihitung berdasarkan besaran biaya real yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan setiap program studi. Setelah mempertimbangkan target bantuan operasional dari Pemerintah, besaran UKT kemudian ditetapkan. Untuk implementasinya, besaran UKT ini dibagi atas 7 level, dari level terendah Rp. 500.000 per semester hingga tertinggi yaitu Rp. 3 juta per semester.

Tabel 4.5
Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Reguler 2022

NO.	PROGRAM STUDI	SPP PER SEMESTER
1	Hukum (S1)	1.500.000 s/d 3.000.000
2	Magister Hukum (S2)	8.000.000
4	Magister Kenotariatan (Mkn)	10.000.000
5	Doktor Ilmu Hukum (S3)	12.500.000

Sedangkan untuk kelas Mandiri ditentukan UKT dan Biaya Pengembangan Institusi yang setiap tahunnya berbeda, dengan data terakhir pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Mandiri 2022

NO.	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	SPP PER SEMESTER	BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI
1	Hukum (S1)	5.500.000,-	15.000.000,-
2	Magister Hukum (S2)	9.000.000,-	-
4	Magister Kenotariatan (Mkn)	12.500.000	-
5	Doktor Ilmu Hukum (S3)	-	-

4.2.4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Sumber pendapatan yang digunakan oleh FHUA direncanakan akan diperoleh dari pemerintah, masyarakat, pinjaman/hibah luar negeri dan usaha mandiri FH UNAND. Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bruto yang diterima FH UNAND dilakukan pembagian yaitu sebesar 40% untuk *sharing* remunerasi, 30% untuk Universitas, dan sisanya sebesar 30% digunakan oleh FH UNAND. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran FH UNAND dalam 4 tahun terakhir dan dapat dilihat pada tabel 4.7. Sedangkan penerimaan dan proyeksi penerimaan FH UNAND periode 2018 s/d 2027 dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.7

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran FHUA dalam 4 tahun terakhir

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PENERIMAAN					
2	Penerimaan Bruto PNB	IDR 18.864.902.664	IDR 22.210.509.000	IDR 20.458.569.000	IDR 22.959.781.000	IDR 26.437.245.330
3	Dana Tahir yang belum di Rekon				IDR 64.651.307	IDR -
4	Pengembalian PNB	IDR 28.867.500	IDR 29.850.000	IDR 67.380.000	IDR 32.152.500	IDR -
5	Pemotongan Jaket Almamater			IDR 64.350.000	IDR -	IDR -
6	Pemotongan ATK			IDR 88.993.300	IDR -	
7	Remunerasi	IDR 7.545.961.066	IDR 7.741.003.600	IDR 6.633.049.150	IDR 7.295.498.350	IDR 7.971.685.866
8	Sharing Fee Universitas Andalas	IDR 5.659.470.799	IDR 6.806.052.700	IDR 7.159.799.150	IDR 8.035.923.350	IDR 9.286.498.366
9	Izin Belajar S3	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
10	Jumlah Penerimaan Bersih Yang Bisa Digunakan	IDR 5.630.603.299	IDR 7.633.602.700	IDR 6.444.997.400	IDR 7.660.858.107	IDR 9.179.061.099
11	PENGELUARAN					
12	Pemotongan Pembagunan Gedung Serba Guna		IDR 1.286.500.000			
13	Pemotongan DED Gedung Labor Hukum		IDR 500.000.000			
14	Realisasi Belanja PNB	IDR 8.041.026.756	IDR 6.563.377.054	IDR 1.527.497.636	IDR 838.018.745	IDR 2.277.241.007
15	PNB	IDR (2.410.423.457)	IDR (716.274.354)	IDR 4.917.499.764	IDR 6.822.839.362	IDR 6.901.820.092
16	LAINNYA					
17	Saldo Awal TA (Luncuran)	IDR 5.883.725.861	IDR 6.390.987.377	IDR 5.674.713.023	IDR 4.231.253.185	IDR 6.488.776.545
18	Sisa Sharing Pascasarjana TA 2011 (Dipinjamkan Ke FKG)	IDR 239.704.273	IDR 239.704.273	IDR 239.704.273	IDR 239.704.273	IDR 239.704.273
19	SISA PNB YANG BISA DIGUNAKAN	IDR 3.473.302.404	IDR 5.674.713.023	IDR 10.592.212.787	IDR 11.054.092.547	IDR 13.390.596.637

Tabel 4.8

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan FHUA tahun 2018 - 2027

NO	JENIS PENERIMAAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	SPP	IDR 90.630.499	IDR 21.693.600	IDR -	IDR 4.875.000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
2	PRAKTIKUM	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
3	VARIABEL/SKS	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
4	PI	IDR 411.600.000	IDR 1.857.700.000	IDR 979.550.000	IDR 1.375.075.000	IDR 2.094.462.500	IDR 2.303.908.750	IDR 2.534.299.625	IDR 2.787.729.588	IDR 3.066.502.546	IDR 3.373.152.801
5	MATRIKULASI	IDR -	IDR -	IDR 7.800.000	IDR 7.200.000	IDR 14.000.000	IDR 15.400.000	IDR 16.940.000	IDR 18.634.000	IDR 20.497.400	IDR 22.547.140
6	UKT	IDR 4.624.110.000	IDR 5.015.565.000	IDR 5.423.730.000	IDR 5.958.945.000	IDR 6.457.500.000	IDR 7.103.250.000	IDR 7.813.575.000	IDR 8.594.932.500	IDR 9.454.425.750	IDR 10.399.868.325
7	BIDIK MISI	IDR 406.080.000	IDR 457.200.000	IDR 226.800.000	IDR 264.960.000	IDR 349.083.099	IDR 383.991.409	IDR 422.390.550	IDR 464.629.605	IDR 511.092.565	IDR 562.201.822
8	SPP MANUAL (OFFLINE)	IDR 3.900.000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR 801.000	IDR 881.100	IDR 969.210	IDR 1.066.131	IDR 1.172.744	IDR 1.290.019
9	WISUDA	IDR 75.900.000	IDR 72.000.000	IDR 23.100.000	IDR -	IDR 143.625.000	IDR 157.987.500	IDR 173.786.250	IDR 191.164.875	IDR 210.281.363	IDR 231.309.499
10	SEMESTER PENDEK	IDR 30.105.000	IDR 12.690.000	IDR -	IDR 11.640.000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
11	LEGALISIR	IDR 11.257.800	IDR 8.774.100	IDR 3.440.700	IDR 5.664.300	IDR 4.789.500	IDR 5.268.450	IDR 5.795.295	IDR 6.374.825	IDR 7.012.307	IDR 7.713.538
12	KOMPREHENSIF	IDR 5.887.500	IDR 3.180.000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
13	PENDAFTARAN/REGIS	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR 1.050.000	IDR 1.155.000	IDR 1.270.500	IDR 1.397.550	IDR 1.537.305	IDR 1.691.036
14	KELAS KERJASAMA	IDR -	IDR 214.650.000	IDR -	IDR -	IDR 97.500.000	IDR 107.250.000	IDR 117.975.000	IDR 129.772.500	IDR 142.749.750	IDR 157.024.725
15	Sewa			IDR 1.300.000	IDR -	IDR 16.250.000	IDR 17.875.000	IDR 19.662.500	IDR 21.628.750	IDR 23.791.625	IDR 26.170.788
16	LAIN-LAIN	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
TOTAL		IDR 5.659.470.799	IDR 7.663.452.700	IDR 6.665.720.700	IDR 7.628.359.300	IDR 9.179.061.099	IDR 10.096.967.209	IDR 11.106.663.930	IDR 12.217.330.323	IDR 13.439.063.355	IDR 14.782.969.691

Seperti terlihat pada table 4.7, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) FH UNAND setiap tahunnya mengalami peningkatan, ke depan diharapkan akan tetap mengalami kenaikan. FH UNAND dapat memaksimalkan pendapatan sewa serta pendapatan dari program kerja sama yang dilakukan unit-unit kerja FH UNAND.

Adapun penggunaan anggaran untuk tahun 2022-2027 diarahkan untuk kegiatan yang menyokong pencapaian tujuan dan sasaran strategis FH UNAND. Prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas menjadi pegangan dalam penganggaran tersebut, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kaidah penggunaan anggaran berbasis *outcome*.

Adapun proyeksi penggunaan anggaran dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian yakni penggunaan anggaran untuk layanan perkantoran, layanan pembelajaran/pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana penunjang dan operasional Fakultas. Realisasi, proyeksi, komposisi penggunaan anggaran FH UNAND tahun 2020 sampai 2027 dapat dibaca pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9

Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Anggaran FHUA tahun 2020-2027

No	Jenis Penggunaan Anggaran	Realisasi			Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Layanan Perkantoran	IDR 925.499.600	IDR 653.830.000	IDR 621.280.000	IDR 630.599.200	IDR 640.058.188	IDR 649.659.061	IDR 659.403.947	IDR 669.295.006
2	Layanan Pembelajaran/Pendidikan	IDR 6.162.530.700	IDR 3.984.742.000	IDR 5.583.737.984	IDR 5.667.494.054	IDR 5.752.506.465	IDR 5.838.794.062	IDR 5.926.375.972	IDR 6.015.271.612
3	Penelitian	IDR 987.500.000	IDR 1.410.000.000	IDR 1.920.000.000	IDR 1.948.800.000	IDR 1.978.032.000	IDR 2.007.702.480	IDR 2.037.818.017	IDR 2.068.385.287
4	Pengabdian Masyarakat	IDR 220.000.000	IDR 220.000.000	IDR 270.000.000	IDR 274.050.000	IDR 278.160.750	IDR 282.333.161	IDR 286.568.159	IDR 290.866.681
5	Sarana/Prasarana Penunjang	IDR 3.354.885.239	IDR 1.831.671.155	IDR 5.382.800.000	IDR 5.463.542.000	IDR 5.545.495.130	IDR 5.628.677.557	IDR 5.713.107.720	IDR 5.798.804.336
Jumlah		IDR 11.650.415.539	IDR 8.100.243.155	IDR 13.777.817.984	IDR13.984.485.254	IDR14.194.252.533	IDR14.407.166.321	IDR14.623.273.815	IDR14.842.622.923

Menurut jenis belanja, anggaran FH UNAND dapat dikelompokkan berdasarkan jenis belanjanya yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Proyeksi belanja FH UNAND tahun 2019 sampai 2024 dapat dibaca pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja tahun 2020 sampai 2024

No	Jenis Belanja	Tahun							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Total Belanja	IDR 7.129.776.300	IDR 8.100.243.156	IDR 13.374.458.090	IDR 13.575.074.961	IDR 13.778.701.086	IDR 13.985.381.602	IDR 14.195.162.326	IDR 14.408.089.761
3	Belanja Pegawai	IDR 15.989.600	IDR 70.920.480	IDR 249.566.080	IDR 53.309.571	IDR 57.109.215	IDR 60.965.853	IDR 64.880.341	IDR 68.853.546
		IDR 509.510.000	IDR 82.909.520	IDR 71.713.920	IDR 77.289.629	IDR 82.948.973	IDR 88.693.208	IDR 94.523.606	IDR 100.441.460
3	Belanja Barang	IDR 2.677.129.409	IDR 1.028.354.777	IDR 1.996.477.513	IDR 1.071.424.676	IDR 1.147.496.046	IDR 1.224.708.487	IDR 1.303.079.114	IDR 1.382.625.301
		IDR 1.692.901.300	IDR 1.586.387.223	IDR 1.777.260.471	IDR 1.818.919.378	IDR 1.861.203.169	IDR 1.904.121.216	IDR 1.947.683.035	IDR 1.991.898.280
4	Belanja Modal	IDR 1.527.520.239	IDR 1.510.361.039	IDR 1.823.357.124	IDR 1.865.707.481	IDR 1.908.693.093	IDR 1.952.323.489	IDR 1.996.608.342	IDR 2.041.557.467
		IDR 1.827.365.000	IDR 1.21.310.117	IDR 1.559.442.876	IDR 1.597.834.519	IDR 1.636.802.037	IDR 1.676.354.067	IDR 1.716.499.378	IDR 1.757.246.869

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 total belanja FH UNAND (belanja pegawai tidak tetap, belanja barang dan belanja modal) mencapai Rp. 7,130 milyar. Sedangkan pada tahun 2027 total belanja FH UNAND diproyeksikan mencapai Rp. 14, 408 milyar.

BAB V

RENCANA STRATEGIS 2022-2027

5.1. CITA-CITA FAKULTAS HUKUM

Kehadiran FH UNAND sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Universitas adalah untuk berkontribusi bagi kejayaan bangsa. Dalam perkembangannya, cita-cita itu diterjemahkan menjadi visi FH UNAND, ***“Menjadi Fakultas Hukum yang Bermartabat dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2027”***.

Visi “bermartabat” menunjukkan harga diri atau harkat keilmuan untuk kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan “bermartabat”, FH UNAND meletakkan sikap atau adab sebagai yang utama dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam arti, dengan bermartabat, institusi FH UNAND bercita-cita untuk selalu melahirkan para ilmuwan dan praktisi hukum yang selalu menjunjung tinggi etika dalam melaksanakan segala peran hukum yang diembannya.

Visi “mampu bersaing” menunjukkan cita-cita FH UNAND untuk selalu meningkatkan kapasitas intelektual civitas akademiknya, sehingga kapasitas akademik dimaksud mampu menghantarkan FH UNAND menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum yang berkontribusi nyata bagi kemajuan dunia hukum Indonesia dan dunia.

Lebih jauh, visi FH UNAND di atas memiliki makna bahwa lulusan yang didambakan FH UNAND adalah orang yang selain memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan memiliki keterampilan hukum, juga memiliki karakter yang unggul. Karakter unggul tersebut dirumuskan dalam empat elemen, yaitu keimanan, karakter dalam keilmuan, karakter dalam beramal serta karakter dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat. Dengan profil lulusan yang demikian, FH UNAND diharapkan mampu

melahirkan lulusan yang memiliki daya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga pada tingkat global.

Bila diturun lebih jauh, visi bermartabat dan mampu bersaing di tingkat global nantinya akan dicirikan dengan:

- a. FH UNAND memiliki staf pengajar dengan karakter kuat, dengan kualifikasi baik dalam melakukan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian;
- b. Dosen FH UNAND berkontribusi dalam membangun dunia hukum yang dicitakan dalam konstitusi negara dan berbasis pada upaya meletakkan hukum pengawal bagi kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- c. FH UNAND memiliki jaringan kerja sama luas dan menjalin hubungan kerja sama dengan fakultas hukum atau sekolah hukum secara global sekaligus menjadi partner peneliti Internasional;
- d. Arah pengembangan penelitian FH UNAND ditujukan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional;
- e. Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi meliputi seluruh proses organisasi utama, baik dalam administrasi, pelayanan dan pembelajaran serta menjadi penyokong utama bagi pengambilan keputusan; dan
- f. Karakter unggul terinternalisasi dalam diri semua warga FH UNAND, terlihat dalam cara berpikir, cara bersikap maupun cara bertindak.

Pencapaian cita-cita tersebut ditunjukkan dengan capaian antara lain:

- a. peringkat dunia dengan target masuk 700 terbaik di dunia.
- b. Sistem tata kelola telah terintegrasi penuh dengan ICT.
- c. Riset FH UNAND sudah terkonsolidasi dengan atmosfer riset dan inovasi yang baik.
- d. Kegiatan penelitian telah fokus dan tersinergi dalam *road map* penelitian unggulan yang ditujukan untuk menghasilkan output yang memberikan dampak dari *delivery* hasilnya untuk masyarakat.
- e. Suasana akademik mulai kental dengan *internasional atmosphere*, mahasiswa mulai menguasai bahasa asing, dan memiliki karakter yang kuat.

5.2. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka sasaran strategis (*strategic goals*) dalam 5 (lima) tahun (2022-2027) adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan.

Sasaran Strategis:

SS1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan.

Indikator:

1. Persentase Lulusan Bekerja/Berprofesi di bidang Hukum/Studi Lanjut.
2. Persentase Mahasiswa Berprestasi dan Berkegiatan di Luar Kampus.
3. Persentase Matakuliah Berbasis Kasus/Projek dan Berbasis pada Praktek Peradilan Semu serta Berbasis Pada Konseling/Klinik Hukum.
4. Persentase Prodi Terakreditasi Internasional.
5. Rasio Afirmasi
6. Rangking Fakultas Hukum di Tingkat Asia dan di Tingkat Internasional.
7. Jumlah Mahasiswa Pascasarjana.
8. Jumlah Unit Layanan (Program Studi, Laboratorium Hukum, Perpustakaan, dll) Tersertifikasi.

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas pembelajaran.
- (2) Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran kampus merdeka.
- (3) Peningkatan optimalisasi pelayanan Perpustakaan fakultas dan laboratorium Hukum.

-
- (4) Internasionalisasi melalui peningkatan akreditasi menuju akreditasi internasional.
 - (5) Penguatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum.
 - (6) Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa.
 - (7) Peningkatan afirmasi dan beasiswa mahasiswa.
 - (8) Pembinaan softskill, karakter, dan prestasi mahasiswa.
 - (9) Penguatan kompetensi mahasiswa dan lulusan.

Misi 2: Melaksanakan penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional.

Sasaran Strategis:

SS2: Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional.

Indikator:

- 9. Rasio Penerapan Riset Dosen.
- 10. Meningkatnya jumlah dan penelitian hukum yang berkualitas secara signifikan.
- 11. Semakin bervariasi jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh dosen.
- 12. Meningkatnya kolaborasi riset bersama peneliti/institusi asing.

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/internasional.
- (2) Peningkatan Produktivitas dan pengelolaan Jurnal di Lingkungan Fakultas.
- (3) Penguatan Kapasitas Infrastruktur Pendidikan dan Kualitas Penelitian Dosen.

SS3 : Menguatnya kapasitas inovasi hasil penelitian dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Indikator :

14. Semakin meningkatnya luaran hasil penelitian yang digunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan.

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut:

- (1) Penguatan Kelembagaan Riset Melalui Optimalisasi Pusat Studi
- (2) Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), inovasi, dan hilirisasinya untuk masyarakat
- (3) Peningkatan dan Penguatan riset unggulan/riset kerjasama
- (4) Pengembangan *start-up* bisnis berbasis hasil riset atau komersialisasi HKI

Misi 3 : Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan solutif sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis:

SS4 : Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat inovatif dan solutif guna tercapainya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indikator:

15. Semakin meningkatnya pola dan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dapat menawarkan solusi alternatif sebagai jawaban atas situasi perkembangan hukum terkini.

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Pengajuan Usulan Pengabdian Masyarakat.

-
- (2) Optimalisasi penyampaian gagasan keilmuan hukum atau keterangan berdasarkan keahlian hukum yang dimiliki dosen.
 - (3) Peningkatan peran Fakultas dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Misi 4 : Mengembangkan organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis:

SS5 : Terwujudnya tata kelola yang baik sehingga mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan

Indikator:

- 16. Persentase Dosen Beraktivitas Di luar Kampus
- 17. Persentase Dosen Berkualifikasi
- 18. Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Kompetensi

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT.
- (2) Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu akademik.

SS6: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan dan pengelolaan organisasi

Indikator:

- 19. Kinerja layanan kepada seluruh *stakeholders*.
- 20. Kinerja Tata Kelola.

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik.
- (2) Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan.

SS7. Meningkatnya kualitas lembaga di lingkungan fakultas dengan sistem terintegrasi yang berbasis teknologi informasi

Program Pencapaian

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kemampuan SDM dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi.
- (2) Pengembangan dan integrasi sistem manajemen lingkungan terpadu.
- (3) Peningkatan kualitas lingkungan kerja.
- (4) Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Penguatan sistem manajemen kinerja fakultas.
- (6) Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi.

5.3. KEBIJAKAN

Lingkungan yang dinamis dan begitu cepat bergerak membuat FH UNAND juga harus dengan cepat melakukan langkah terukur dalam melakukan penyesuaian diri dengan menjalankan rencana strategisnya. Untuk lebih memberikan arah yang jelas maka beberapa kebijakan umum dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara umum jumlah total mahasiswa FH UNAND yang terdaftar diupayakan tetap stabil, namun untuk menjawab kebutuhan beberapa program studi yang ada di Fakultas Hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman perlu dikembangkan, seperti yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, komunikasi, hukum ekonomi syariah, hukum adat, yang sedang memiliki momentum untuk tumbuh, program-program untuk mengantisipasi perkembangan hukum dan masyarakat.
2. Proses pembelajaran diarahkan untuk memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, serta menyiapkan diri untuk pembelajaran daring untuk program yang relevan.
3. Program studi didorong untuk memperkuat kuantitas dan kualitas layanan pendidikan, sehingga rasio mahasiswa pascasarjana terhadap total jumlah

mahasiswa dapat ditingkatkan hingga 45% di tahun 2027. Ini akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan publikasi.

4. Riset-riset didorong untuk dilakukan secara sinergis dalam bentuk kelompok-kelompok riset (*research group*) yang fokus pada riset unggulan Unand untuk berkontribusi menuju kemandirian bangsa.
5. Program studi didorong mendapatkan akreditasi internasional dan memposisikan diri sebagai tujuan bagi calon mahasiswa berkualitas dari dalam dan luar negeri melalui perbaikan kurikulum, pembelajaran serta standar pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
6. Bidang Kerjasama akan diperkuat untuk melayani dosen dan mahasiswa asing serta kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan berbagai instansi dari luar negeri.
7. Pengembangan *softskill* dan karakter mahasiswa akan dilakukan melalui aktifitas intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan sistematis.
8. Fakultas akan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk memulai pemberian jasa atau layanan jasa hukum.

5.4. STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi pengembangan FH UNAND dibangun berdasarkan *enviromental scanning* dengan menganalisis kondisi eksternal, kondisi internal serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja dan keberadaan FH UNAND di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, strategi pengembangan FH UNAND dikelompokkan atas empat, yakni:

- (1) Strategi pertumbuhan dengan mengembangkan kekuatan dan mengambil peluang yang ada, yang diformulasi dari analisis faktor kekuatan dan peluang;
- (2) Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman, diformulasi dari analisis kekuatan dengan ancaman;

-
- (3) Strategi peningkatan efektivitas organisasi untuk memanfaatkan peluang, yang diformulasi dari analisis faktor kelemahan dan peluang; serta
 - (4) Strategi penguatan organisasi dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

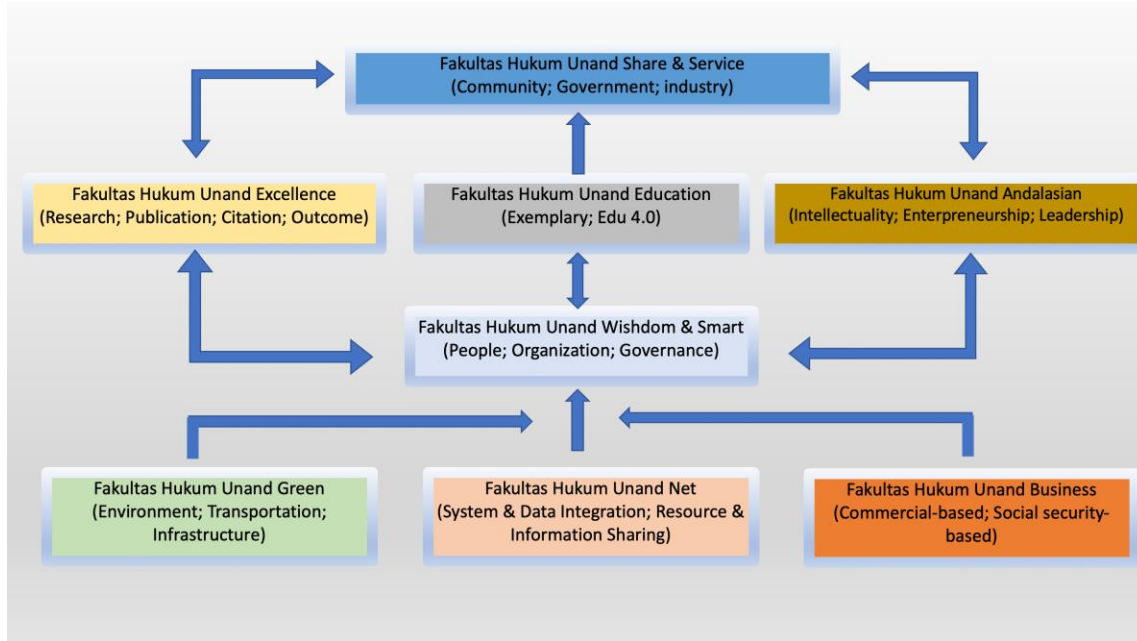
5.5. TEMA STRATEGIS

Hasil analisis lingkungan FH UNAND memberikan gambaran terkait kompleksitas dan dinamisnya lingkungan yang mempengaruhi FH UNAND. Ada banyak issue baik dari sisi eksternal maupun internal yang dihadapi. Karena dalam rencana strategis ini issue tersebut direspon dalam bentuk program atau inisiatif strategis serta dikawal dengan tema-tema strategis (*strategic themes*), atau *platform program*.

Tema strategis ini jauh lebih dari sekadar payung untuk tujuan strategis. Tema strategis ibaratkan pilar dan menunjukkan fokus kekuatan organisasi. Dengan keberadaan tema strategis ini diharapkan organisasi FH UNAND mampu keluar dari kungkungan silo-silo fungsional, serta juga untuk memperjelas pelaksanaan setiap aspek manajemen strategi. Tema-tema strategis yang diformulasi menyediakan arsitektur yang memungkinkan tindakan lintas fungsi, lintas-bidang secara terpadu yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan strategi.

Gambar 5.1

Tema Strategis Fakultas Hukum Unand Menjadi Fakultas yang Otonom



FH UNAND *Business*

Tema strategis/ platform ini merupakan kelompok program dan aktivitas dalam rangka mengoptimalkan asset Fakultas Hukum Unand dalam kegiatan *business*. Aset dimaksud meliputi: SDM, Gedung, Fasilitas, Aset intelektual. Program strategis dalam platform ini meliputi penataan sistem prosedur dan tata kelola secara internal, serta pengelolaan jaringan dengan pihak eksternal. Tujuan program strategis ini adalah FH UNAND mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya serta aset yang dimiliki dan menerjemahkan dalam bentuk bisnis sehingga mampu meningkatkan *income*, sebagai sumber pendapatan di luar sumber-sumber konvensional. *Income* yang dihasilkan akan digunakan lagi untuk meningkatkan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.

FH UNAND *Excellence*

Platform ini memberikan ruang bagi program dan kegiatan untuk mengangkat prestasi civitas dan akademika FH UNAND sehingga memiliki kualifikasi *excellent*. Prestasi ini meliputi prestasi dalam pembelajaran, penelitian serta karya-karya akademik lain. FH UNAND *Excellent* ditunjukkan sebagai strategi untuk tercapainya prestasi unggul dalam karya mahasiswa, daya saing lulusan dan alumni, produk hasil penelitian yang dikenal luas dan diakui di dunia internasional. Bentuk pengakuan itu akan terlihat dari posisi FH UNAND dalam sistem perangsangan perguruan tinggi di negara-negara Asia dan dunia serta dijadikan *benchmark* oleh lembaga pendidikan lain.

FH UNAND *Share & Service*

Share and Service menunjukkan bagaimana FH UNAND memberikan manfaat, berbagi kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada *stakeholder* eksternal. Kegiatan dalam kelompok ini dihimpun dalam kelompok besar yang diberi nama FH UNAND *Share & Service*. Wujud kegiatan dalam tema ini adalah aktivitas pelayanan dan pemberdayaan yang sifatnya non bisnis. Kegiatan dapat mensinergikan lintas unit dalam lingkungan Fakultas Hukum Unand, lembaga pemerintah, BUMN, organisasi masyarakat, dan lembaga swasta lainnya.

FH UNAND *Green*

Mengacu pada strategi Universitas Andalas yang berkomitmen untuk menjadi kampus hijau, maka FH UNAND juga akan mengacu pada strategi pengembangan yang *Green*. Upaya dan kontribusi dalam penyelamatan lingkungan diterjemahkan dengan terus menerus melakukan upaya peningkatan efisiensi, penghematan listrik, air, penggunaan kertas, bahan bakar, serta berbagai praktik kerja yang hemat dan efisien.

Program strategis dalam platform FH UNAND *green* ditujukan untuk menjadikan Fakultas Hukum sebagai lembaga yang sadar akan *sustainability*, serta ikut mempromosikan dan menjadi inspirasi dalam praktik pembangunan berkelanjutan. FH UNAND *green* selanjutnya akan terlihat semua dalam aktivitas pelayanan Fakultas Hukum: 1) pelayanan pendidikan, 2) pelayanan penelitian dan 3) pelayanan pengabdian.

FH UNAND *Education*

Program dalam platform ini ditujukan untuk menghasilkan pembelajaran kreatif inovatif, yang mengacu pada *exemplary education*. Program pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, memiliki *hardskills*, *softskills* dan karakter yang unggul sehingga dalam unggul dalam persaingan di dunia kerja, atau dunia usaha.

Dalam bidang akademik, sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah dilakukan perbaikan peraturan akademik dan membuat peraturan terkait dengan pelaksanaan berbagai program MBKM.

FH UNAND *Net*

Lingkungan bergerak dengan sangat dinamis, keputusan harus diambil dengan cepat. Dalam kondisi itu pengelolaan informasi menjadi krusial. Platform ini menjadi kerangka program dalam penyediaan *hardware*, *software*, *brainware*. Program strategis yang ada dalam platform ini adalah semua program yang mendukung efektif dan efisiennya pengelolaan sumberdaya informasi FH UNAND menuju kampus digital.

FH UNAND *Wisdom & Smart*

FH UNAND yang otonom harus dilengkapi melalui terlaksananya tata kelola organisasi yang unggul. Fungsi-fungsi organisasi berjalan secara efisien dan efektif. Pengambilan keputusan berlangsung berdasarkan data dan informasi yang terkelola dengan sangat baik, sehingga ini akan mampu meningkatkan pelayanan yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan pemangku kepentingan, baik yang internal seperti mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, maupun pemangku kepentingan eksternal, yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Platform Fakultas Hukum Unand *Wisdom & Smart* ini merupakan wahana di mana program strategis dan aktivitas yang terkait dengan tata kelola FH UNAND ditempatkan.

Sejak akhir 2022, langkah-langkah dalam rangka perbaikan tata kelola untuk mendorong perbaikan proses internal telah dilakukan. Sasaran yang ingin dicapai dengan perbaikan tata kelola adalah peningkatan kinerja, dalam berbagai aspek, baik akademik maupun non akademik. Selain itu juga terdapat sasaran tahunan (jangka pendek) dan sasaran jangka menengah.

FH UNAND *Andalasian*

Program pembelajaran FH UNAND bukan hanya ditujukan untuk mengembangkan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa. Visi FH UNAND dengan kata kunci bermartabat dan berdaya saing, menghendaki FH UNAND membangun juga aspek afektif yang mampu membangun akhlak, sikap dan perilaku yang unggul. Upaya untuk itu diawali dengan penetapan nilai-nilai inti/*core values* FH UNAND yang mengacu kepada nilai-nilai Andalasian yang ditetapkan oleh Universitas.

Platform FH UNAND Andalasian terbangun oleh program-program pengembangan dan pembangunan karakter mahasiswa, karakter tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, karakter proses pembelajaran, proses administrasi keuangan dan proses pelayanan lainnya. Target dari program ini adalah FH UNAND yang bermartabat, sesuai dengan *core values* dan karakter Andalasian.

Tema strategis yang dipilih FH UNAND tersebut digunakan sebagai *platform* dalam menempatkan program-program kerja lintas bidang sehingga tercipta sinergi antar fungsi yang ada. Pimpinan Fakultas hingga program studi dapat menjadikan tema strategis ini untuk menyeimbangkan antara tujuan strategis yang ada dalam Renstra.

Masing-masing tema strategis dimiliki oleh pejabat yang berbeda. Tugas dari pemilik tema adalah memastikan bahwa target yang hendak dicapai pada masing-masing tema strategis dapat dicapai. Untuk itu, dalam perencanaan tahunan dan dalam implementasi program, pemilik tema harus mengkoordinasikan program dan kegiatan yang berada dalam lintas fungsi atau lintas bidang.

Tabel 5.1
Daftar Tema Strategis dan Pemilik Tema

No	Tema Strategis	Pemilik Tema
1	FH Unand <i>Business</i>	Wakil Dekan II
2	FH Unand <i>Excellence</i>	Wakil Dekan I
3	FH Unand <i>Share & Service</i>	Wakil Dekan II
4	FH Unand <i>Green</i>	Wakil Dekan II
5	FH Unand <i>Education</i>	Wakil Dekan I
6	FH Unand <i>Net</i>	Wakil Dekan II
7	FH Unand <i>Wisdom & Smart</i>	Dekan
8	FH Unand <i>Andalasian</i>	Wakil Dekan I

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pemilik KPI	2022 (Baseline)	TARGET		
				2023	2024	2025
1.	Persentase Lulusan Bekerja/Wiraswasta/Lanjut Studi	WD I	10,75 %	60%	60%	60%
2.	Persentase Mahasiswa Berprestasi dan Berkegiatan di Luar Kampus	WD I	1,33%	25%	25%	25%
3.	Persentase Dosen Beraktifitas Di luar Kampus	WD I	7,72 %	30%	30%	30%
4.	Persentase Dosen Berkualifikasi	WD I	38,35 %	50%	50%	50%
5.	Rasio Penerapan Riset Dosen	WD I	2,76	3	3	3
6.	Persentase Prodi yang Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra	WD II	34,62 %	50%	50%	50%
7.	Persentase Matakuliah Berbasis Kasus dan Projek	WD I	18,70 %	50%	50%	50%
8.	Persentase Prodi Terakreditasi Internasional	WD I	34,62%	40%	40%	40%
9.	Rasio Afirmasi	WD I	30%	30%	30%	30%
10.	Rangking Fakultas di tingkat Internasional	DEKAN		584 Asia	182 Dunia	
11.	Jumlah Mahasiswa Pascasarjana	WD I	4639	4500	4500	4500
12.	Jumlah Tendik yang Bersertifikat Kompetensi	WD II				
13.	Jumlah Unit Layanan (prodi, labor, perpustakaan, dll) Tersertifikasi	WD I				
14.	Kinerja Pengelolaan Keuangan	WD II				
15.	Kinerja Pendapatan	WD II				
16.	Kinerja Tata Kelola	WD II	BB	BB	A	A

Gambar5.2

Strategy Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 1



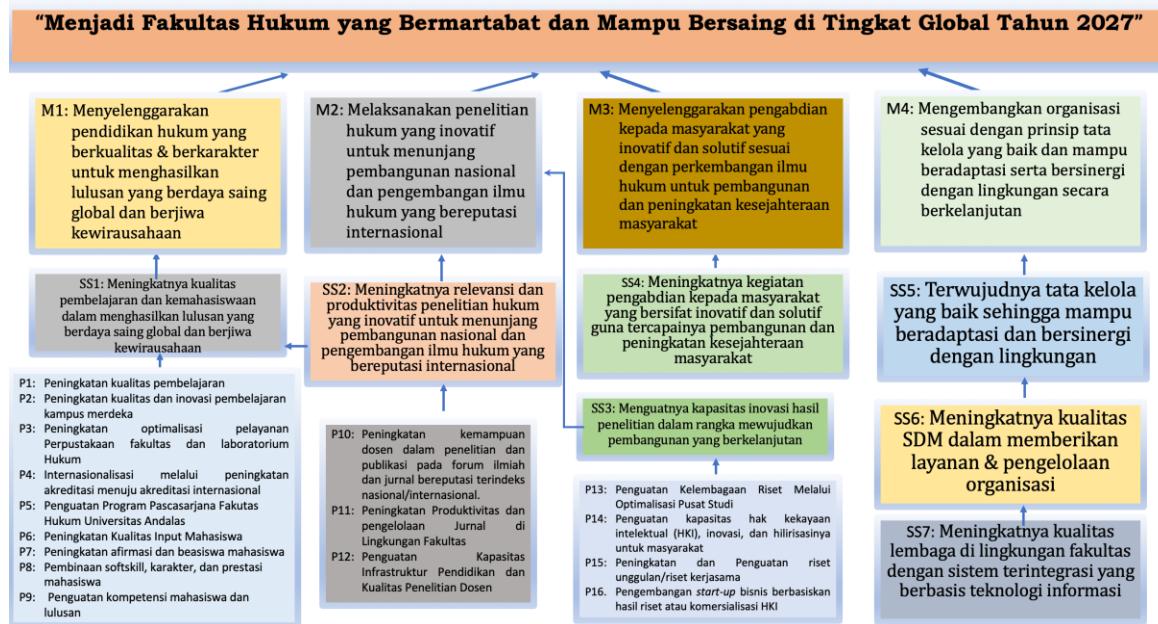
Gambar 5.3

Strategy Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 2



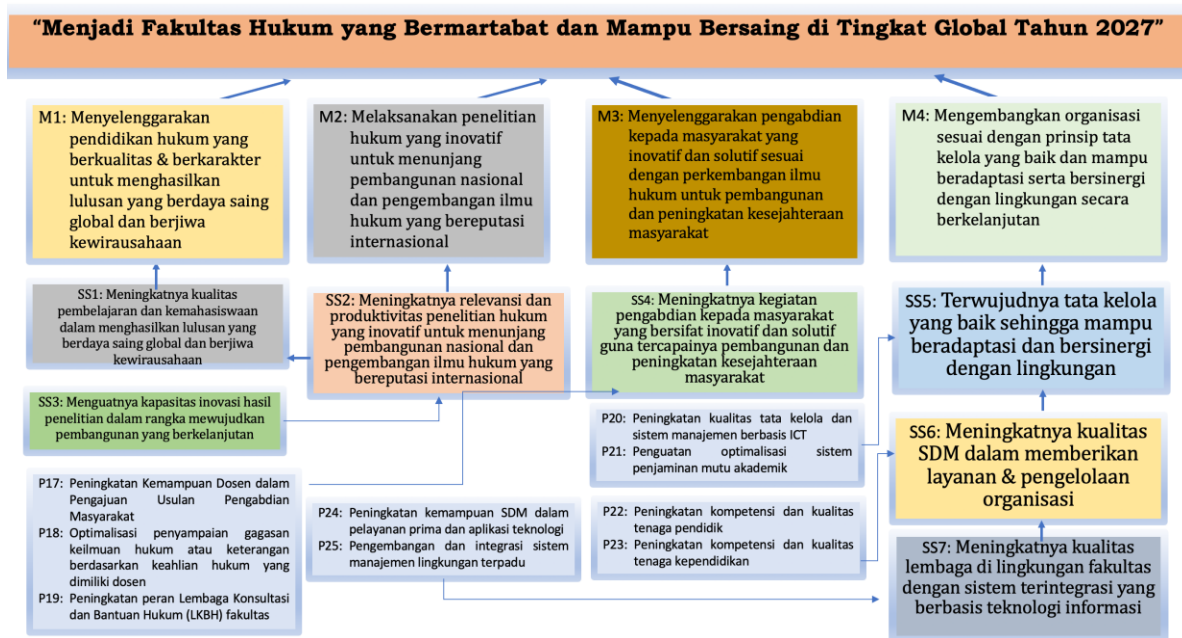
Gambar 5.4

Strategi Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 3 (1)



Gambar 5.5

Strategi Map Renstra Bisnis Fakultas Hukum Unand 2022-2027 Level 3 (2)



BAB VI PENUTUP

Secara umum uraian dalam bab-bab sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. FH UNAND mesti memiliki arah dan pola yang jelas dalam pengembangan institusi dalam rangka mencapai tujuan yang sejalan dengan tujuan Universitas Andalas. Untuk keperluan ini FH UNAND perlu menyusun Rencana Strategis 2022- 2027. Dalam rencana strategis tersebut termuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat hingga indikator keberhasilannya; [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
2. Renstra FH UNAND 2022-2027 sepenuhnya mengacu pada Renstra Bisnis Universitas Andalas serta mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dianalisis untuk menentukan strategi pencapaiannya. Proses penyusunan naskah Renstra sebagai kelanjutan dari Renstra FH UNAND sebelumnya sudah mempertimbangkan perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam Renstra Universitas Andalas;

-
3. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terlihat bahwa FH UNAND memiliki peluang yang besar, serta kekuatan yang memadai, namun masih memiliki beberapa aspek kelemahan yang perlu diperkuat segera. Dengan posisi seperti itu, FH UNAND perlu memprioritaskan konsolidasi internal pada tahap awal sambil bersiap mengambil peluang-peluang yang tersedia; [1]^[SEP]
 4. Arah pengembangan FH UNAND dengan mengacu pada tema menjadi *“Terdepan dalam pembangunan karakter dan kapasitas ilmuwan-praktisi hukum”* diarahkan pada pengembangan proses pembelajaran untuk melahirkan mahasiswa berkarakter, pengembangan peran dan kontribusi dosen terhadap kemajuan dunia hukum, dan pengembangan SDM tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima bagi warga kampus, khusus warga FH UNAND;
 5. Target yang ingin dicapai pada periode ini 2022-2027 ini adalah mantapnya transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia dan kekayaan lainnya serta terimplementasinya *good university government* secara bertanggung jawab dan konsekuen. Dengan modal ini FH UNAND bertekad menjadi salah satu Fakultas Hukum terkemuka dalam bidang hukum di tingkat nasional dengan masuk dalam 5 (lima) besar Fakultas Hukum di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia; [1]^[SEP]

Adapun rekomendasi langkah implementasi adalah sebagai berikut:

1. Langkah implementasi tujuan-tujuan strategis 2022-2027 ini akan diawali dengan mengkonsolidasikan kekuatan FH UNAND, sejalan dengan berlakunya PP PTNBH dan SOTK baru Universitas Andalas.
2. Seluruh unit kerja FH UNAND mesti mengadopsi peta strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini sehingga menjamin terjadinya sinergi antar sumber daya yang dimiliki FH UNAND. [1]^[SEP]
3. Program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada hubungan yang terdapat dalam *strategy map* Renstra FH UNAND 2022-2027. Urutan prioritas pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan hubungan antara aktivitas serta penilaian dampaknya terhadap pencapaian sasaran strategis Fakultas.

-
4. Penguatan dalam aspek monitoring dan evaluasi akan dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan didasarkan pada informasi yang akurat dan cepat sehingga kemajuan pencapaian target rencana strategis ini dapat dilakukan secara efektif. [L]
[SEP]